



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 29);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen visi, misi dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam Program dan Kegiatan Pembangunan tahunan daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - Bab IV : Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
 - Bab VI : Penutup.
- (4) Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 4

Dalam hal RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2013 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012
NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

DAFTAR ISI

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2012	
Daftar Isi	i – ii
Lampiran Pergub Nomor 24 Tahun 2012	iii
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Hubungan antar Dokumen	7
1.4. Sistematika Dokumen RKPd	8
1.5. Maksud dan Tujuan	8
Bab II	
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPd Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja	
Penyelenggaraan Pemerintahan	10
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	10
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	10
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	29
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	57
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	59
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
RKPd sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	66
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	102
Bab III	
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan	
Daerah	126
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	126
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan	
Ekonomi	126
3.1.2. Struktur Sektor Ekonomi	127
3.1.3. Struktur Pengeluaran dalam PDRB	129
3.1.4. Inflasi	131
3.1.5. ICOR	132
3.1.6. Ketenagakerjaan	133
3.1.7. Kemiskinan	134
3.1.8. Ketimpangan Regional	135
3.1.9. Ketimpangan Pendapatan	135
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	136
3.2.1. Analisis Keuangan Daerah	136
3.2.2. Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah	138
3.2.3. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana	142
3.2.4. Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah	147
3.2.5. Perhitungan Pengeluaran Daerah	151
3.2.6. Analisis Pengeluaran Pembiayaan Tahun Rencana	152

Bab IV	Tema, Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	155
	4.1. Tema Pembangunan Daerah	155
	4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	157
	4.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan	160
	4.4. Sasaran Pembangunan Daerah	162
Bab V	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah	163
Bab VI	Penutup	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (Rogers, 1983).

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal 31 Maret 2010 telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama 3 Menteri tersebut dinyatakan bahwa bagi provinsi, kabupaten dan kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014.

RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.
Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD untuk tahun ini dilakukan revitalisasi dalam pelaksanaannya, dimana terjadi penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum SKPD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara SKPD, Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
 - b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan.
 - c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.
 - d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
 - e. Sinergi dengan RKP.
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.
Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
6. Penetapan RKPD.
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

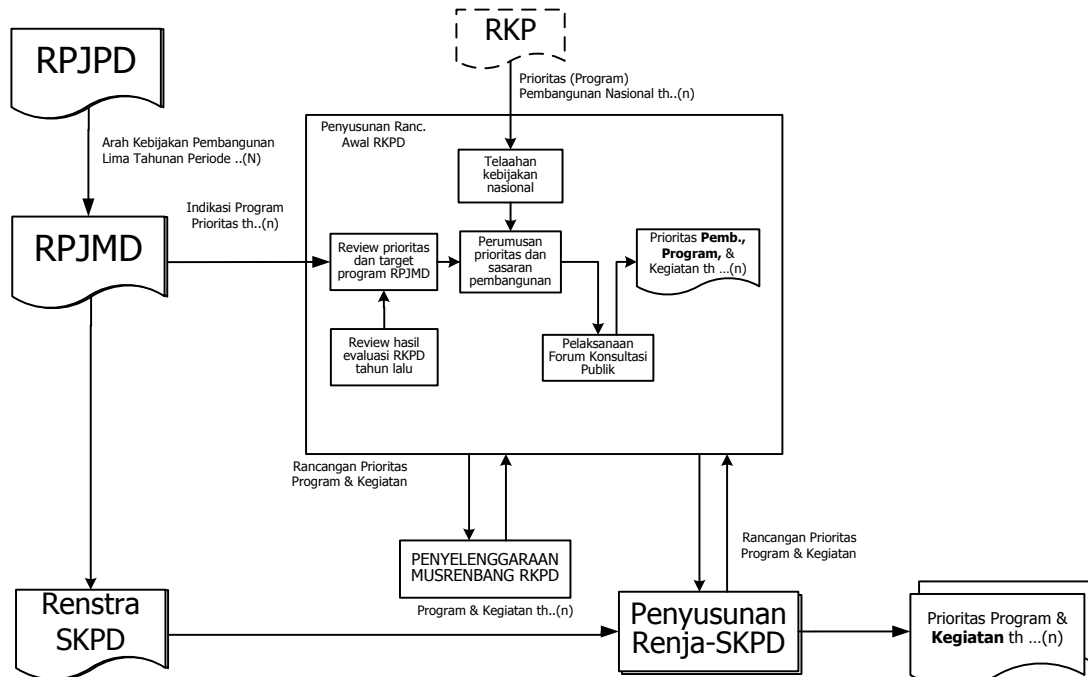
Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyesuaian:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2009-2013, yang merupakan tahun akhir dari pelaksanaan RPJMD. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I.1.1.1
Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap
Penyusunan Rancangan Awal RKPD



RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2013 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

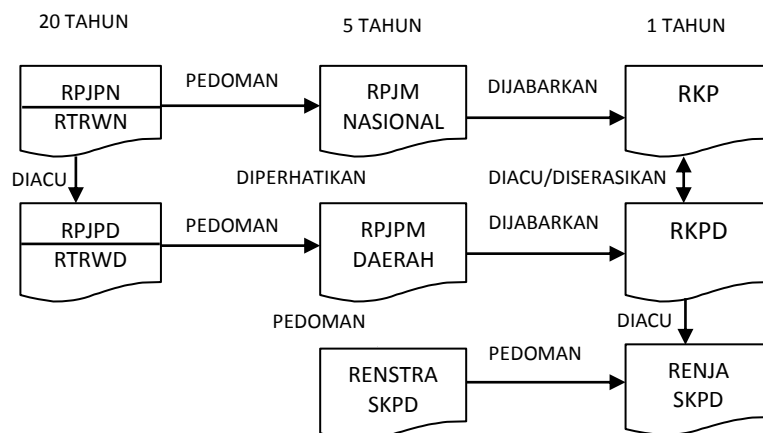
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;**
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY;

22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I.1.3.1
Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan.

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

5. Bab V Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

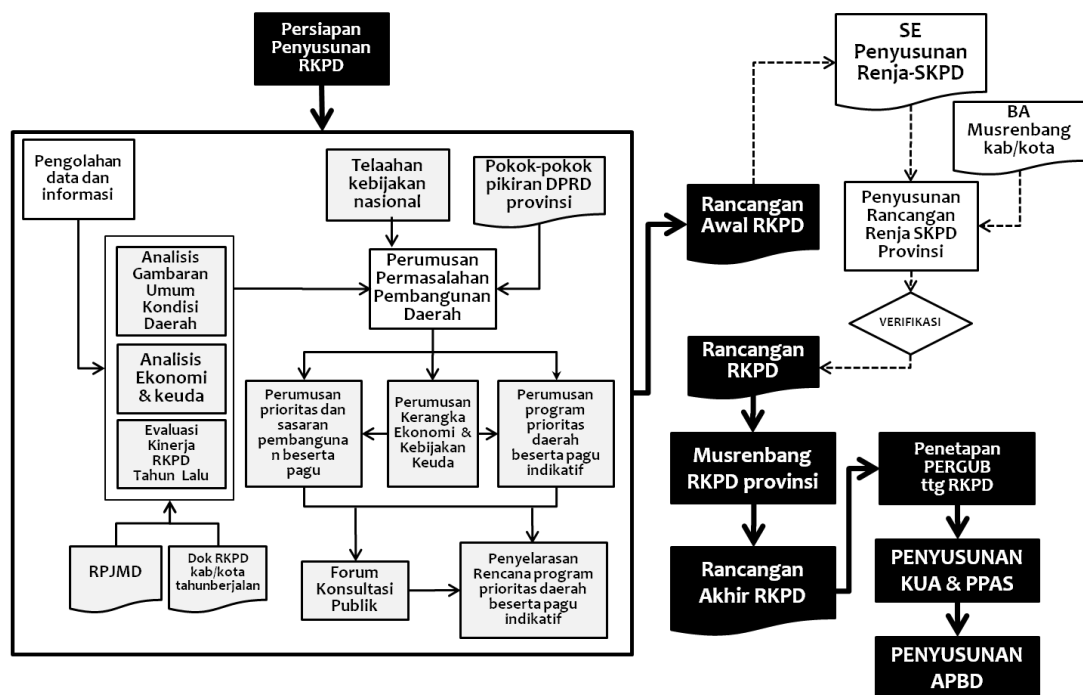
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2013.

Gambar I.1.5.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD Provinsi



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

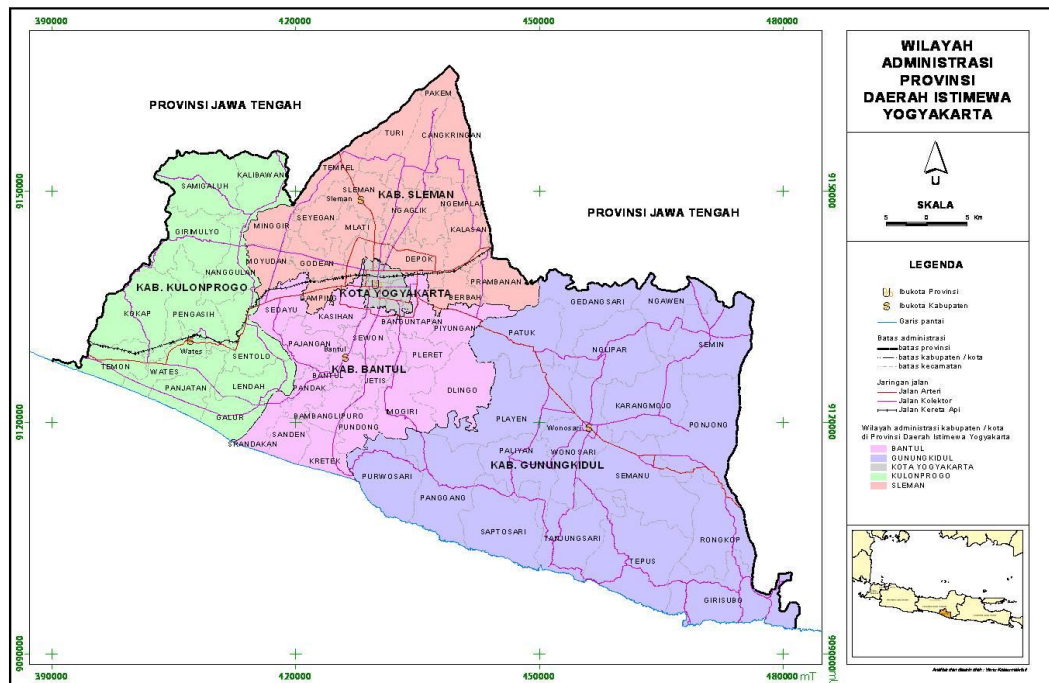
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada di pulau Jawa bagian tengah, tepatnya sisi selatan Pulau Jawa, dengan bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

Gambar II.2.1.1

Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

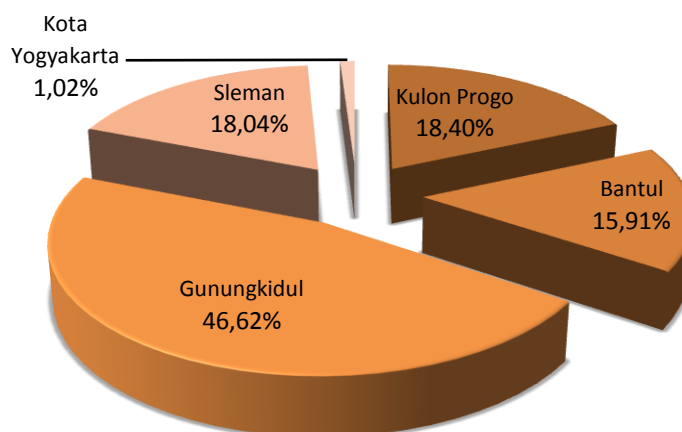


Provinsi DIY terletak pada posisi astronomi antara 7^o.33' - 8^o.12' Lintang Selatan dan 110^o.00' - 110^o.50' Bujur Timur. DIY adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan merupakan provinsi terkecil setelah DKI Jakarta, dengan luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). Secara administratif, Provinsi DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu:

- Kabupaten Kulon Progo 586,27 km² (18,40%)
- Kabupaten Bantul 506,85 km² (15,91%)
- Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² (46,62%)
- Kabupaten Sleman 574,82 km² (18,04%)
- Kota Yogyakarta 32,50 km² (1,02%)

Wilayah terluas Provinsi DIY adalah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta.

Gambar II.2.1.2
Persentase Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY



Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Berbeda dengan provinsi lain yang banyak mengalami pemekaran sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa di Provinsi DIY tidak mengalami perubahan. Wilayah Provinsi DIY terbagi menjadi 78 kecamatan dan 438 kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, dengan rincian:

- Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa
- Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa
- Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa
- Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa
- Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa

Provinsi DIY tidak memiliki kawasan pedalaman dan kawasan yang terpencil, juga ditengarai tidak ada desa yang berada di wilayah lembah atau daerah aliran sungai. Pada wilayah pesisir terdapat 33 desa yang berada di sepanjang wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul sampai dengan Gunungkidul. Pada wilayah daratan yang datar terdapat 305 desa atau sebanyak 69,63% dari seluruh desa di Provinsi DIY. Sementara, pada wilayah lereng/punggung bukit terdapat 100 desa yang tersebar sebanyak 22 desa di Kabupaten Kulon Progo, 11 desa di Kabupaten Bantul, 56 desa di Kabupaten Gunungkidul, dan 11 desa di Kabupaten Sleman.

Tabel II.2.1.1
Jumlah Desa menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis
di Provinsi DIY, 2010

Kabupaten/Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/Daerah Aliran Sungai	Lereng/Punggung Bukit	Dataran	
Kulon Progo	10	-	22	56	88
Bantul	5	-	11	59	75
Gunungkidul	18	-	56	70	144
Sleman	-	-	11	75	86
Yogyakarta	-	-	-	45	45
Provinsi DIY	33	0	100	305	438

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Hasil rapat verifikasi dari Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2007 di Yogyakarta telah dihasilkan daftar pulau di wilayah Provinsi DIY yaitu sebanyak 28 pulau, yang semuanya masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada 5 kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.

Tabel II.2.1.2
Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoarjo	Watulawang
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog Jungwok Watutopi Ngusalan
		Tileng	Kalong Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gungunggandul Godeg Baron Layar Krokoh

Sumber : Dirjen Pemerintahan Umum (Depdagri)

Wilayah DIY yang terletak pada ketinggian antara 100–499 m dari permukaan laut tercatat sebanyak 65,65%, pada ketinggian kurang dari 100 m sebanyak 28,84%, pada ketinggian antara 500–999 m sebanyak 5,04%, dan pada ketinggian di atas 1000 m sebanyak 0,47%. Berdasarkan satuan fisiografis, DIY terdiri dari :

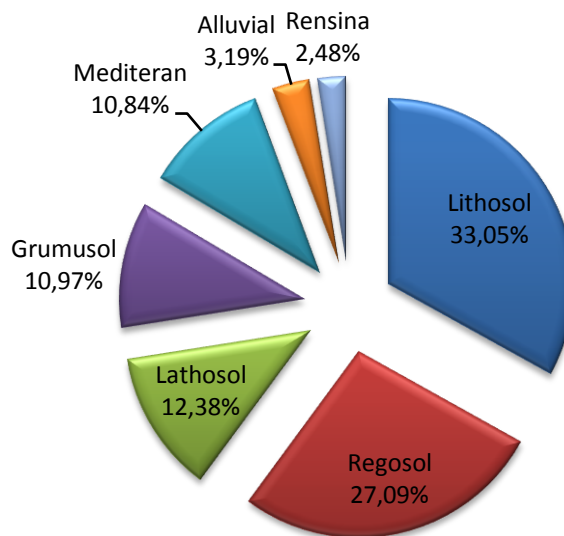
- Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan

bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;

- Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur.
- Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km^2 luas DIY, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% Regosol, 12,38% Lathosol, 10,97% Grumusol, 10,84% Mediteran, 3,19% Alluvial, dan 2,48% adalah tanah jenis Rensina.

Gambar II.2.1.3
Persentase Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di Provinsi DIY



Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

DIY beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2011 berkisar antara 17,5°C – 39,8°C. Kelembaban udara tercatat minimum 31% dan maksimum 97%, tekanan udara antara 986,4 – 1001,6 mb dengan arah angin antara 1 - 360 derajat dan kecepatan angin antara 0,0 - 18 knot. Curah hujan per hari tahun 2011 mencapai maksimum 1 mm dengan hari hujan per bulan sebanyak 29 kali.

Tabel II.2.1.3
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Arah Angin, Curah Hujan, dan Hari Hujan di Provinsi DIY 2011

Uraian	Satuan	Minimum	Maksimum
Suhu Udara	derajat C	17,5	39,8
Kelembaban Udara	Persen	31	97
Tekanan Udara	Mb	986,4	1001,6
Kecepatan Angin	Knot	0,0	18
Arah Angin	derajat	1	360
Curah Hujan per hari	Mm	0,0	1,0
Hari Hujan per bulan	Kali	0	29

Sumber: Stasiun Geofisika Klas I Yogyakarta, 2012

Penggunaan lahan di Provinsi DIY terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2010, lahan yang digunakan untuk pertanian tercatat seluas 226.140 ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 56.538 ha dan lahan bukan sawah seluas 169.602 ha. Sementara itu, lahan bukan pertanian seluas 92.440 ha yang terbagi menjadi lahan untuk pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, rawa-rawa, hutan negara, dan lainnya masing-masing seluas 50.446 ha, 8 ha, 16.908 ha, dan 25.078 ha. Pada tahun 2010 terlihat bahwa penggunaan lahan terluas adalah untuk penggunaan lahan pertanian bukan sawah (Tabel II.2.1.4).

Luas lahan pertanian untuk sawah terluas berada di Kabupaten Sleman yaitu 22.819 ha, diikuti Kabupaten Bantul 15.465 ha, Kabupaten Kulon Progo 10.304 ha, Kabupaten Gunungkidul 7.865 ha, dan terkecil di Kota Yogyakarta 85 ha, sedangkan lahan pertanian bukan sawah terluas berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 104.117 ha, diikuti Kabupaten Kulon Progo 35.027 ha, Kabupaten Sleman 16.643 ha, Kabupaten Bantul 13.628 ha, dan Kota Yogyakarta 187 ha. Sementara itu, luas lahan bukan pertanian di Kabupaten Gunungkidul seluas 36.554 ha, Kabupaten Bantul 21.592 ha, Kabupaten Sleman 18.020 ha, Kabupaten Kulon Progo 13.296 ha, dan Kota Yogyakarta 2.978 ha.

Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul penggunaan lahan terbesar untuk lahan pertanian bukan sawah dan terkecil untuk pertanian sawah. Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta penggunaan lahan terbesar sebagai lahan bukan pertanian, sedangkan penggunaan terkecil di Kabupaten Bantul sebagai lahan pertanian bukan sawah dan di Kota Yogyakarta sebagai lahan pertanian sawah. Sementara itu, Kabupaten Sleman

penggunaan lahan terluas sebagai lahan pertanian sawah dan terkecil sebagai lahan pertanian bukan sawah.

Tabel II.2.1.4
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi DIY 2010 (hektar)

Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian		Luas Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
Kulon Progo	10.304	35.027	13.296	58.627
Bantul	15.465	13.628	21.592	50.685
Gunungkidul	7.865	104.117	36.554	148.536
Sleman	22.819	16.643	18.020	57.482
Yogyakarta	85	187	2.978	3.250
Provinsi DIY	56.538	169.602	92.440	318.580

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Tabel II.2.1.5 menunjukkan perkembangan penggunaan lahan pertanian pada tahun 2008 sebesar 71,29% naik menjadi 71,48% tahun 2009, kemudian turun menjadi 70,98% tahun 2010, sedangkan luas lahan bukan pertanian tahun 2008 sebesar 28,70%, turun menjadi 28,53% tahun 2009, dan naik menjadi 29,01% tahun 2010. Penurunan dan peningkatan luas penggunaan lahan bukan pertanian pada tahun 2009 dan 2010 terjadi seiring dengan peningkatan dan penurunan luas penggunaan lahan pertanian pada tahun yang sama.

Tabel II.2.1.5
Luas Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian
di Provinsi DIY, 2008-2010

Penggunaan Lahan		2008	2009	2010	
		%		hektar	%
A	Lahan Pertanian	71,29	71,48	226.140	70,98
A.1	Lahan Sawah	17,92	17,80	56.538	17,75
	1. Berpengairan	15,04	14,91	47.426	14,89
	2. Tadah Hujan	2,88	2,89	9.112	2,86
	3. Lainnya	-	-	-	-
A.2	Bukan Sawah	53,37	53,69	169.602	53,25
	1. Tegal/Kebun	30,15	30,06	95.367	29,94
	2. Ladang/Huma	-	-	-	-
	3. Padang Rumput	-	-	-	-
	4. Tambak	0,02	0,02	59	0,02
	5. Kolam/Empang	0,21	0,22	719	0,23
	6. Lahan sementara tidak diusahakan	0,36	0,34	1.018	0,32
	7. Lahan ditanami kayu-kayuan	11,14	11,16	36.038	11,31
	8. Perkebunan	0,22	0,23	700	0,22
	9. Lainnya (pekarangan tanaman pertanian)	11,27	11,66	35.701	11,21
B	Lahan Bukan Pertanian	28,70	28,53	92.440	29,01
	1. Pekarangan/ Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	15,50	15,34	50.446	15,83
	2. Rawa-Rawa	-	-	8	-
	3. Hutan Negara	5,31	5,31	16.908	5,31
	4. Lainnya	7,89	7,88	25.078	7,87
	Jumlah	100	100	318.580	100

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY, kawasan budidaya di Provinsi DIY terdiri dari:

a. Kawasan Hutan Produksi

kebijakan pengembangan kawasan peruntukkan hutan produksi di Provinsi DIY diantaranya adalah

- 1). melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
- 2). mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;

- 3). mengoptimalkan produktifitas kawasan hutan produksi; d). mempertahankan fungsi kawasan hutan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi DIY diarahkan pada:

- 1). Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha
- 2). Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha

b. Kawasan Pertanian

kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah antara lain adalah:

- 1). melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- 2). mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

- 1). melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- 2). mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
- 3). mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering;
- 4). mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

Penetapan kawasan pertanian di Provinsi DIY diarahkan sebagai berikut:

- 1). Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
- 2). Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

c. Kawasan Pertambangan

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertambangan adalah memanfaatkan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan diarahkan sebagai berikut:

- 1). Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di:
 - kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana alam;
 - kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 2). Penetapan kawasan peruntukan pertambangan:
- Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong, Panggang, dan untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin
 - Kabupaten Kulon Progo yaitu:
 - a) Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangaan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih;
 - b) Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.
 - Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir.
- d. Kawasan Industri
- Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi a). mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b). mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran.
- Arahan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
- e. Kawasan Pariwisata
- Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata adalah memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam.
- Arahan penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi :
- 1). Kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
 - 2). Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
 - 3). Kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
- f. Kawasan Pendidikan Tinggi
- Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi meliputi a). Memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; b). Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi
- Arah penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagai berikut:
- 1). Kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;

- 2). kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
 - 3). kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
- g. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan pariwisata, pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut. Arahan penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DIY, yaitu:
- 1). kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul
 - 2). kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah DIY memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY, penetapan kawasan rawan bencana alam di Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.
- b. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
- c. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo.
Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
- d. Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo.
Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst.
- e. Kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota.
Bencana alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
- f. Kawasan rawan gempa bumi di Kabupten/Kota.

100 perempuan. Sex ratio menurut kabupaten/kota yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 94 dan tertinggi adalah Kabupaten Sleman sebesar 100.

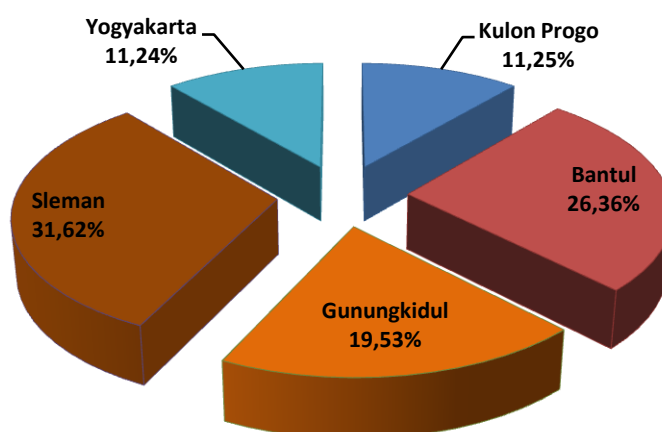
Tabel II.2.1.6
Jumlah Penduduk Provinsi DIY Hasil Sensus penduduk 2010
menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio (%)
Kulon Progo	190.694	198.175	388.869	96
Bantul	454.491	457.012	911.503	99
Gunungkidul	326.703	348.679	675.382	94
Sleman	547.885	545.225	1.093.110	100
Yogyakarta	189.137	199.490	388.627	95
Provinsi DIY	1.708.910	1.748.581	3.457.491	98

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Dilihat dari persebaran penduduk di Provinsi DIY pada tahun 2010, jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Sleman sebanyak 1,09 juta orang atau sebesar 31,62%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 911,50 ribu orang atau 26,36%, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 675,38 ribu orang atau 19,53%, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 388,87 ribu orang atau 11,25%. Sementara jumlah penduduk terendah berada di Kota Yogyakarta sebanyak 388,63 ribu orang atau 11,24%.

Gambar II.2.1.5
Persebaran Penduduk Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota, 2010



Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Menurut pembagian perkotaan dan perdesaan di Provinsi DIY, persentase penduduk perkotaan sebanyak 2.297.261 jiwa atau sebesar 66,44% dan penduduk perdesaan sebanyak 1.160.230 jiwa atau sebesar 33,56%. Penduduk Kabupaten Kulon Progo yang tinggal di perkotaan sebanyak 86.360 jiwa (22,21%) dan di perdesaan sebanyak 302.509

jiwa (77,79%). Penduduk Kabupaten Bantul berada di perkotaan sebanyak 761.396 (83,53%) dan di perdesaan sebanyak 150.107 jiwa (16,47%), sedangkan penduduk Kabupaten Gunungkidul sebagian besar tinggal di perdesaan yaitu sebanyak 62.678 jiwa (90,72%) dan tinggal di perkotaan hanya sebanyak 612.704 jiwa (9,28%). Sementara itu, penduduk Kabupaten Sleman yang berada di perkotaan sebanyak 998.200 jiwa (91,32%) dan tinggal di perdesaan sebanyak 94.910 jiwa (8,68%).

Tabel II.2.1.7
Jumlah Penduduk Tahun 2010 menurut Perkotaan/Perdesaan di Provinsi DIY

Kabupaten/Kota	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Jiwa	%	Jiwa	%	jiwa	%
Kulon Progo	86.360	22,21	302.509	77,79	388.869	11,25
Bantul	761.396	83,53	150.107	16,47	911.503	26,36
Gunung Kidul	62.678	9,28	612.704	90,72	675.382	19,53
Sleman	998.200	91,32	94.910	8,68	1.093.110	31,62
Kota Yogyakarta	388.627	100,00	0	0,00	388.627	11,24
Provinsi DIY	2.297.261		1.160.230		3.457.491	

Sumber: Sensus Penduduk (SP) 2010, BPS

Pada tahun 2011 kelompok umur 0-24 tahun tercatat 33,42%, kelompok umur 25-59 tahun sebesar 53,43%, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,15%. Besarnya proporsi penduduk berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Komposisi kelompok umur penduduk DIY tahun 2011 didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 25-29 tahun sebanyak 366,1 ribu orang atau sebesar 10,78%. Sementara itu, tahun 2012 dan 2013 penduduk DIY didominasi oleh kelompok usia 30-34 tahun, yaitu sebanyak 362,20 ribu orang tahun 2012 dan 369 ribu orang tahun 2013.

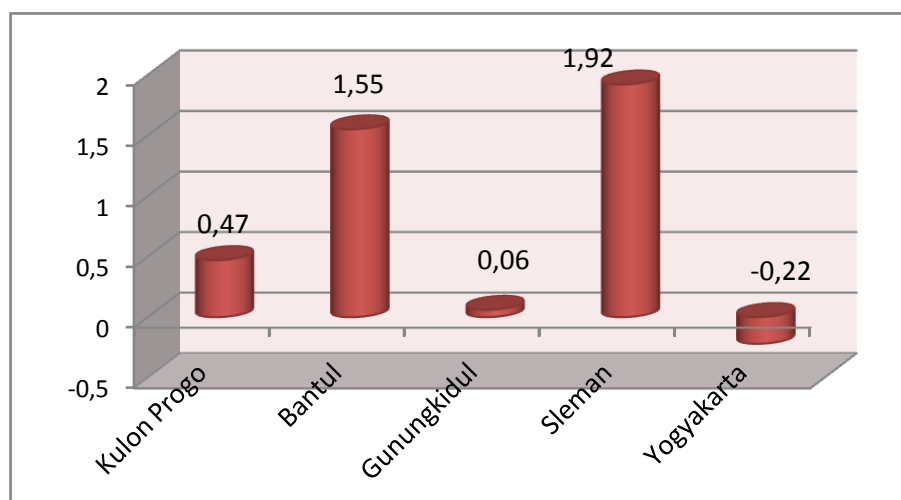
Tabel II.2.1.8
Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi SP 2010
Menurut Kelompok Umur di Provinsi DIY (x1000), 2011-2013

Kelompok Umur	2011	2012	2013
0-4	211,50	213,10	214,80
4-9	202,40	205,10	207,90
10-14	194,60	196,90	199,40
15-19	241,80	234,40	224,90
20-24	301,00	295,10	289,30
25-29	366,10	354,00	343,20
30-34	353,60	362,20	369,00
34-39	276,90	291,10	307,50
40-44	246,40	248,50	250,70
45-49	235,00	237,10	238,40
50-54	208,90	214,00	219,20
55-59	169,60	176,70	183,00
60-64	131,10	136,20	141,40
65-69	108,80	108,90	111,00
70-74	94,80	94,80	94,90
75+	124,70	128,00	130,70
Jumlah	3.467,20	3.496,10	3.525,30

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi DIY pada tahun 2010 sebesar 1,02%. Kabupaten Bantul dan Sleman memiliki angka pertumbuhan di atas angka provinsi masing-masing sebesar 1,55% dan 1,92%. Sementara angka pertumbuhan terendah berada di Kota Yogyakarta sebesar -0,22%.

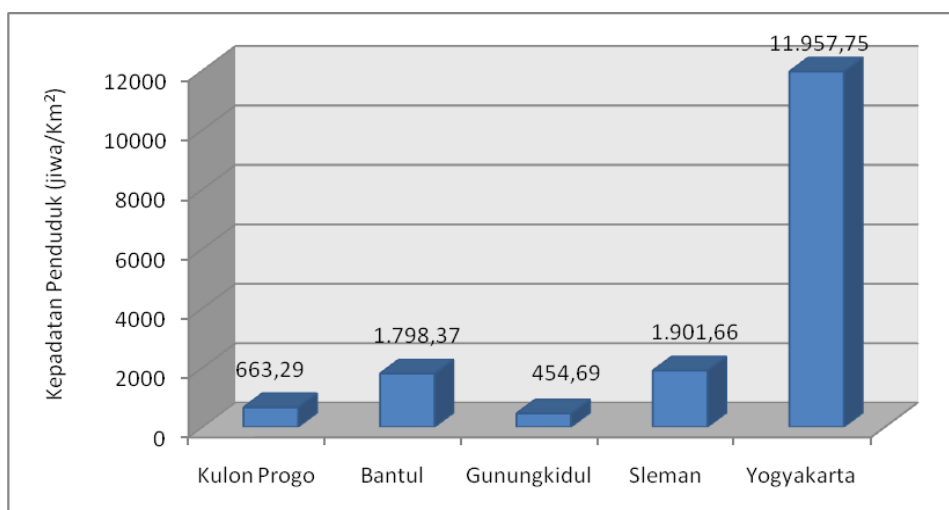
Gambar II.2.1.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota, 2010



Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di Provinsi DIY tercatat 1.085 jiwa per km². Kota Yogyakarta yang mempunyai luas wilayah terkecil (1,02%) memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 11.958 jiwa per km², sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas (46,63%) memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 455 jiwa per km².

Gambar II.2.1.7
Kepadatan Penduduk Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota, 2010



Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk DIY umur 15 tahun ke atas menurut kegiatan pada Agustus 2010 adalah 69,76% merupakan angkatan kerja (65,79% bekerja dan 3,97% pengangguran), sedangkan sisanya sebesar 30,24% merupakan bukan

angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 10,36%, 16,22%, dan 3,66%).

Sementara pada Agustus 2011, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 1,87 juta orang atau sebesar 68,77% dari total penduduk Provinsi DIY berumur 15 tahun ke atas (66,04% bekerja dan 2,73% pengangguran). Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja pada periode yang sama sebanyak 850,72 ribu orang atau sebesar 31,23% (sekolah 10,36%, mengurus rumah tangga 15,77%, dan lainnya 5,10%).

Tabel II.2.1.9
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan di Provinsi DIY

Kegiatan	2009 (Agustus)		2010 (Agustus)		2011 (Agustus)	
	orang	%	orang	%	orang	%
Angkatan Kerja	2.016.694	70,23	1.882.296	69,76	1.872.912	68,77
1. Bekerja	1.895.648	66,01	1.775.148	65,79	1.798.595	66,04
2. Pengangguran	121.046	4,22	107.148	3,97	74.317	2,73
Bukan Angkatan Kerja	855.025	29,77	815.838	30,24	850.717	31,23
1. Sekolah	308.401	10,74	279.420	10,36	282.226	10,36
2. Mengurus Rumah Tangga	461.014	16,05	437.630	16,22	429.555	15,77
3. Lainnya	85.610	2,98	98.788	3,66	138.936	5,10
Jumlah	2.871.719	100,00	2.698.134	100,00	2.723.629	100,00

Sumber: DIY Dalam Angka, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY

Sementara berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 23,97%, perdagangan 26,70%, jasa 19,60%, industri 14,83% dan sisanya 14,91% di sektor-sektor lainnya.

Tabel II.2.1.10
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011

Lapangan Pekerjaan Utama	Penduduk Provinsi DIY	
	Jumlah	%
Pertanian	431.070	23,97
Industri Pengolahan	266.768	14,83
Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah Makan	480.136	26,70
Jasa-jasa	352.519	19,60
Lainnya	268.102	14,91
Jumlah	1.798.595	100,00

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah pencari kerja pada tahun 2010 sebanyak 129.793 orang turun sekitar 4,00% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 135.207 orang. Mereka terdiri dari 53,87% laki-laki dan 46,13% perempuan. Dari jumlah tersebut 40,09% berpendidikan SLTA, 13,83% Diploma I-III, 42,44% Diploma IV-S1, serta 0,91% S2-S3, 2,32% adalah SLTP dan sisanya 0,34% berpendidikan SD. Persentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan penempatan masing-masing adalah 18,06% dan 13,82% dari total pencari kerja.

Jumlah transmigran dari Provinsi DIY pada tahun 2010 tercatat sebanyak 250 KK atau sebanyak 824 jiwa. Jumlah KK transmigran terbanyak berasal dari Kabupaten Kulon Progo yaitu 68 KK dan terkecil dari Kota Yogyakarta 25 KK. Daerah penempatan terbanyak adalah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 241 KK/jiwa, diikuti Kalimantan Barat 172 KK/jiwa, sedangkan penempatan terkecil di Bengkulu sebanyak 78 KK/jiwa.

Tabel II.2.1.11
Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi menurut Daerah Asal
di Provinsi DIY, 2010

Kabupaten/Kota	Kepala Keluarga (KK)	Jiwa
Kulon Progo	68	237
Bantul	55	181
Gunungkidul	57	168
Sleman	45	154
Yogyakarta	25	84
Jumlah	250	824

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY – Disnakertrans Provinsi DIY

Jumlah PNS di seluruh Provinsi DIY tahun 2010 sebanyak 97.252 orang dengan komposisi PNS laki-laki sebanyak 51.875 orang atau 53,34% dan perempuan sebanyak 45.377 orang atau 46,66%. Komposisi PNS menurut wilayah tugas terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu 29.075 orang, diikuti Kota Yogyakarta sebanyak 18.585 orang, Bantul 15.411 orang, Gunungkidul 13.981 orang, dan Kulon Progo 10.694 orang. Sementara PNS yang bertugas di Provinsi sebanyak 9.506 orang.

Tabel II.2.1.12
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin
di Provinsi DIY, 2010

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kulon Progo	5.617	5.077	10.694
Bantul	7.778	7.633	15.411
Gunungkidul	8.306	5.675	13.981
Sleman	13.918	15.157	29.075
Yogyakarta	10.321	8.264	18.585
Provinsi DIY	5.935	3.571	9.506
Jumlah	51.875	45.377	97.252

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY – BKN Provinsi DIY

Data pendidikan Provinsi DIY pada tahun 2010 tercatat jumlah jenjang TK hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5.178 unit sekolah atau meningkat 2,07% dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat 5.073 sekolah. Jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2010 memiliki 1.858 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 294.224 anak dan diasuh oleh 22.141 guru. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SMP tercatat sebanyak 421 sekolah dengan 127.214 anak didik yang diasuh oleh 10.798 orang guru. Pada Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 5.624 orang guru yang mengajar 81.315 siswa yang tersebar pada 165 sekolah. Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 195 unit sekolah dengan 77.077 siswa yang diajar oleh 8.067 orang guru. Jumlah murid putus sekolah tercatat 1.425 anak atau mengalami peningkatan 1,01 % dibandingkan tahun 2009. Pada jenjang PTN periode 2010/2011, Provinsi DIY memiliki 10 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 78.992 orang dengan jumlah dosen tetap sebanyak 4.545 orang.

Tabel II.2.1.13
Jumlah Mahasiswa dan Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
di Provinsi DIY, 2010/2011

Nama Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Dosen
1. Universitas Gadjah Mada	27.891	2.213
2. Universitas Negeri Yogyakarta	32.237	1.050
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	11.760	516
4. Institut Seni Indonesia	3.424	329
5. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	699	48
6. Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta	552	44
7. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Nasional	74	99
8. Sekolah Tinggi Multimedia MMTc	548	68
9. Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian	68	26
10. Politeknik Kesehatan	1.739	152
Total	78.992	4.545

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Adapun jumlah PTS di Provinsi DIY pada periode 2010/2011 tercatat sebanyak 112 institusi dengan rincian 38,39% akademi; 34,82% sekolah tinggi; 16,07% universitas; 7,14% politeknik; dan 3,57% institut. Sementara jumlah mahasiswa di PTS tercatat sebanyak 154.222 orang yang diasuh oleh 6.102 orang dosen.

Tabel II.2.1.14
Jumlah Perguruan Tinggi (PT), Mahasiswa, dan Dosen
menurut Jenis Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi DIY, 2010/2011

Jenis PT	Jumlah PT		Mahasiswa	Dosen
	Institusi	%		
Universitas	18	16,07	100.084	3.596
Institut	4	3,57	8.453	284
Sekolah Tinggi	39	34,82	34.940	1.460
Akademi	43	38,39	8.909	625
Politeknik	8	7,14	1.836	137
Total	112	100	154.222	6.102

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DIY

A.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000

Nilai PDRB Provinsi DIY ADHK pada tahun 2011 mencapai 22.129,71 milyar rupiah lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 21.044,04 milyar rupiah. Pertumbuhan nilai PDRB tahun 2011 tersebut berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20,84%, sektor jasa-jasa sebesar 17,25%, sektor pertanian sebesar 16,07%, sektor industri pengolahan sebesar 13,48%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,98%, sektor konstruksi sebesar 9,89%, dan sektor lainnya adalah sektor Keuangan, sewa, & jasa perusahaan, Listrik, Gas & Air bersih, serta Pertambangan & Penggalian masing-masing sebesar 9,87%, 0,91%, dan 0,71%.

Selama kurun waktu dari tahun 2008 sampai 2011, hampir semua sektor kontribusi terhadap PDRB mengalami kenaikan, kecuali sektor pertanian yang turun dari tahun 2008 sebesar 18,34% menjadi 16,07% pada tahun 2011 dan sektor pertambangan dan penggalian turun dari tahun 2008 sebesar 0,72% menjadi 0,71% pada tahun 2011.

Tabel II.2.1.15
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK Tahun Dasar 2000
 Provinsi DIY (milyar rupiah), 2008-2011

NO	Sektor	2008		2009		2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	3.523,94	18,34	3.642,70	18,16	3.632,68	17,26	3.555,80	16,07
2	Pertambangan & Penggalian	138,33	0,72	138,75	0,69	139,97	0,67	156,71	0,71
3	Industri Pengolahan	2.562,55	13,34	2.610,76	13,01	2.793,58	13,27	2.983,17	13,48
4	Listrik, Gas & Air bersih	174,93	0,91	185,60	0,93	193,03	0,92	201,24	0,91
5	Konstruksi	1.838,43	9,57	1.923,72	9,59	2.040,31	9,70	2.187,80	9,89
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	3.947,66	20,55	4.162,12	20,74	4.383,85	20,83	4.611,40	20,84
7	Pengangkutan & Komunikasi	2.008,92	10,46	2.128,59	10,61	2.250,66	10,70	2.430,70	10,98
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	1.793,79	9,34	1.903,41	9,49	2.024,37	9,62	2.185,22	9,87
9	Jasa-jasa	3.223,93	16,78	3.368,61	16,79	3.585,60	17,04	3.817,67	17,25
	PDRB	19.212,48	100	20.064,26	100	21.044,04	100	22.129,71	100

Sumber: BPS Provinsi DIY

Pada tahun 2012 nilai PDRB Provinsi DIY menurut lapangan usaha ADHK diperkirakan mencapai kisaran 23.243,29 milyar rupiah hingga 23.354,02 milyar rupiah, sedangkan tahun 2013 diperkirakan berkisar antara 24.428,70 milyar rupiah hingga 24.591,78 milyar rupiah.

Tabel II.2.1.16
 Proyeksi Nilai PDRB Provinsi DIY
 Berdasarkan Lapangan Usaha ADHK 2000 (milyar rupiah), 2012-2013

No	Lapangan Usaha	2012		2013	
		2012m	2012o	2013m	2013o
1	Pertanian	3.904,87	3.923,46	3.979,44	4.006,00
2	Pertambangan & Penggalian	146.433	147.130	153.901	154.928
3	Industri Pengolahan	3.109,95	3.124,77	3.075,57	3.096,12
4	Listrik, Gas & Air Bersih	202.217	203.187	227.187	228.704
5	Bangunan	2.266,22	2.277,02	2.545,47	2.562,46
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4.850,88	4.873,98	5.142,24	5.176,57
7	Pengangkutan & Komunikasi	2.496,33	2.508,22	2.687,16	2.705,10
8	Keu, Persewaan & Jasa Prushn	2.291,79	2.302,71	2.450,20	2.466,56
9	Jasa-jasa	3.974,60	3.993,54	4.167,54	4.195,36
	PDRB	23.243,29	23.354,02	24.428,70	24.591,78

Keterangan: "m" = moderat dan "o" = optimis

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY 2011

Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2012 dan 2013 kontribusi terbesar dalam PDRB berasal dari sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran masing-masing sebesar 20,87% dan 20,95%. Sementara, kontribusi terendah berasal dari sektor pertambangan dan penggalan, yaitu diperkirakan sebesar 0,63%.

Tabel II.2.1.17
Proyeksi Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK Tahun Dasar 2000 (%)
Provinsi DIY, 2012-2013

No	Lapangan Usaha	Kontribusi terhadap PDRB	
		2012	2013
1	Pertanian	16,80	16,47
2	Pertambangan & Penggalan	0,63	0,63
3	Industri Pengolahan	13,38	13,01
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,87	0,88
5	Bangunan	9,75	9,90
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	20,87	20,95
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,74	11,00
8	Keu, Persewaan & Jasa Prushn	9,86	10,00
9	Jasa-jasa	17,10	17,16
	PDRB	100,00	100,00

Keterangan: "m" = moderat dan "o" = optimis

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY 2011

A.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Nilai PDRB Provinsi DIY tahun 2011 ADHB mencapai 51.782,09 milyar rupiah naik dari tahun 2010 yang sebesar 45.625,59 milyar rupiah.

Selama periode 2008 sampai 2011 struktur perekonomian DIY didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu jasa-jasa, perdagangan hotel dan restoran, Pertanian, dan industri pengolahan. Porsi sektor jasa-jasa, perdagangan hotel dan restoran, serta industri pengolahan cenderung meningkat setiap tahun sedangkan sektor pertanian cenderung menurun. Penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai akibat menurunnya luas lahan pertanian dan kenaikan harga biaya produksi pertanian.

Kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan dari 13,29% di tahun 2008 menjadi 14,36% pada tahun 2011. Kontribusi sektor konstruksi pada tahun 2009 relatif tidak bergerak dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu 10,70%, sedangkan pada tahun 2010 kontribusi sektor ini mengalami penurunan menjadi 10,59% dan meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 10,78%.

Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran selama kurun waktu 2008 sampai 2011 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 kontribusi sektor ini sebesar 19,72% meningkat menjadi 19,74% pada tahun 2010 dan 19,79% pada tahun 2011. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor jasa-jasa dalam perekonomian DIY.

Pada tahun 2009, kontribusi sektor jasa-jasa yang merupakan sektor paling dominan di Provinsi DIY tergeser oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Namun pada tahun 2010 dan 2011, kontribusi sektor jasa-jasa kembali mendominasi dengan kontribusi mencapai 20,07% pada tahun 2010 dan 20,05% pada tahun 2011.

Tabel II.2.1.18
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB
Provinsi DIY (milyar rupiah), 2008-2011

No	Sektor	2008		2009		2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	5.993,78	15,73	6.366,77	15,38	6.644,70	14,56	7.370,79	14,23
2	Pertambangan & Penggalian	280,11	0,74	293,98	0,71	304,66	0,67	361,79	0,70
3	Industri Pengolahan	5.062,28	13,29	5.528,86	13,35	6.396,64	14,02	7.434,02	14,36
4	Listrik, Gas, & Air bersih	488,33	1,28	560,32	1,35	607,07	1,33	675,91	1,31
5	Konstruksi	4.075,61	10,70	4.431,41	10,70	4.833,42	10,59	5.580,60	10,78
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	7.321,30	19,22	8.165,61	19,72	9.008,18	19,74	10.246,58	19,79
7	Pengangkutan & Komunikasi	3.739,70	9,82	3.809,09	9,20	4.119,97	9,03	4.572,93	8,83
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	3.724,29	9,77	4.090,68	9,88	4.552,67	9,98	5.158,23	9,96
9	Jasa-jasa	7.416,30	19,46	8.160,33	19,71	9.158,28	20,07	10.381,24	20,05
	PDRB	38.101,68	100	41.407,05	100	45.625,59	100	51.782,09	100

Sumber: BPS Provinsi DIY

Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan antar daerah. Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar secara relatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, sedangkan Kulon Progo merupakan kabupaten dengan nilai PDRB terkecil.

Tabel II.2.1.19
 Nilai PDRB ADHB menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi DIY (juta rupiah), 2006-2010

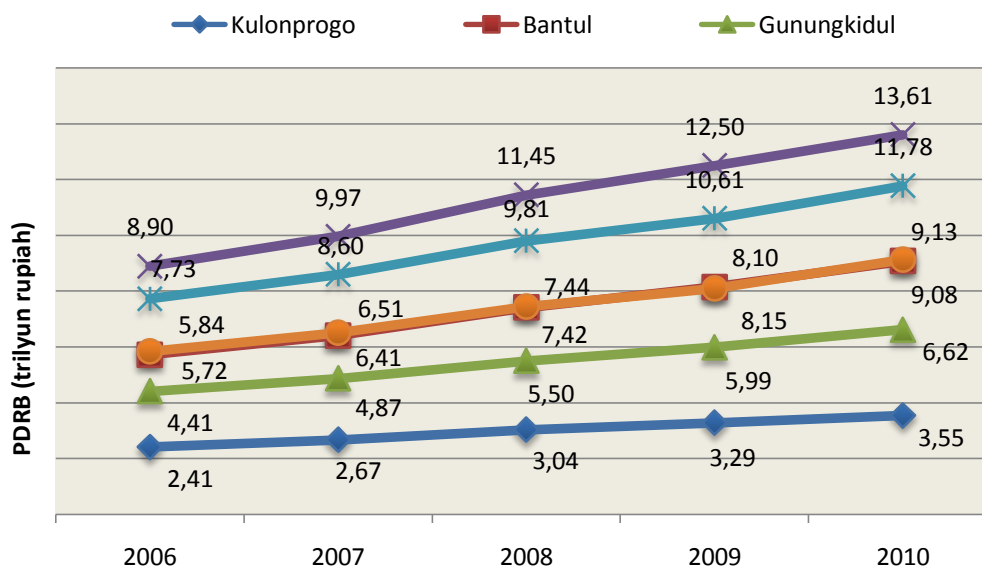
Kabupaten/Kota/ Provinsi	2006	2007	2008	2009*	2010**
Kulon Progo	2.414.960	2.672.862	3.038.165	3.286.278	3.547.056
Bantul	5.722.466	6.409.648	7.417.980	8.147.860	9.076.401
Gunungkidul	4.412.844	4.872.123	5.502.208	5.987.783	6.624.572
Sleman	8.898.867	9.972.193	11.446.071	12.503.760	13.611.725
Kota Yogyakarta	7.732.639	8.599.468	9.806.813	10.607.237	11.777.579
DIY	29.417.349	32.916.736	38.101.684	41.407.049	45.625.589

Sumber: BPS Provinsi DIY

Ket: *angka sementara; **angka sangat sementara

Dari Gambar di bawah terlihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun, kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta melampaui rata-rata Provinsi DIY. Angka rata-rata Provinsi DIY diperoleh dari jumlah PDRB kabupaten/kota se-Provinsi DIY dibagi dengan jumlah kabupaten/kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua wilayah merupakan penopang perekonomian Provinsi DIY. Sementara itu, kinerja ekonomi Kabupaten Bantul hampir sama dengan rata-rata Provinsi DIY, sedangkan kinerja ekonomi Kabupaten Gunungkidul maupun Kabupaten Kulon Progo masih di bawah rata-rata Provinsi DIY.

Gambar II.2.1.8
 Nilai PDRB ADHB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2006-2010



Sumber: BPS Provinsi DIY

Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta

ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah Provinsi DIY, pada tahun 2010 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih ditopang oleh sektor pertanian, sedangkan lahan pertanian di daerah tersebut relatif tandus dengan produktivitas rendah. Sementara itu, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah terkecil mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar (urutan kedua setelah Kabupaten Sleman). Sebagai ibu kota Provinsi DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih memadai, sehingga terdapat banyak aktivitas ekonomi di setiap sektor.

Tabel di bawah menyajikan perbandingan PDRB antar kabupaten/kota menurut lapangan usaha pada kondisi tahun 2010. Dari Tabel tersebut diketahui keunggulan masing-masing daerah menurut sektor kegiatan ekonomi. Kabupaten Gunungkidul lebih dominan di sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Sleman lebih unggul di sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sementara itu, Kota Yogyakarta lebih unggul di sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Tabel II.2.1.20
Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di Provinsi DIY
ADHB Tahun 2010 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
Pertanian	821.569	1.834.746	2.311.480	1.771.743	32.440
Pertambangan & Penggalan	24.835	85.446	117.970	73.245	566
Industri Pengolahan	550.513	1.750.151	643.563	1.927.170	1.205.980
Listrik, Gas, & Air Bersih	31.366	108.148	62.761	174.868	215.193
Konstruksi	209.221	1.104.073	611.964	1.744.700	948.797
Perdagangan, Hotel & Restoran	587.485	1.602.662	972.726	3.097.398	2.777.716
Pengangkutan & Komunikasi	359.493	623.940	421.370	780.674	1.886.358
Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	225.679	615.172	338.321	1.482.757	1.802.227
Jasa - jasa	736.894	1.352.064	1.144.419	2.559.171	2.908.302
PDRB	3.547.056	9.076.401	6.624.572	13.611.725	11.777.579

Sumber: BPS Provinsi DIY

Tabel di bawah menyajikan kontribusi sektor-sektor dominan menurut kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2010. Kabupaten Kulon Progo kontribusi PDRB terbesar berasal dari sektor pertanian, jasa-jasa, dan perdagangan. Kabupaten Bantul kontribusi terbesar dari sektor pertanian diikuti kontribusi sektor industri dan perdagangan. Kabupaten

Gunungkidul kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, jasa-jasa, dan perdagangan. Sementara itu, Kabupaten Sleman berasal dari sektor perdagangan, jasa-jasa, dan industri, sedangkan Kota Yogyakarta kontribusi terbesar berasal dari sektor jasa-jasa, perdagangan, dan disusul sektor pengangkutan.

Tabel II.2.1.21
Kontribusi Sektor-Sektor Dominan menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi DIY (%), 2006-2010

Kabupaten/kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2006	2008	2010**
Kulon Progo	1. Pertanian	23,26	24,01	23,16
	2. Jasa-jasa	20,81	20,33	20,77
	3. Perdagangan	16,24	16,25	16,56
Bantul	1. Pertanian	21,47	21,4	20,21
	2. Industri	19,47	18,75	19,28
	3. Perdagangan	17,03	17,38	17,66
Gunungkidul	1. Pertanian	35,54	35,07	34,89
	2. Jasa-jasa	17,37	17,3	17,28
	3. Perdagangan	13,95	14,62	14,68
Sleman	1. Perdagangan	21,73	22,12	22,76
	2. Jasa-jasa	19,08	18,51	18,8
	3. Industri	15,46	14,33	14,16
Yogyakarta	1. Jasa-jasa	24,83	24,28	24,69
	2. Perdagangan	22,19	22,49	23,58
	3. Pengangkutan	18,02	17,17	16,02

Sumber: BPS Provinsi DIY

Tabel di bawah memperlihatkan nilai PDRB per kapita menurut kabupaten/kota di Provinsi DIY. Dengan membandingkan nilai PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi DIY, terlihat bahwa terjadi kesenjangan antar daerah. Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir menjadi wilayah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi. Selama tahun 2010, secara nominal rata-rata pendapatan penduduk Kota Yogyakarta mencapai 30,31 juta rupiah, tiga kali pendapatan yang diterima oleh penduduk di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, yang masing-masing hanya sebesar 9,12 juta rupiah, 9,96 juta rupiah, dan 9,81 juta rupiah.

Tabel II.2.1.22
 Nilai PDRB per Kapita ADHB menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi DIY (rupiah), 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009*	2010**
Kulon Progo	6.310.964	6.954.674	7.872.179	8.480.871	9.121.467
Bantul	6.656.127	7.343.221	8.371.861	9.060.104	9.957.620
Gunungkidul	6.536.191	7.214.123	8.145.736	8.864.564	9.808.630
Sleman	8.762.859	9.634.671	10.851.917	11.634.944	12.452.292
Yogyakarta	19.685.996	21.947.440	25.095.291	27.220.030	30.305.612
Provinsi D I Y	8.845.062	9.798.386	11.229.487	12.083.874	13.196.156

Sumber: BPS Provinsi DIY

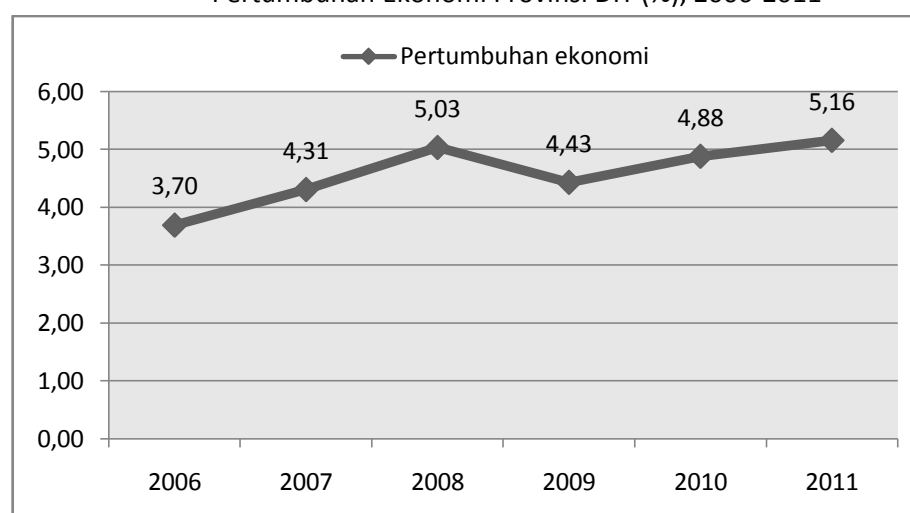
B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara sektoral, spasial (wilayah kabupaten/kota), dan penggunaan nilai tambah, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, kabupaten/kota, atau komponen penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY.

B.1 Pertumbuhan menurut Sektor

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY pada tahun 2010 mencapai 4,88%, naik 0,45 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,43%. Kemudian pada tahun 2011, perekonomian Provinsi DIY kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian DIY semakin membaik.

Gambar II.2.1.9
 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY (%), 2006-2011



Sumber: BPS Provinsi DIY

Apabila dilihat pertumbuhan PDRB pada tahun 2011 terhadap tahun sebelumnya beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan adalah: sektor jasa-jasa; sektor konstruksi; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. Bahkan sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 2,12% pada tahun 2011.

Pertumbuhan tertinggi tahun 2011 di sektor pertambangan dan penggalian 11,96% dan terendah di sektor pertanian -2,12%. Sumber utama pertumbuhan dari sektor jasa-jasa; diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel II.2.1.23
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY menurut Lapangan Usaha (%)
2008-2011

Sektor	2008	2009	2010*	2011**
Pertanian	5,72	3,37	-0,27	-2,12
Pertambangan & Penggalian	-0,02	0,30	0,88	11,96
Industri Pengolahan	1,37	1,88	7,00	6,79
Listrik, Gas & Air Bersih	5,53	6,10	4,00	4,26
Konstruksi	6,09	4,64	6,06	7,23
Perdagangan, Hotel, & Restoran	5,26	5,43	5,33	5,19
Pengangkutan & Komunikasi	7,12	5,96	5,73	8,00
Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	5,82	6,11	6,35	7,95
Jasa-jasa	4,94	4,49	6,44	6,47
PDRB	5,03	4,43	4,88	5,16

Sumber: BPS Provinsi DIY

Ket: *angka sementara; **angka sangat sementara

Berdasarkan hasil proyeksi, pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY diperkirakan berkisar antara 5,2 - 5,4%, sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan berkisar antara 5,1 -5,3%. Perekonomian pada tahun 2013 diperkirakan mengalami perlambatan sebagai dampak krisis global dan stabilitas sosial politik di Indonesia.

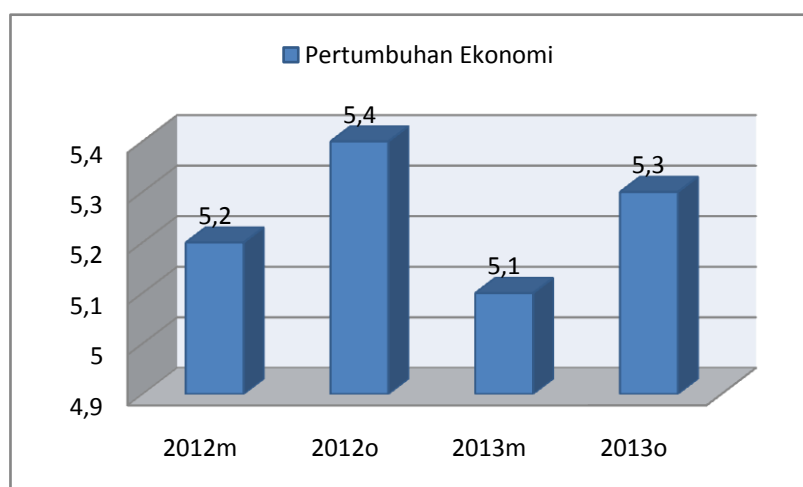
Tabel II.2.1.24
Proyeksi Pertumbuhan PDRB menurut Sektor ADHK (%)
Provinsi DIY 2012-2013

No	Lapangan Usaha	2012		2013	
		M	o	m	O
1	Pertanian	3,96	4,16	3,04	3,23
2	Pertambangan & Penggalian	1,96	2,16	5,10	5,30
3	Industri Pengolahan	5,75	5,95	2,19	2,39
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1,69	1,89	6,31	6,51
5	Bangunan	5,20	5,40	6,72	6,92
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,45	5,65	5,50	5,70
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,59	5,79	7,64	7,85
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,84	6,05	6,59	6,80
9	Jasa-jasa	5,38	5,59	5,47	5,67
	PDRB	5,20	5,40	5,10	5,30

Ket: "m" = moderat dan "o" = optimis

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY 2011

Gambar II.2.1.10
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY, 2012-2013



Ket: "m" = moderat dan "o" = optimis

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY 2011

B.2 Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota

Jika diamati menurut kabupaten/kota di Provinsi DIY, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi paling pesat terjadi di Kota Yogyakarta, yakni mencapai 4,98%. Dalam periode 2006-2010, rata-rata pertumbuhan per tahun Kota Yogyakarta tertinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan per tahun kabupaten lain di Provinsi DIY, yaitu sebesar 4,75%. Namun andil yang diberikan Kota Yogyakarta terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2010 hanya mencapai 1,4%, lebih rendah dibandingkan andil yang diberikan oleh pertumbuhan di Kabupaten Sleman (1,47%). Hal ini menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 4,88% disumbang oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebesar 2,87%.

Selain Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul juga memberikan andil terhadap pertumbuhan Provinsi DIY tahun 2010 lebih dari 1%, di mana laju pertumbuhan rata-rata dalam periode 2006-2010 mencapai 4,72% per tahun. Kinerja ekonomi Kabupaten Bantul yang semakin meningkat diharapkan mampu mengurangi “kesenjangan ekonomi” antar wilayah di Provinsi DIY.

Tabel II.2.1.25
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun,
dan Andil Pertumbuhan di Provinsi DIY (%)

Kabupaten/Kota	2008	2009*	2010**	Rata-rata	Andil Pertumbuhan 2010
				2006-2010	
Kulon Progo	4,71	3,97	3,06	3,96	0,28
Bantul	4,9	4,47	4,97	4,72	1,01
Gunungkidul	4,39	4,14	4,15	4,15	0,71
Sleman	5,13	4,48	4,49	4,67	1,47
Yogyakarta	5,12	4,46	4,98	4,75	1,4
Provinsi D I Y	5,03	4,43	4,88	4,66	4,88

Sumber: BPS Provinsi DIY

Ket: *angka sementara; **angka sangat sementara

B.3 Pertumbuhan menurut Penggunaan

Berdasarkan penggunaan nilai tambah yang dihasilkan di Provinsi DIY, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 dicapai oleh komponen konsumsi lembaga nirlaba (*non-profit institution*) mencapai 16,22%. Komponen lain yang tumbuh cukup tinggi adalah komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 7,28%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada komponen konsumsi pemerintah, yaitu sebesar 2,82%.

Demikian pula, secara rata-rata dalam periode 2006-2010, komponen konsumsi lembaga nirlaba menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, yakni sebesar 17,7% per tahun. Kemudian diikuti oleh komponen konsumsi pemerintah dan komponen konsumsi rumah tangga, yakni masing-masing mencapai 6,39% dan 5,56% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekspor barang dan jasa dan rata-rata pertumbuhan impor, yaitu masing-masing sebesar 5,13% dan 4,75% per tahun.

Andil penggunaan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY pada tahun 2010 pada komponen konsumsi rumah tangga yakni mencapai 3,34%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang diciptakan di Provinsi DIY masih banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Pada posisi berikutnya, komponen ekspor barang dan jasa juga memberikan andil yang cukup besar, yakni mencapai 2,69%, seiring dengan semakin membaiknya perekonomian global. Andil yang diberikan oleh komponen impor barang dan jasa yang cukup besar (2,05%) menunjukkan bahwa

sebagian besar kebutuhan penduduk masih dipasok dari luar negeri atau luar daerah. Berarti Provinsi DIY masih tergantung pada negara atau daerah lain.

Tabel II.2.1.26
Pertumbuhan Ekonomi menurut Penggunaan, Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun,
dan Andil Pertumbuhan di Provinsi DIY (%)

Komponen Penggunaan	2008	2009*	2010**	Rata-rata	Andil Pertumbuhan 2010
				2006-2010	
Konsumsi Rumah Tangga	6,11	6,75	7,28	5,56	3,34
Konsumsi Lembaga Nirlaba	18,61	19,4	16,22	17,7	0,39
Konsumsi Pemerintah	7,74	7,55	2,82	6,39	0,58
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4,27	3,21	3,41	3,41	0,91
Perubahan Inventori*)	-9,36	-18,34	-18,54	-9,1	-0,99
Ekspor Barang & Jasa	6,02	3,14	6,43	5,13	2,69
Impor Barang & Jasa	5,79	3,38	4,78	4,75	2,05
PDRB	5,03	4,43	4,88	4,66	4,88

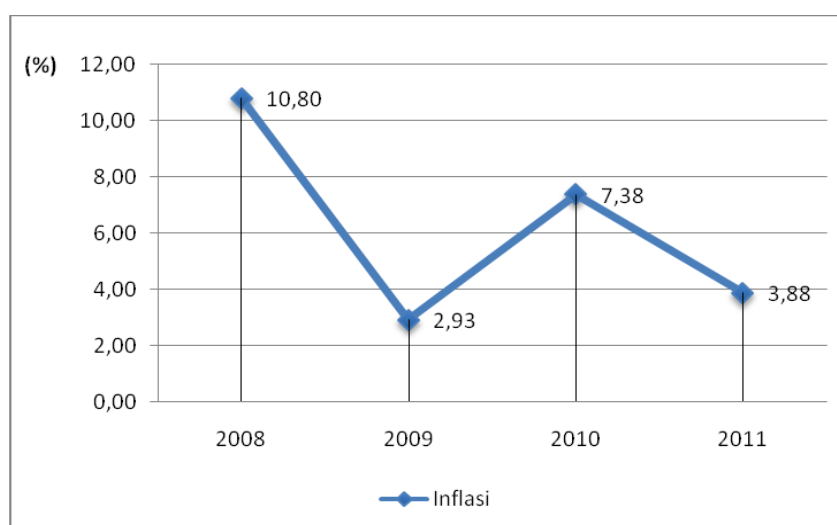
Sumber: BPS Provinsi DIY

Ket: *angka sementara; **angka sangat sementara

C. Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ditunjukkan pada gambar di bawah. Inflasi pada tahun 2008 sebesar 10,80% turun drastis pada tahun 2009 menjadi 2,93%. Namun kemudian pada tahun 2010 terjadi kenaikan inflasi menjadi 7,38% dan penurunan pada tahun 2011 menjadi 3,88%.

Gambar II.2.1.11
Laju Inflasi Provinsi DIY, 2008-2011



Sumber: BPS Provinsi DIY

Tingginya inflasi pada tahun 2008 salah satu akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada pertengahan tahun berdampak pada meningkatnya harga-harga berbagai komoditas baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen.

Berbeda dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2008 yang mendekati dua digit, pada tahun 2009 DIY mengalami inflasi yang terendah dibanding dengan inflasi tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2,93%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya inflasi yang terjadi di Indonesia merupakan dampak keseluruhan dari eksternal dan internal. Krisis ekonomi global menyebabkan permintaan dunia menurun, dan berimbas dengan terjadinya penurunan harga komoditas di pasaran internasional. Kondisi ini kemudian berdampak ke Indonesia. Faktor internal, dengan tidak adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan *pricing shock* seperti menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan atau bahan bakar minyak (BBM) sepanjang tahun 2009. Di lain pihak pasokan komoditas kepada masyarakat dan lancarnya distribusi barang saat menjelang natal dan tahun baru menyebabkan harga barang di pasaran tidak melonjak.

Disisi lain, melonjaknya harga bahan makanan pokok sebagai akibat anomali musim ditahun 2010 merupakan pemicu utama terjadinya inflasi DIY hingga mencapai 7,38%, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi tahun 2009.

Tabel II.2.1.27
Proyeksi Inflasi di Provinsi DIY, 2012-2013

Tahun	Range Angka Proyeksi	Proyeksi Angka Moderat
2012	3,90-4,30	4,00
2013	5,10-5,60	5,20

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY 2011

Proyeksi inflasi DIY tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 4,00% dan 5,20%. Kenaikan inflasi di tahun 2012 diperkirakan terjadi karena kenaikan konsumsi pemerintah yang cukup signifikan terkait dengan persiapan pemilu tahun 2014 dan dampak harga pangan dunia yang diperkirakan terus meningkat.

D. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Nilai PDRB per kapita Provinsi DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2007 sampai 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 PDRB per kapita DIY sebesar 9,79 juta rupiah mengalami kenaikan secara nominal hingga tahun 2011 mencapai 14,84 juta rupiah.

Sementara itu, kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000. PDRB per kapita ADHK selama kurun waktu 2007 sampai 2011 terus mengalami kenaikan, dari tahun 2007 sebesar 5,44 juta rupiah menjadi sebesar 6,34 juta rupiah pada tahun 2011.

Tabel II.2.1.28
Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK
di Provinsi DIY (rupiah), 2007-2011

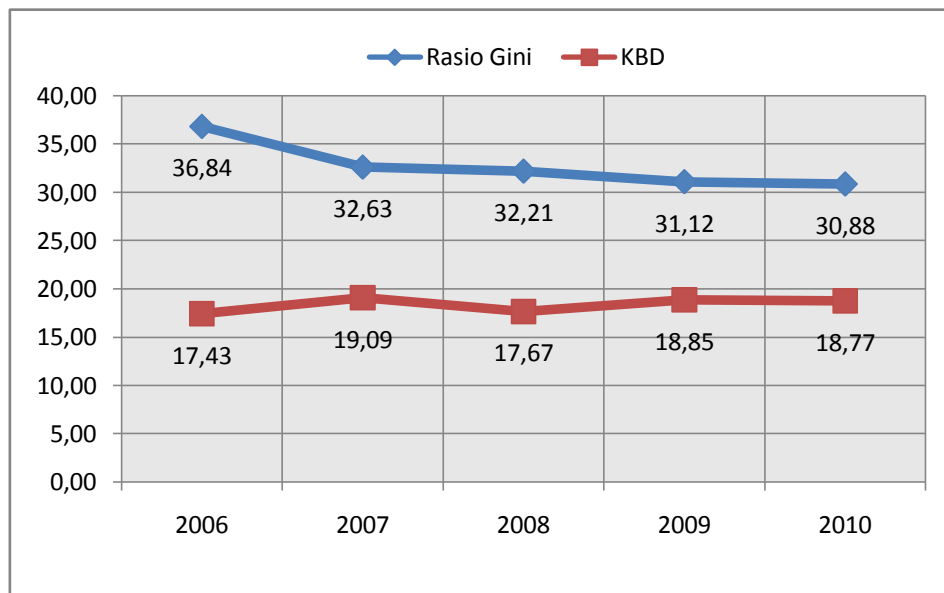
PDRB per kapita	2007	2008	2009	2010	2011
ADHB	9.798.386	11.229.487	12.083.874	13.196.156	14.848.648
ADHK	5.444.868	5.662.383	5.855.379	6.086.507	6.345.750

Sumber: BPS Provinsi DIY

E. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan menurut Bank Dunia

Pada Gambar di bawah terlihat bahwa Rasio Gini cenderung menurun dari 36,84% pada tahun 2006 menjadi 30,88% pada tahun 2010. Sebaliknya, dengan ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD), persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan terendah memiliki kecenderungan meningkat dari 17,43% pada tahun 2006 menjadi 18,77% pada tahun 2010. Fenomena penurunan Rasio Gini dan peningkatan persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi DIY semakin merata.

Gambar II.2.1.12
Rasio Gini & Pemerataan Pendapatan Kriteria Bank Dunia
Provinsi DIY (%), 2006-2010



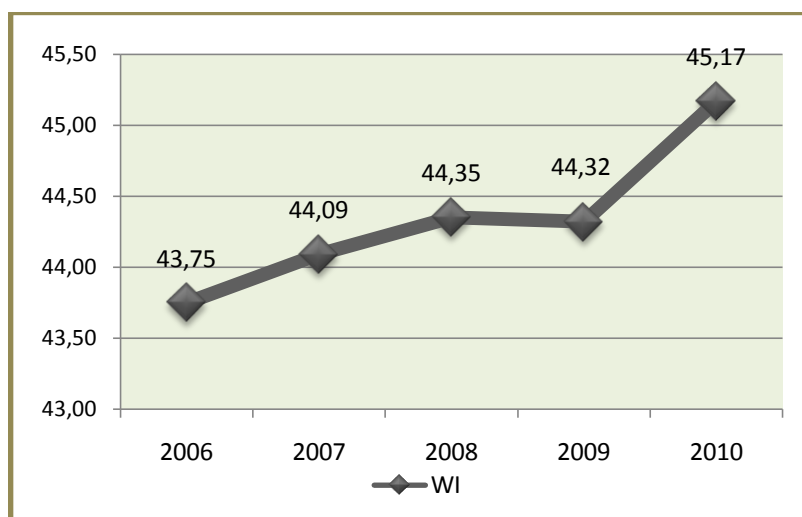
Sumber: BPS Provinsi DIY

F. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan antar wilayah yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2006-2010 menunjukkan trend yang meningkat, yaitu dari 43,75% pada tahun 2006 menjadi 45,17% pada tahun 2010. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat

ketimpangan perekonomian antar wilayah (kabupaten/kota) di Provinsi DIY semakin memprihatinkan.

Gambar II.2.1.13
Indeks Williamson Provinsi DIY (%), 2006-2010



Sumber: BPS Provinsi DIY

G. Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan

Menurut data BPS, pada tahun 2011 tercatat garis kemiskinan di DIY senilai 249.629 rupiah per kapita per bulan meningkat dibanding garis kemiskinan tahun 2010 yang senilai 224.258 rupiah per kapita per bulan.

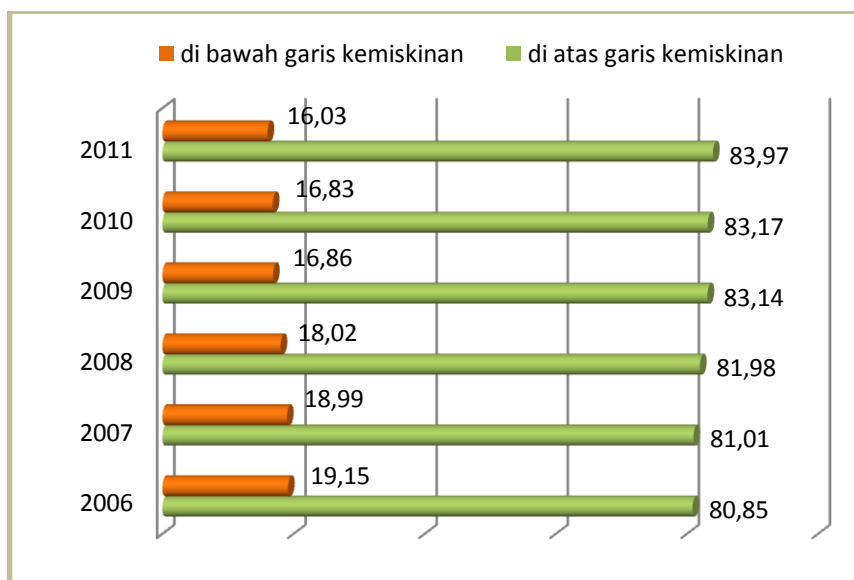
Tabel II.2.1.29
Indikator Kemiskinan di Provinsi DIY, 2006-2011

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bl)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2006	170.720	648,7
2007	184.965	633,5
2008	202.362	608,9
2009	220.830	574,9
2010	224.258	540,4
2011	249.629	560,9

Sumber: Statistik Daerah 2011, BPS Provinsi DIY

Dengan batas garis kemiskinan tersebut (Tabel 2.23), selama kurun waktu 2006 sampai 2011 persentase penduduk di atas garis kemiskinan meningkat, pada tahun 2006 sebanyak 80,85% menjadi 83,97%. Sementara itu, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2006 sebanyak 648,7 ribu jiwa atau sebesar 19,15% dari total penduduk DIY menjadi 560,9 ribu jiwa atau sebesar 16,03% pada tahun 2011.

Gambar II.2.1.14
Persentase Penduduk di bawah dan di atas Garis Kemiskinan
Provinsi DIY, 2006-2011

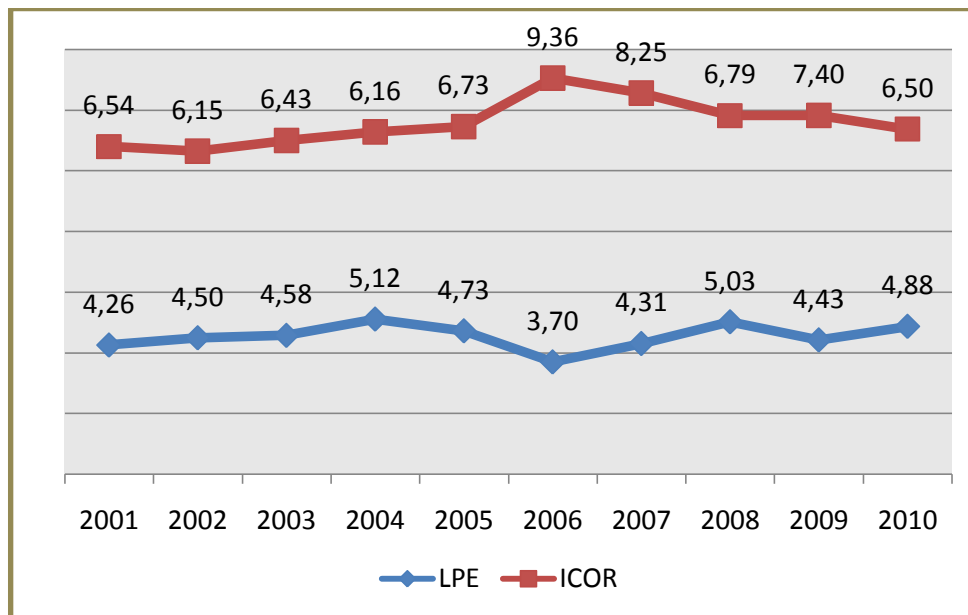


Sumber: BPS Provinsi DIY

H. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi DIY

Selama kurun waktu 2001-2010 angka ICOR Provinsi DIY per tahun relatif tinggi di atas 6 (enam) persen. Hal ini berarti kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di Provinsi DIY dapat dikatakan *relatif kurang efisien*. Angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4. Pada tahun 2001 ICOR Provinsi DIY sebesar 6,54 dan cenderung mengecil sampai dengan tahun 2004 sebesar 6,16. Kemudian ICOR Provinsi DIY mencapai puncaknya ketika terjadi musibah gempa 2006 sebesar 9,36 dan kembali menurun pada tahun 2007 menjadi sebesar 8,25 dan turun lagi menjadi 6,79 pada tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 angka ICOR mengalami kenaikan menjadi 8,14 dan di tahun 2010 angka ICOR mengalami perbaikan menjadi 6,50 sejalan dengan menguatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE).

Gambar II.2.1.15
Perkembangan ICOR Provinsi DIY, 2001-2010



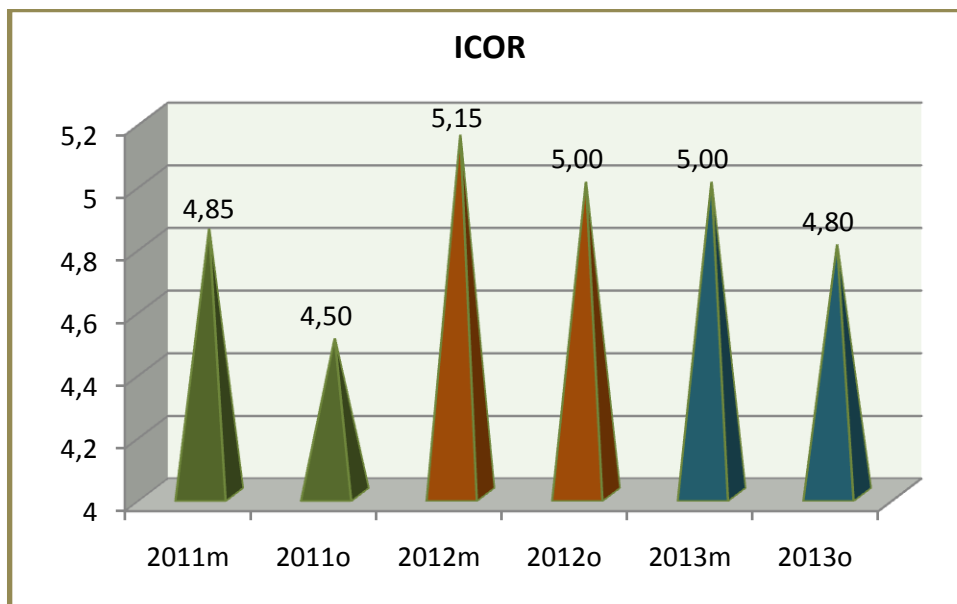
Sumber: ICOR Sektoral Provinsi DIY 2006-2010, BPS Provinsi DIY

Angka koefisien ICOR pada tahun 2006 yang mencapai 9,36 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut banyak investasi dilakukan tetapi output yang dihasilkan hanya mengalami pertumbuhan positif yang relatif kecil. Seperti diketahui, bahwa pada tahun 2006 di Provinsi DIY terjadi gempa bumi yang menghancurkan sebagian besar bangunan, mesin dan peralatan produksi sehingga pelaku ekonomi harus melakukan penggantian atau perbaikan barang-barang modal tersebut. Sebagai akibatnya nilai investasi pada tahun itu relatif menjadi besar sementara produksi menurun karena belum pulihnya kapasitas produksi.

Sementara itu, membaiknya angka ICOR pada tahun 2007 dan 2008 dikarenakan barang modal dan peralatan yang rusak pada tahun 2006 sudah diperbaiki dan mulai berproduksi secara normal. Sedangkan memburuknya angka ICOR pada tahun 2009 kemungkinan disebabkan oleh krisis ekonomi global yang menyebabkan kegiatan investasi semakin mahal tetapi pemasaran produk/output mengalami kendala karena penurunan daya beli secara global. Pada tahun 2010 ICOR turun menjadi 6,50 yang berarti untuk memperoleh satu unit tambahan output diperlukan 6,50 unit tambahan investasi.

Pada tahun 2011, diperkirakan angka ICOR Provinsi DIY berada pada kisaran angka 4,85(m) - 4,50(o). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan perkiraan pada tahun 2012 dan 2013. Tahun 2012 ICOR diperkirakan meningkat mencapai 5,15(m) -5,00(o) dan tahun 2013 kembali turun menjadi 5,00(m) - 4,80(o).

Gambar II.2.1.16
Proyeksi ICOR Provinsi DIY, 2011-2013



Ket: "m" = moderat dan "o" = optimis

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Bappeda Provinsi DIY 2011

I. Perkembangan Nilai Investasi

Dalam penyusunan ICOR Provinsi DIY, pengertian investasi dibatasi pada penambahan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori (Δ inventori). PMTB merupakan investasi fisik dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya, sedangkan perubahan inventori merupakan selisih stok barang pada posisi akhir dan awal tahun.

Berdasarkan PDRB ADHK 2000, perkembangan nilai investasi di Provinsi DIY selama periode 2000-2010 mengalami peningkatan (Tabel II.2.1.30). Pada tahun 2000 nilai investasi yang ditanamkan mencapai 3,53 trilyun rupiah, kemudian naik menjadi 4,33 trilyun rupiah pada tahun 2003, dan sebesar 5,85 trilyun rupiah tahun 2006, serta mencapai sekitar 6,37 trilyun rupiah pada tahun 2010.

Tabel II.2.1.30
Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi DIY ADHK 2000 (Juta Rp)
2000-2010

Tahun	PMTB	Δ Inventori	Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
2000	3.015.106	510.769	3.525.875
2001	3.083.977	675.028	3.759.006
2002	3.509.603	377.390	3.886.993
2003	3.767.524	561.807	4.329.332
2004	4.193.018	650.038	4.843.057
2005	4.474.427	671.248	5.145.675
2006	4.864.177	981.790	5.845.967
2007	4.997.308	1.234.317	6.231.625
2008	5.210.714	1.042.504	6.253.218
2009*	5.378.099	923.452	6.301.551
2010**	5.561.444	811.392	6.372.836

Sumber : ICOR Sektoral, Bappeda Provinsi DIY 2011 - BPS Provinsi DIY
Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Tabel II.2.1.31
Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi DIY ADHB (Juta Rp)
2000–2010

Tahun	PMTB	Δ Inventori	Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
2000	3.015.106	510.769	3.525.875
2001	3.432.768	447.577	3.880.345
2002	4.124.098	411.466	4.535.564
2003	4.735.363	675.163	5.410.526
2004	5.705.888	670.406	6.376.294
2005	6.840.893	923.586	7.764.479
2006	9.178.969	1.016.832	10.195.801
2007	10.834.671	1.600.619	12.435.290
2008	12.983.264	1.401.260	14.384.524
2009*	13.964.317	1.266.488	15.230.805
2010**	15.027.836	1.129.630	16.157.467

Sumber : ICOR Sektoral, Bappeda Provinsi DIY 2011 - BPS Provinsi DIY
Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Berdasarkan pendekatan investasi sama dengan PMTB ditambah perubahan inventori, selama periode 2006-2010 diperoleh ICOR Provinsi DIY sebesar 7,66. Jika ditinjau menurut sektor, maka sektor-sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai ICOR relatif rendah (lebih efisien), sedangkan sektor listrik dan air bersih; sektor jasa-jasa; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor

pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan merupakan sektor-sektor dengan perolehan ICOR relatif tinggi, yang berarti relatif kurang efisien.

Koefisien ICOR untuk sektor pertanian relatif kecil kemungkinan besar karena masih sangat tergantung kepada alam. Peranan sumber daya alam masih cukup besar dalam menentukan produksi/output. Sentuhan mekanisasi pertanian masih sangat terbatas, biaya produksi masih didominasi oleh *intermediate cost*, yaitu input yang habis dalam satu kali produksi.

Tabel II.2.1.32
ICOR Sektoral*, 2006-2010

Sektor/Subsektor	PMTB + ΔInventori	PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	3,41	2,86
a. Tanaman Bahan Makanan	3,33	2,81
b. Tanaman Perkebunan	3,38	2,88
c. Peternakan Dan Hasil-Hasilnya	3,81	3,20
d. Kehutanan	7,36	6,14
e. Perikanan	5,16	4,41
2. Pertambangan & Penggalian	7,34	6,20
3. Industri Pengolahan	7,79	6,40
4. Listrik, Gas & Air Bersih	24,36	20,74
a. Listrik	25,42	21,64
b. Air Bersih	28,79	24,48
5. Konstruksi	6,83	5,75
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	3,72	3,01
a. Perdagangan Besar & Eceran	3,24	2,62
b. Hotel	3,81	3,13
c. Restoran	3,94	3,19
7. Pengangkutan & Komunikasi	13,73	11,50
a. Pengangkutan	18,22	15,23
b. Komunikasi	9,84	8,27
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	6,77	5,76
a. Bank	6,03	5,09
b. Lainnya	8,22	7,04
9. Jasa-Jasa	10,65	8,92
a. Pemerintahan Umum	14,07	11,78
b. Swasta	3,23	2,70
PDRB	7,66	6,41

Sumber: ICOR Sektoral, Bappeda Provinsi DIY 2011 - BPS Provinsi DIY

Keterangan: *) Perhitungan ICOR Sektoral dengan Metode Standar, Lag=0

dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori

Tabel II.2.1.33 disajikan kebutuhan investasi untuk beberapa skenario pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi untuk skenario pertumbuhan ekonomi 5,00% maka diperlukan investasi sebesar 20,95 trilyun rupiah pada tahun 2012. Untuk skenario pertumbuhan 5,30% diperlukan investasi senilai 22,33 trilyun rupiah dan untuk skenario

pertumbuhan 5,75% diperlukan investasi sebesar 24,43 triliun rupiah pada tahun yang sama. Untuk target pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 6,00% diperlukan investasi 25,62 triliun rupiah pada tahun 2012. Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk swasta dan rumah tangga baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri.

Tabel II.2.1.33
Skenario Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Provinsi DIY, Tahun 2012

Skenario Pertumbuhan (%)	ΔY (Juta Rp)	Persentase Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi ADHK (Juta Rp)	Kebutuhan Investasi ADHB (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5,00	1.052.202	38,30	8.886.004	20.946.169
5,10	1.073.246	39,07	9.080.997	21.405.807
5,20	1.094.290	39,83	9.276.684	21.867.082
5,30	1.115.334	40,60	9.473.065	22.329.995
5,40	1.136.378	41,36	9.670.143	22.794.548
5,50	1.157.422	42,13	9.867.918	23.260.745
5,75	1.210.032	44,05	10.365.411	24.433.439
6,00	1.262.642	45,96	10.867.281	25.616.453

Sumber: ICOR Sektoral, Bappeda Provinsi DIY 2011 - BPS Provinsi DIY

Catatan : ICOR metode standar lag 0, 2006-2010 = 7,66

Indeks Implisit Investasi pada tahun 2012 = 235,72

PDRB Konstan 2010 = 21.044.042 juta rupiah

ΔY = Kenaikan PDRB yang diharapkan

Jika dilihat dari besaran ICOR (Tabel II.2.1.32) maka sektor pertanian; perdagangan, hotel, dan restoran; konstruksi; dan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan adalah sektor-sektor dengan angka ICOR relatif rendah, sedangkan jika dilihat dari serapan tenaga kerja, maka sektor perdagangan, industri, pertanian, dan jasa-jasa merupakan sektor-sektor dengan kemampuan serapan tenaga kerja yang relatif cukup tinggi (Tabel 2.34). Sementara jika dilihat dari dampak penggandanya (*multiplier effects*), maka sektor industri pengolahan mempunyai dampak pengganda yang relatif tinggi. Dengan melihat beberapa indikator tersebut di atas, maka:

- Sektor pertanian dapat menjadi prioritas utama investasi karena sektor tersebut mempunyai ICOR terendah, serapan tenaga kerja yang cukup tinggi, dan kepemilikan sumber daya lahan dan air yang relatif memadai di Provinsi DIY.
- Prioritas investasi kedua adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran karena mempunyai ICOR yang relatif rendah dan serapan tenaga kerja yang tinggi.
- Prioritas investasi ketiga adalah sektor industri pengolahan, meskipun angka ICOR relatif agak tinggi namun mempunyai serapan tenaga kerja yang tinggi (15,06%) dan dari hasil penghitungan Tabel *Input Output* Provinsi DIY 2000 mempunyai *forward* dan *backward linkages* yang relatif tinggi.

- Kemudian sektor yang mungkin menjadi prioritas investasi adalah sektor jasa-jasa, karena mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi meskipun sektor ini mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi (10,65%).

Tabel II.2.1.34
Distribusi Serapan Tenaga Kerja di Provinsi DIY menurut Sektor, 2006-2010 (%)

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	37,63	32,09	35,34	35,66	32,21
2. Pertambangan & Penggalian	0,74	1,32	0,95	1,09	0,89
3. Industri Pengolahan	13,67	14,34	13,15	12,94	15,06
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,07	0,14	0,11	0,17	0,12
5. Konstruksi	5,51	9,72	5,64	4,74	4,73
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,06	21,91	22,98	22,31	22,93
7. Angkutan & Komunikasi	3,22	3,11	3,24	4,21	4,45
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	2,16	2,25	2,31	1,61	2,18
9. Jasa-jasa	14,95	15,13	16,29	17,28	17,43
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah (orang)	1.754.950	1.835.542	1.863.747	1.925.630	1.942.764

Sumber: ICOR Sektoral, Bappeda Provinsi DIY 2011 - BPS Provinsi DIY (Diolah dari Sakernas)

Sektor penggalian meskipun mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah tidak direkomendasikan untuk menjadi pilihan prioritas investasi karena Provinsi DIY tidak menonjol dalam kepemilikan sumberdaya alam tambang dan mineral. Perlu upaya bersama untuk melindungi lahan pertanian dan daerah aliran sungai (DAS) dari kerusakan lingkungan dan pencemaran (polusi). Demikian pula sektor listrik dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi juga bukan merupakan pilihan prioritas investasi yang *urgent* karena selain angka ICOR-nya relatif tinggi, juga lebih bersifat *capital intensive*.

J. Angka kriminalitas

Periode tahun 2008 sampai tahun 2010 jumlah kasus penipuan dan pencurian meningkat. Kasus pencurian tahun 2008 sebanyak 2346 meningkat menjadi 3911 kasus pada tahun 2010, sedangkan kasus penipuan tahun 2008 sebanyak 940 kasus meningkat menjadi 1428 kasus pada tahun 2010.

Sementara itu, kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, dan pemalsuan uang tercatat mengalami penurunan selama periode 2008-2010. Kasus narkoba pada tahun 2008 tercatat sebanyak 332 kasus turun menjadi 266 kasus tahun 2010. Kasus pembunuhan menurun dari 15 kasus tahun 2008 menjadi 14 kasus pada tahun 2010. Kasus kejahatan seksual, penganiayaan, dan pemalsuan uang masing-masing menurun menjadi 94 kasus, 579 kasus, dan 5 kasus pada tahun 2010 dari sebanyak 111 kasus, 474 kasus, dan 12 kasus pada tahun 2008.

Tabel II.2.1.35
Angka Kriminalitas di Provinsi DIY, 2008-2010

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010
1	Jumlah kasus Narkoba	332	280	266
2	Jumlah kasus Pembunuhan	15	15	14
3	Jumlah Kejahatan Seksual	111	112	94
4	Jumlah kasus Penganiayaan	474	627	579
5	Jumlah kasus Pencurian	2346	3248	3911
6	Jumlah kasus Penipuan	940	1038	1428
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	12	8	5
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	4230	5328	6297
9	Jumlah Penduduk	3.393.003	3.426.637	3.457.491
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,12	0,16	0,18

Sumber: POLDA Provinsi DIY

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf Provinsi DIY tahun 2011 sebesar 90,84 meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 90,18. Angka Melek Huruf pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY mengalami peningkatan pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009.

Pada tahun 2010 Angka Melek Huruf tertinggi berada di Kota Yogyakarta yaitu 98,03; diikuti oleh Kabupaten Sleman 92,61; Kabupaten Bantul 91,03; Kabupaten Kulon Progo 90,69; dan terendah Kabupaten Gunungkidul yaitu 84,66.

Tabel II.2.1.36
Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi DIY, 2008-2010

Provinsi/Kabupaten	Angka Melek Huruf		
	2008	2009	2010
Kulon Progo	88,72	89,52	90,69
Bantul	88,60	89,14	91,03
Gunungkidul	84,50	84,52	84,66
Sleman	91,49	92,19	92,61
Kota Yogyakarta	97,70	97,94	98,03
Provinsi DIY	89,46	90,18	90,84

Sumber : DIY Dalam Angka, beberapa edisi, Susenas - BPS Provinsi DIY

Sementara berdasarkan hasil SP 2010 oleh BPS, Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 89,73%. Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas

perempuan (85,72%) lebih rendah dibandingkan laki-laki (93,94%). Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di daerah perdesaan (82,63%) lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan (93,31%).

Rendahnya Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas disebabkan oleh rendahnya Angka Melek Huruf penduduk usia 45 tahun ke atas. Angka Melek Huruf penduduk usia 45 tahun ke atas sebesar 75,44%. Angka Melek Huruf penduduk usia 45 tahun ke atas perempuan (66,62%) lebih rendah dibandingkan laki-laki (85,43%).

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Data tahun 2010 menunjukkan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Yogyakarta yaitu 11,48; diikuti Kabupaten Sleman 10,30; Kabupaten Bantul 8,82; dan Kabupaten Kulon Progo 8,20. Sementara angka terendah berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 7,65.

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi DIY dari kurun waktu 2008 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan kecuali Kota Yogyakarta angka rata-rata lama sekolah tahun 2010 sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.2.1.37
Angka Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi DIY, 2008-2010

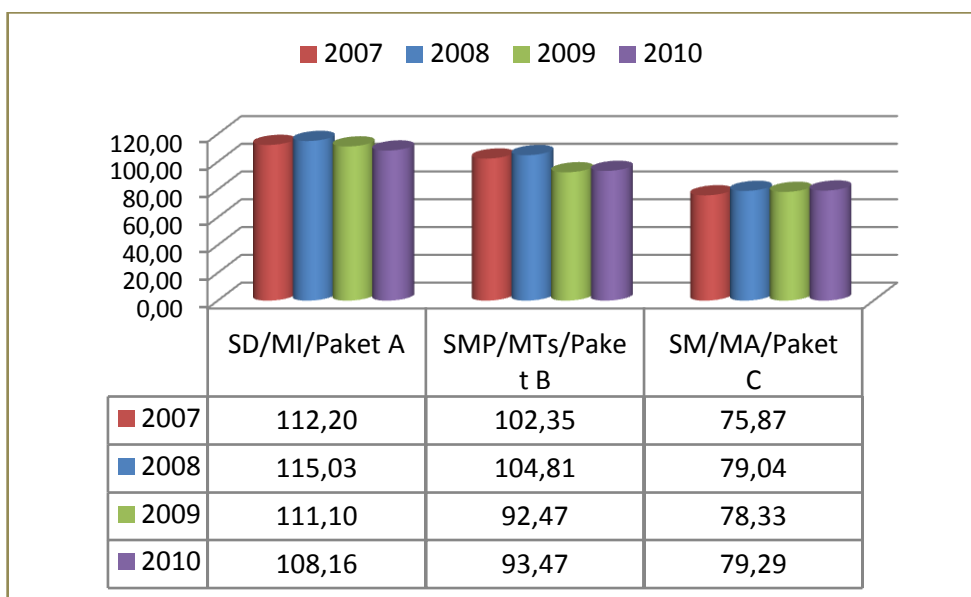
Provinsi/Kabupaten	Angka Rata-Rata Lama Sekolah		
	2008	2009	2010
Kulon Progo	7,80	7,89	8,20
Bantul	8,55	8,64	8,82
Gunungkidul	7,60	7,61	7,65
Sleman	10,10	10,18	10,30
Kota Yogyakarta	11,42	11,48	11,48
Provinsi DIY	8,71	8,78	9,07

Sumber : BPS Provinsi DIY

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A selama kurun waktu 2007-2010 mengalami penurunan, dari tahun 2007 sebesar 112,20 menjadi 108,16 pada tahun 2010. Penurunan APK tersebut juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, yaitu dari tahun 2007 sebesar 102,35 turun menjadi 93,47 pada tahun 2010. Sementara pada jenjang pendidikan SM/MA/Paket C tahun 2007 sebesar 75,87 mengalami peningkatan menjadi 79,29 pada tahun 2010.

Gambar II.2.1.17
Perkembangan APK menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DIY, 2007-2010

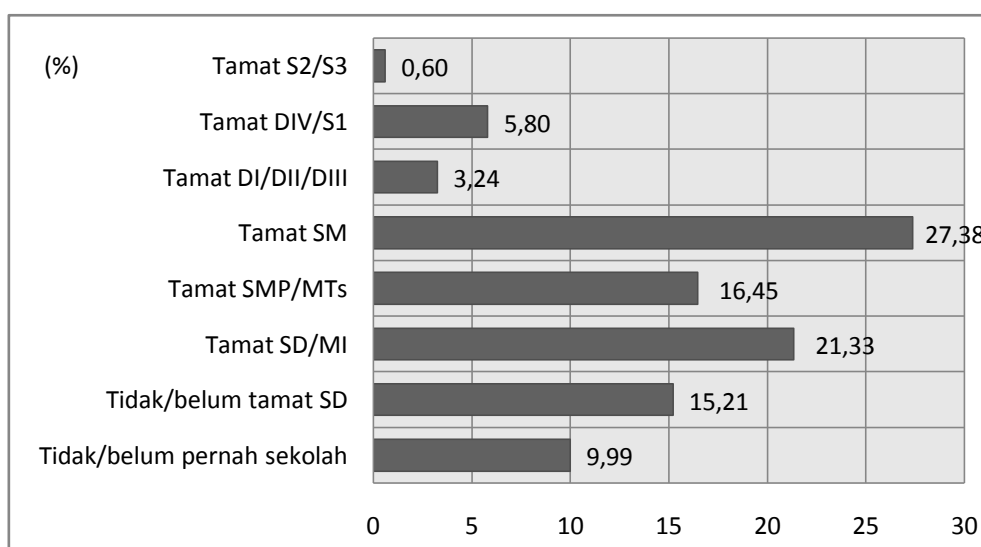


Sumber: BPS-RI, 2007-2010

D. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, penduduk Provinsi DIY usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 9,99%, tidak/belum tamat SD 15,21%, tamat SD/MI/ sederajat 21,33% dan tamat SMP/MTs/ sederajat sebesar 16,45%. Penduduk usia 5 tahun ke atas yang tamat SM/ sederajat sebesar 27,38%, tamat DI/DII/DIII sebesar 3,24%, tamat DIV/S1 sebesar 5,80% dan tamat S2/S3 sebesar 0,60%.

Gambar II.2.1.18
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi DIY, 2010



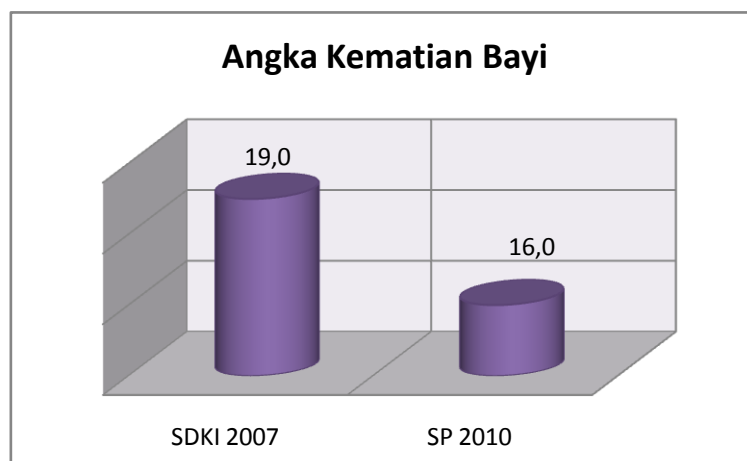
Sumber: SP 2010, BPS

Sementara penduduk Provinsi DIY di daerah perdesaan kualitas SDM-nya lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/ sederajat di perdesaan 37,57% lebih rendah dibandingkan perkotaan 61,54%. Persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/ sederajat 50,19% lebih rendah dibandingkan laki-laki 56,86%.

E. Angka Kematian Bayi

Dalam kurun waktu 2007-2010, AKB menunjukkan perbaikan. Menurut data SP 2010 dari BPS, AKB di Provinsi DIY tercatat sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 yang sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup.

Gambar II.2.1.19
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi DIY, 2007 dan 2010



Sumber: Statistik Daerah 2011, BPS Provinsi DIY

F. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi DIY tahun 2010 sebesar 73,22 tahun. UHH tertinggi berada di Kabupaten Sleman 75,06 tahun diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo 74,38 tahun, Kota Yogyakarta 73,44 tahun, dan Kabupaten Bantul 71,31 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 70,97 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi DIY dari tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi DIY cukup tinggi.

Tabel II.2.1.38
Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi DIY, 2008-2010

Provinsi/Kabupaten	Usia Harapan Hidup (tahun)		
	2008	2009	2010
Kulon Progo	73,79	74,09	74,38
Bantul	71,11	71,21	71,31
Gunungkidul	70,79	70,88	70,97
Sleman	74,43	74,74	75,06
Yogyakarta	73,27	73,35	73,44
Provinsi DIY	73,11	73,16	73,22

Sumber: BPS Provinsi DIY

G. Rasio Penduduk yang Bekerja

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DIY tahun 2011 sebanyak 1.798.595 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.872.912 orang naik dari tahun 2010 yang sebanyak 1.775.148 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.882.296 orang. Sementara tahun 2012 penduduk yang bekerja dan angkatan kerja diproyeksikan masing-masing sebanyak 1.709.547 orang dan 1.780.185 orang.

Tabel II.2.1.39
Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Angkatan Kerja (orang)
di Provinsi DIY, 2008-2012

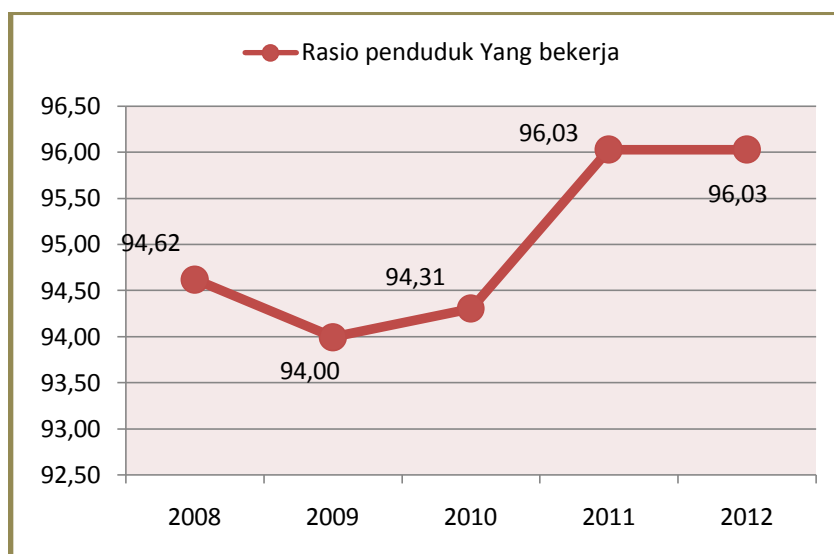
Ketenagakerjaan	2008	2009	2010	2011	2012*
Penduduk yang bekerja	1.892.205	1.895.648	1.775.148	1.798.595	1.709.547
Angkatan Kerja	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.780.185

Ket: *) Angka Proyeksi

Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY, 2011

Dari angka jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja diperoleh angka rasio penduduk yang bekerja disajikan pada gambar di bawah. Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi DIY tahun 2008 sebesar 94,62 turun menjadi 94 tahun 2009, meningkat menjadi 94,31 tahun 2010, kemudian naik lagi menjadi 96,03 pada tahun 2011. Sementara tahun 2012, rasion penduduk yang bekerja diproyeksikan tetap dari tahun sebelumnya, yaitu 96,03.

Gambar II.2.1.20
Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DIY, 2008-2012



Sumber: Disnakertrans Provinsi DIY, 2011

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah grup kesenian di Provinsi DIY dari tahun 2008 hingga tahun 2011 mengalami pasang surut, meskipun demikian tahun 2012 diprediksi akan mengalami kenaikan. Jumlah grup kesenian di Provinsi DIY tahun 2011 tercatat sebanyak 4.269 naik dari tahun sebelumnya. Jumlah gedung kesenian pada tahun yang sama sebanyak 92 gedung dan diproyeksikan naik menjadi berjumlah 94 gedung pada tahun 2012.

Sementara, jumlah klub olahraga tahun 2011 sebanyak 660 dan gedung olahraga berjumlah 29 gedung.

Tabel II.2.1.40
Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di Provinsi DIY, 2008-2012

No	Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah grup kesenian	5.426	5.426	4.225	4.269	4.344
2	Jumlah gedung kesenian	92	92	92	92	94
3	Jumlah klub olahraga	-	652	655	660	-
4	Jumlah gedung olahraga	-	28	28	29	-

Sumber: Disbud & Disdikpora Provinsi DIY

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan Pendidikan

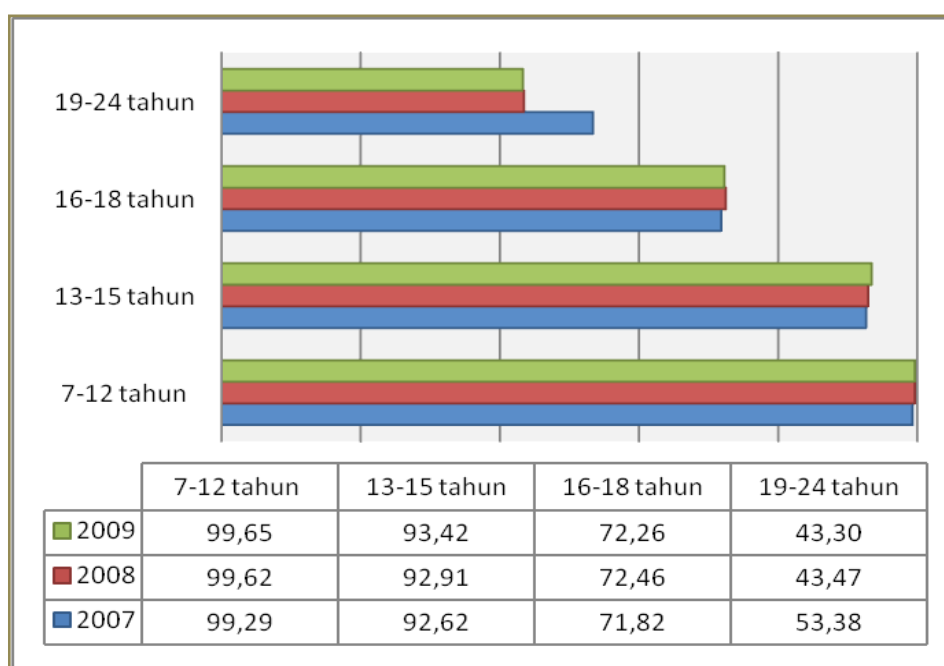
Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

APS pada kelompok usia 7-12 tahun di Provinsi DIY selama kurun waktu 2007-2009 mengalami kenaikan dari sebesar 99,29 tahun 2007 menjadi 99,65 tahun 2009. Demikian halnya dengan APS kelompok usia 13-15 tahun mengalami kenaikan dari sebesar 92,62 tahun 2007 menjadi 93,42 tahun 2009, sedangkan APS kelompok usia 16-18 tahun meningkat dari 71,82 pada tahun 2007 menjadi 72,26 tahun 2009. Sementara APS pada kelompok usia 19-24 tahun mengalami penurunan dari sebesar 53,38 tahun 2007 menjadi 43,30 tahun 2009.

Gambar II.2.1.21

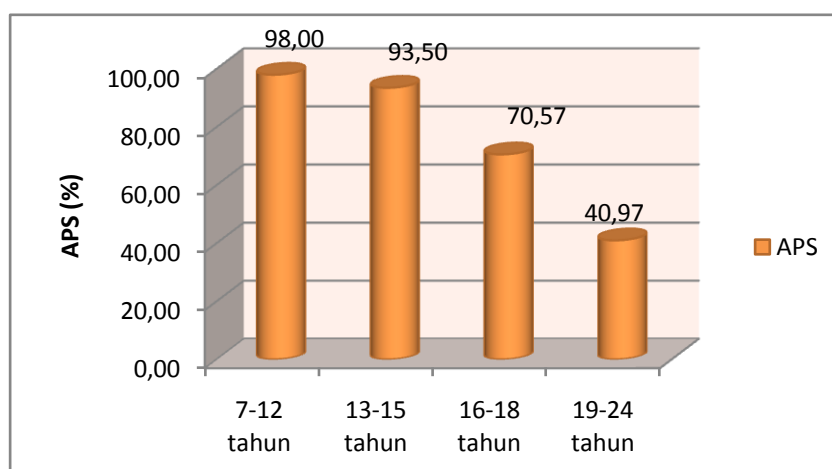
Perkembangan APS menurut Kelompok Usia di Provinsi DIY, 2007-2009



Sumber: BPS-RI, 2007-2010

Lebih lanjut, menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 oleh BPS, APS kelompok usia 7-12 tahun sebesar 98,00, kelompok usia 13-15 tahun sebesar 93,50, kelompok usia 16-18 tahun sebesar 70,57, dan kelompok usia 19-24 tahun sebesar 40,97. APS kelompok usia 13-15 tahun sebesar 93,50 menunjukkan masih terdapat kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) sebesar 6,50% yang tidak bersekolah.

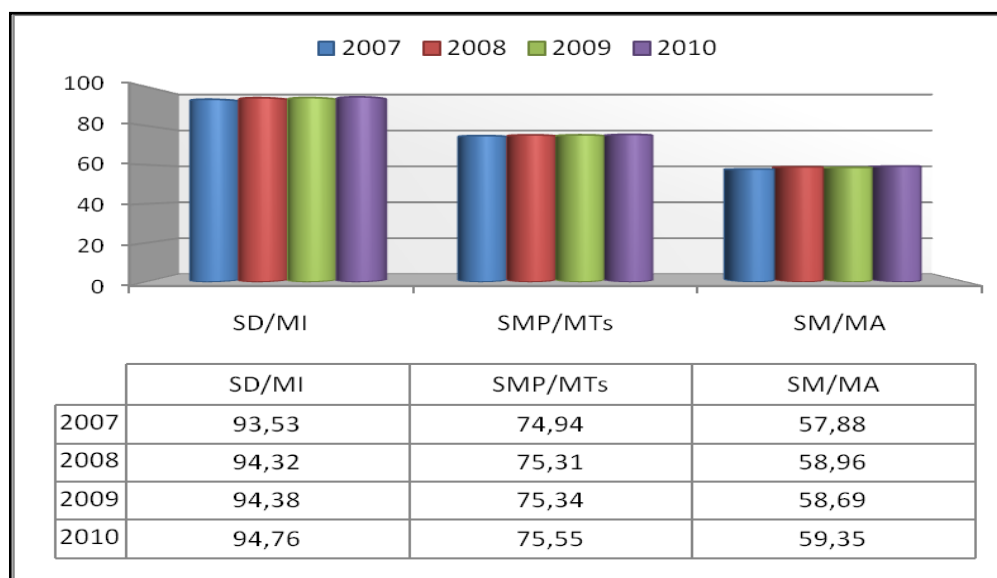
Gambar II.2.1.22
 APS Penduduk menurut Usia Sekolah Di Provinsi DIY, 2010



Sumber: SP 2010, BPS Provinsi DIY

Jika dilihat dari APM-nya, pada jenjang pendidikan SD/MI selama kurun waktu 2007-2010 mengalami kenaikan, tahun 2007 sebesar 93,53 menjadi 94,78 tahun 2010, kemudian pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2007 sebesar 74,94 naik menjadi 75,55 tahun 2010. Sementara pada jenjang SM/MA, APM tahun 2007 sebesar 57,88 naik menjadi 59,35 tahun 2010.

Gambar II.2.1.23
 Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DIY, 2007-2010



Sumber: BPS-RI, 2007-2010

2.2.1.1 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Tabel di bawah menunjukkan perkembangan investasi PMA dan PMDN kurun waktu 2008-2011 serta proyeksi nilai investasi tahun 2012 dan 2013. Nilai investasi (Tabel 2.41) merupakan nilai realisasi investasi yang dilaporkan melalui kantor yang menangani penanaman modal di Kabupaten/Kota dan DIY.

Nilai investasi PMDN secara kumulatif di Provinsi DIY tahun 2011 sebesar 2,313 trilyun rupiah meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 1,884 trilyun rupiah, sedangkan nilai investasi PMA secara kumulatif tahun 2011 sebesar 4,110 trilyun rupiah lebih besar dari tahun 2010 yang sebesar 2,696 trilyun rupiah. Pertumbuhan investasi terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 40,22% dengan nilai pertumbuhan investasi 1,842 trilyun rupiah. Sementara pada tahun 2012 dan 2013, pertumbuhan investasi diproyeksikan masing-masing sebesar 10,16% dan sebesar 10%.

Tabel II.2.1.41

Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2008-2011 dan Proyeksi Tahun 2012-2013 di Provinsi DIY

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	Total Investasi PMA+PMDN (Rp)	Pertumbuhan	
				Rp	%
2008	1.806.426.455.845	2.415.461.744.857	4.221.888.200.702	142.187.960.933	3,49
2009	1.882.514.536.845	2.508.131.163.857	4.390.645.700.702	168.757.500.000	3,997
2010	1.884.925.869.797	2.696.046.957.447	4.580.972.827.244	190.327.126.542	4,33
2011	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008	1.842.605.192.764	40,22
2012*	2.901.795.069.224	4.174.341.324.224	7.076.136.393.448	652.558.373.440	10,16
2013*	3.495.807.942.664	4.287.734.338.224	7.783.542.280.888	707.405.887.440	10,00

*) Angka proyeksi

Sumber: BKPM Provinsi DIY

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH**2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah****A. Pengeluaran Riil Per Kapita**

Pengeluaran riil per kapita Provinsi DIY tahun 2010 sebesar 646,56 ribu rupiah lebih besar dari tahun 2009 yang sebesar 644,67 ribu rupiah. Selama periode 2009-2010, pengeluaran riil per kapita mengalami kenaikan. Tahun 2010, pengeluaran riil per kapita terbesar berada di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 649,71 ribu rupiah dan terkecil berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 625,20 ribu rupiah.

Tabel II.2.1.42
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (ribu rupiah)
di Provinsi DIY, 2008-2010

Provinsi/Kabupaten	Pengeluaran Riil per Kapita		
	2008	2009	2010
Kulon Progo	628,29	629,50	630,38
Bantul	642,19	643,89	646,08
Gunungkidul	621,67	623,09	625,20
Sleman	645,15	646,08	647,84
Yogyakarta	645,10	647,59	649,71
Provinsi DIY	643,25	644,67	646,56

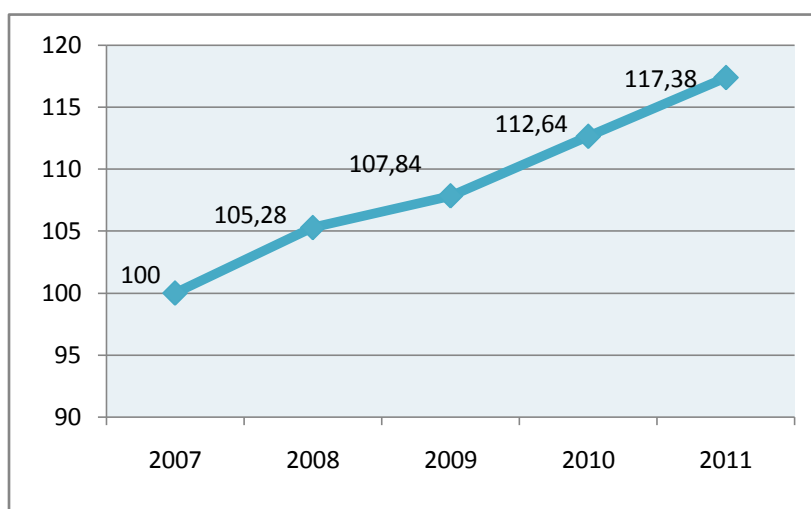
Sumber: DIY Dalam Angka, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY

B. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, yaitu dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

NTP di Provinsi DIY tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. NTP pada tahun 2008 sebesar 105,28 meningkat menjadi 107,84 tahun 2009 naik kembali menjadi 112,64 tahun 2010, dan menjadi 117,38 tahun 2011. 2011 sebesar 117,38 naik sebesar 4,21% dari tahun 2010 yang sebesar 112,64. Semakin tinggi NTP menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan petani semakin baik.

Gambar II.2.1.24
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi DIY, 2008-2011



Sumber: BPS Provinsi DIY

C. Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita

Pada tahun 2010, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Provinsi DIY sebesar 533.966 rupiah sebulan, terdiri dari 244.003 rupiah untuk makan/pangan dan 309.943 rupiah untuk konsumsi bukan makan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pengeluaran konsumsi per kapita tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,13% yang disebabkan oleh kenaikan pengeluaran makanan 18,05% dan kenaikan pengeluaran non pangan sebesar 19,99%.

Pada tahun 2009 dan 2010, porsi konsumsi makanan masih lebih rendah dibandingkan dengan porsi konsumsi non makanan.

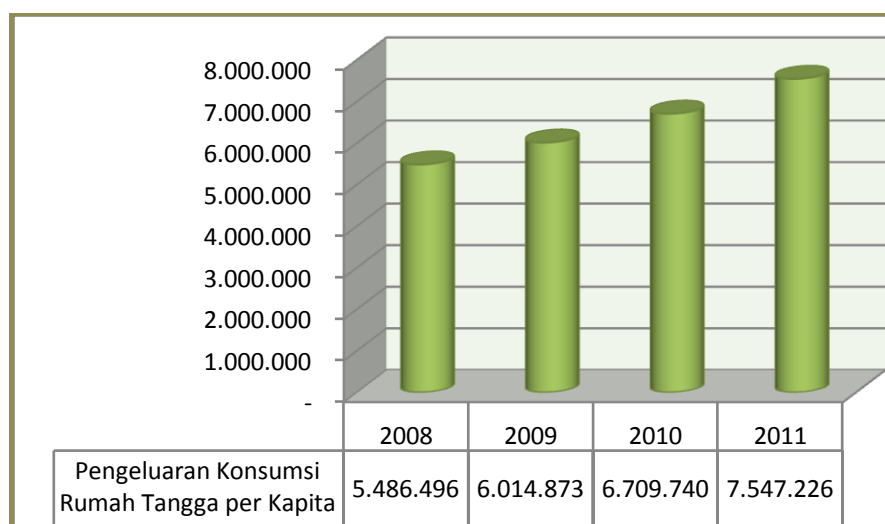
Tabel II.2.1.43
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Provinsi DIY, 2009-2010

Kelompok Komoditas	2009		2010		Perubahan %
	Rp	%	Rp	%	
Makanan	206.690	44,45	244.003	44,05	18,05
Non Makanan	258.321	55,55	309.963	55,95	19,99
Jumlah	465.011	100	553.966	100,00	19,13

Sumber: Statistik Daerah 2011, BPS Provinsi DIY

Selama kurun waktu 2008-2011, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Provinsi DIY terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2008 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tercatat sebesar 5.486.496, naik menjadi sebesar 6.014.873 tahun 2009, 6.709.704 tahun 2010 dan 7.547.226 tahun 2011.

Gambar II.2.1.25
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Provinsi DIY, 2008-2011

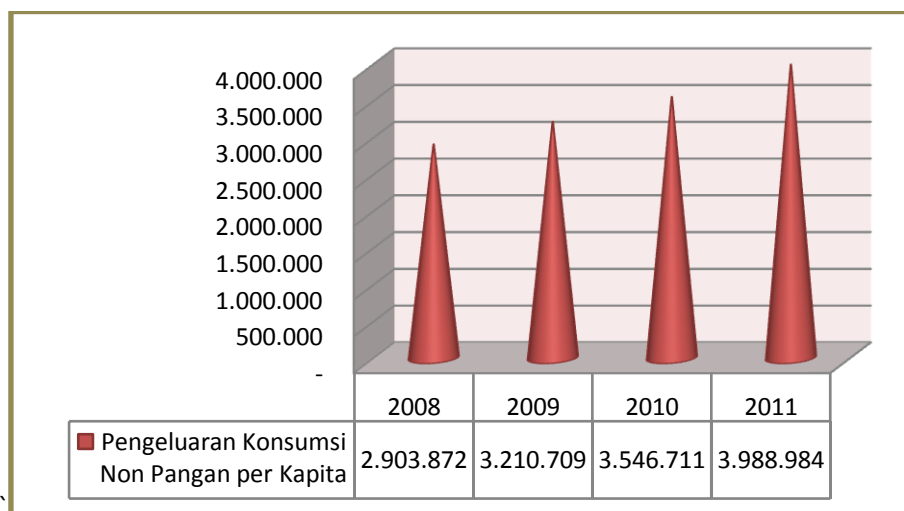


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011

Dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tersebut di atas terbagi dalam pengeluaran konsumsi untuk pangan dan non pangan. Perkembangan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Provinsi DIY dalam kurun waktu 2008-2011 disajikan

pada Gambar di bawah. Tahun 2008 pengeluaran konsumsi non pangan per kapita sebesar 2.903.872 mengalami kenaikan pada tahun 2009, 2010 dan 2011 masing-masing menjadi 3.210.709; 3.546.711; dan 3.988.984.

Gambar II.2.1.26
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita di Provinsi DIY, 2008-2011



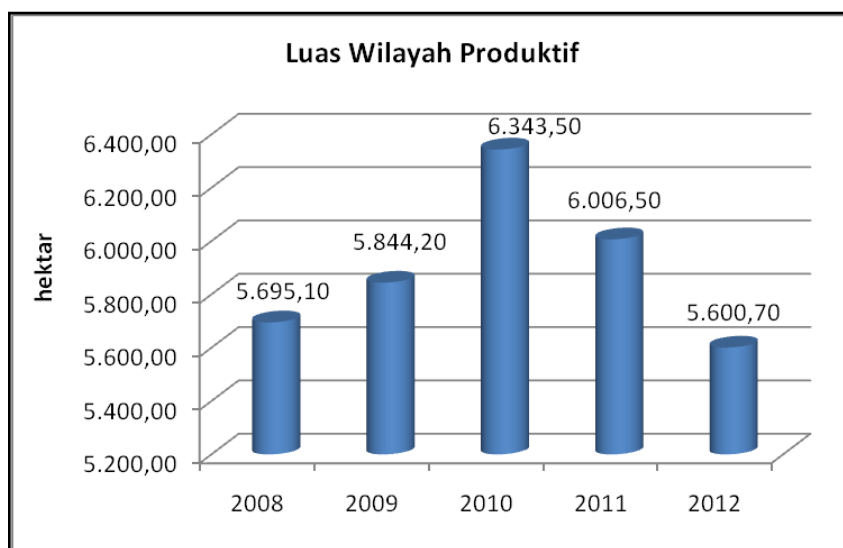
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011

2.2.1.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi DIY selama kurun waktu 2008-2010 mengalami peningkatan, tahun 2008 seluas 5.695,10 hektar (ha), naik menjadi 5.844,20 ha tahun 2009 dan 6.343,50 ha tahun 2010. Sementara itu, tahun 2011 dan 2012 luas wilayah produktif tersebut diperkirakan menurun, yaitu menjadi seluas 5.006,50 tahun 2011 dan 5.600,70 tahun 2012.

Gambar II.2.1.27
Luas Wilayah Produktif di Provinsi DIY, 2008-2010



Sumber: Dinas PUP & ESDM Provinsi DIY, 2012

2.2.1.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Kasus tindak kejahatan di Provinsi DIY dari kurun waktu 2008-2010 terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 tercatat sebanyak 5.669 tindak kejahatan terjadi di Provinsi DIY, yang terdiri dari tindak kejahatan jenis konvensional sebanyak 5.293 kasus, transnasional 359 kasus, dan merugikan negara 17 kasus. Tahun 2009 terdapat 7.034 kasus kejahatan (konvensional 6.729 kasus, transnasional 290 kasus, dan merugikan negara 15 kasus). Sementara tahun 2010 tercatat sebanyak 7.980 kasus tindak kejahatan (konvensional 7.685 kasus, transnasional 289 kasus, dan merugikan negara 6 kasus).

Tabel II.2.1.44
Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di POLDA
di Provinsi DIY, 2008-2010

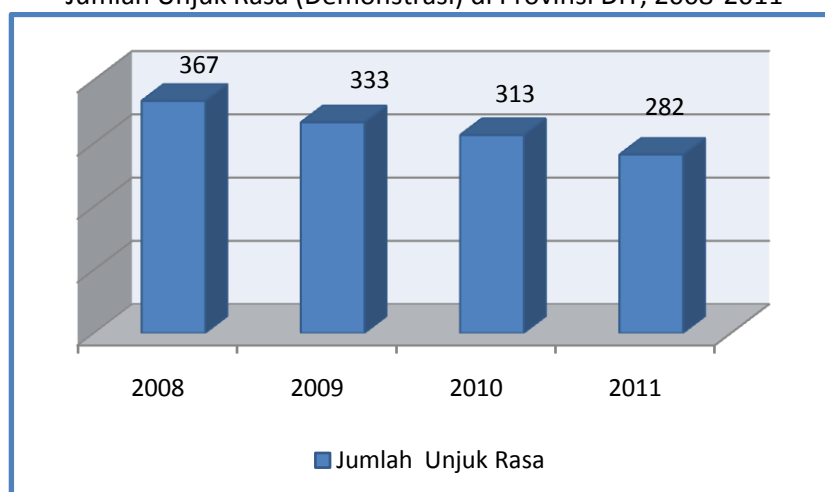
Jenis Kasus	Tahun		
	2008	2009	2010
Konvensional	5.293	6.729	7.685
Transnasional	359	290	289
Merugikan negara	17	15	6
Berimplikasi Kontijensi	-	-	-
Total	5.669	7.034	7.980

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY – POLDA Provinsi DIY

B. Jumlah Demonstrasi

Selama kurun waktu 2008-2011, jumlah unjuk rasa yang terjadi di Provinsi DIY terus mengalami penurunan. Tahun 2008 tercatat sebanyak 367 kasus unjuk rasa, tahun 2009 sebanyak 333 kasus, kemudian tahun 2011 tercatat sebanyak 282 kasus.

Gambar II.2.1.28
Jumlah Unjuk Rasa (Demonstrasi) di Provinsi DIY, 2008-2011



Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY dan POLDA Provinsi DIY

2.2.1.4 Fokus Sumber Daya Manusia**A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)**

Menurut data Sensus Penduduk (SP) 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Provinsi DIY yang tamat Diploma I/II sebanyak 30.767 orang, tamat Diploma III sebanyak 73.037 orang, tamat Diploma VI/S1 sebanyak 185.651 orang, dan tamat S2/S3 sebanyak 19.267 orang. Lulusan S2/S3 terbanyak berada di Kabupaten Sleman, yaitu 10.565 orang, sedangkan yang terkecil berada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebanyak 436 orang. Sementara lulusan Diploma IV/S1 terbanyak berada di Kabupaten Sleman (82.904 orang) dan terkecil di Kabupaten Gunungkidul (9.324 orang)

Tabel II.2.1.45
Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas menurut Wilayah
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi DIY, 2010

Kabupaten/Kota	Diploma I/II	Diploma III	Diploma IV/S1	S2/S3
Kulon Progo	3.650	4.491	11.349	436
Bantul	8.072	17.198	43.940	3.745
Gunungkidul	4.047	3.650	9.324	552
Sleman	11.585	32.103	82.904	10.565
Yogyakarta	3.413	15.595	38.134	3.969
Provinsi DIY	30.767	73.037	185.651	19.267

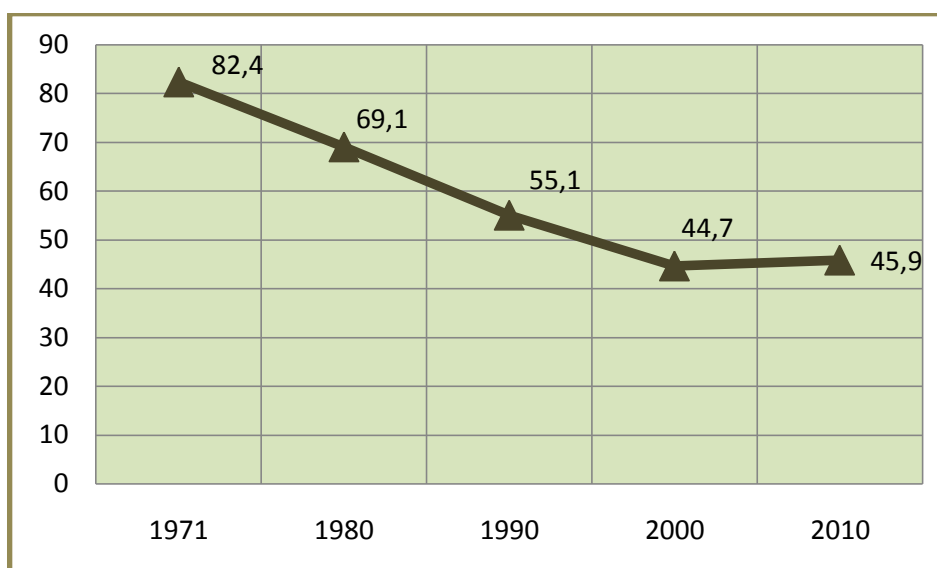
Sumber: SP 2010, BPS RI

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun).

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi DIY tahun 2010 sebesar 45,9, berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 46 orang yang tidak produktif. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2000 yang sebesar 44,7. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif lagi (65 tahun lebih).

Gambar II.2.1.29
Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi DIY, 1971-2010



Sumber: Statistik Daerah 2011, BPS Provinsi DIY

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Kondisi ideal bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan. Pentahapan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) direncanakan dalam RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Dari jumlah program pada program utama sebanyak 215 program dengan jumlah kegiatan total sebanyak 1.283 kegiatan, terdapat 41 kegiatan yang capaian fisiknya tidak selesai 100%, atau 3, 19% dari seluruh kegiatan yang ada. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sbb:

No	Kegiatan	Realisasi Fisik
1	Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0.00
2	Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0.00
3	Peningkatan Status Hak Atas Tanah	0.90
4	Pembangunan Rumah Sakit	8.00
5	Fasilitas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DIY	16.67
6	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	53.94
7	Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD dan Prop. DIY	54.16
8	Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	54.53
9	Ujian Sertifikasi Keahlian PBJ	62.29
10	Fasilitasi untuk lanjut Usia ke Panti Werdha Masyarakat	63.69
11	Optimalisasi Tegakan Kayu Putih	70.00
12	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	71.11
13	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana	71.40
14	Penampungan, Angkutan dan Pengawalan Transmigran	72.00
15	Rapat-rapat Paripurna	75.00
16	Diklat Prajabatan	81.30
17	Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri*	85.00

No	Kegiatan	Realisasi Fisik
18	Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri*	85.00
19	Pelayanan Sertifikasi Bagi Kepala Keluarga/Rumah-rumah Terdampak	85.60
20	Legislasi Rancangan.Peraturan	85.70
21	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY Keluar Daerah	85.71
22	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	90.00
23	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	90.70
24	Pelatihan Transmigran Regional	90.85
25	Penyusunan Bahan Ajar Sejarah DIY	91.27
26	Rehabilitasi Penyandang Cacat di PRTPC Pundong	91.30
27	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	91.36
28	Fasilitasi dan Simulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial	91.80
29	Kegiatan Reses	93.13
30	Pendayagunaan para penyandang Cacat dan Eks Trauma	93.17
31	Pembangunan pembangkit listrik	93.17
32	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata*	95.00
33	Pengembangan Perbenihan Padi di Tingkat Petani	95.00
34	Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi	95.00
35	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	97.50
36	Diklat Fungsional	97.65
37	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	98.09
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara*	99.00
39	Diklat Struktural	99.72
40	Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan*	99.85
41	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo	99.94

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Untuk program/kegiatan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan target kinerja hasil, adalah di luar kegiatan-kegiatan yang capaiannya kurang dari 100% di atas. Sehingga jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada TA 2011 adalah 1242 kegiatan atau 96,8%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Tidak ada kegiatan yang capaiannya melebihi target kinerja.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum factor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah terkait dengan factor keistimewaan DIY seperti masa jabatan gubernur yang diperpanjang sehingga kegiatan-kegiatan yang terkait menjadi tidak dilaksanakan, seperti kegiatan pansus yang terkait dengan pelantikan kepala daerah maupun sosialisasi UUK yang hingga saat ini RUU nya belum final sehingga tidak dapat dilaksanakan sosialisasi. Selain itu juga terdapat sisa-sisa lelang, sifat kegiatan yang lintas sector/lintas instansi/lintas tingkatan pemerintahan hingga efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsure yang dibutuhkan untuk mewujudkan proiritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah 100% dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterkaitan dengan kegiatan yang lain dengan mendukung upaya percepatan pembahasan di tingkat pusat dan kegiatan sosialisasi dilaksanakan setelah RUUK ditetapkan.
- b) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersifat antisipatif harus tetap dianggarkan karena harus dilaksanakan bilamana dibutuhkan.

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui sosialisasi peraturan pengadaan dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan tersebut pada awal tahun anggaran.

Tabel II.2.2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	WAJIB															
1	01															
1	01	01	15									Disdikpora				
1	01	01	15	018	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1. Angka Melek Huruf	Persen	100.00	98.18	98.93	98.18	99.24	100.00	100.00	100.00	Disdikpora
1	01	01	15	020	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12.00	12.21	12.05	9.15	75.93	12.05	12.05	100.42	Disdikpora
1	01	01	15	059	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	3. Angka Partisipasi Kasar:										Disdikpora
1	01	01	15	062	Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	a. PAUD	Persen	85.00	74.01	75.00	65.73	87.64	80.00	80.00	94.12	Disdikpora
1	01	01	15	070	Pemberian Alat Peraga Edukatif (APE)	b. SD/MI	Persen	107.00	111.10	107.00	111.43	104.14	107.00	107.00	100.00	Disdikpora
1	01	01	15	073	Pengembangan Kelembagaan PAUD Nonformal	c. SLTP/MTs	Persen	105.00	114.07	105.00	115.50	110.00	105.00	105.00	100.00	Disdikpora
1	01	01	15	074	Pengembangan Kelembagaan TK	d. SMU/MA/SMK	Persen	90.00	88.91	84.00	88.79	105.70	87.00	87.00	96.67	Disdikpora
1	01	01	15	076	Pembinaan Kreativitas TK	e. PLB	Persen	95.00	66.83	89.00	92.03	103.40	92.50	92.50	97.37	Disdikpora
1	01	01	15	079	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tumbuh Kembang Anak	4. Angka Partisipasi Murni :										Disdikpora
1	01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	a. SD/MI	Persen	95.40	96.84	95.30	97.53	102.34	95.35	95.35	99.95	Disdikpora
1	01	01	16	020	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Sat Pend NonIslam	b. SLTP/MTs	Persen	86.00	80.86	83.00	81.08	97.69	84.50	84.50	98.26	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 01 01 16 063	Penyediaan Beasiswa Retrieval untuk Anak Putus Sekolah	c. SMU/MA/SMK	Persen	65.00	60.85	62.00	63.45	102.34	63.50	63.50	97.69	Disdikpora
1 01 01 16 088	Pengembangan SMP Bertaraf Internasional	5. Angka Kelulusan:										Disdikpora
1 01 01 16 092	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Galur Kulonprogo	a. SD/MI	Persen	99.10	96.47	99.03	98.53	99.50	99.07	99.07	99.97	Disdikpora
1 01 01 16 093	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wates Kulonprogo	b. SLTP/MTs	Persen	97.60	81.84	96.50	98.28	101.84	97.20	97.20	99.59	Disdikpora
1 01 01 16 094	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul	c. SMU/MA/SMK	Persen	98.40	88.98	98.30	99.61	101.33	98.35	98.35	99.95	Disdikpora
1 01 01 16 095	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul	6. Angka Putus Sekolah:										Disdikpora
1 01 01 16 096	Pembinaan Gugus TK/SD	a. SD/MI	Persen	0.02	0.07	0.04	0.07	25.00	0.03	0.03	50.00	Disdikpora
1 01 01 16 097	Pembinaan OOSN SD	b. SLTP/MTs	Persen	0.16	0.17	0.20	0.09	155.00	0.18	0.18	87.50	Disdikpora
1 01 01 16 098	Pembinaan OSN SD	c. SMU/MA/SMK	Persen	0.42	0.44	0.46	0.57	76.09	0.44	0.44	95.24	Disdikpora
1 01 01 16 099	Jambore UKS Nasional	7. Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan										Disdikpora
1 01 01 16 100	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD	Tingkat Nasional dan Internasional:										Disdikpora
1 01 01 16 101	Pembinaan OOSN SMP	a. SD/MI										Disdikpora
1 01 01 16 102	Pembinaan FLSSN SMP	- Nasional	Peringkat	3.00	1.00	4	1.00	175.00	4	4.00	66.67	Disdikpora
1 01 01 16 103	Pembinaan OSN SMP	b. SLTP/MTs										Disdikpora
1 01 01 16 104	Lomba Belajar Mandiri Nasional	- Nasional	Peringkat	3.00	8.00	4	1.00	175.00	4	4.00	66.67	Disdikpora
1 01 01 16 105	Pengembangan Pembelajaran Multikultur dan Kearifan Lokal bagi Siswa SD/SMP	- Internasional	Even	4.00	1.00	1	1.00	100.00	1	1.00	25.00	Disdikpora
1 01 01 16 106	Lomba Penulisan Karya Ilmiah	c. SMU/MA/SMK										Disdikpora

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RPKD tahun 2011	Realisasi RPKD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 01 01 16 107	Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil	- Nasional	Peringkat	4.00	3.00	5	1.00	180.00	4	4.00	100.00	Disdikpora
1 01 01 17	Program Pendidikan Menengah	- Internasional	Even	7.00	0.00	1	4.00	400.00	2	6.00	85.71	Disdikpora
1 01 01 17 062	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	8. Jumlah Sekolah Standar Nasional:										Disdikpora
1 01 01 17 063	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	a. SD/MI	Sekolah	250.00	56.00	150	92.00	61.33	200	200.00	80.00	Disdikpora
1 01 01 17 077	Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	b. SMP/MTs	Sekolah	180.00	76.00	125	97.00	77.60	150	150.00	83.33	Disdikpora
1 01 01 17 078	Pengembangan Kurikulum SMA	c. SMA/MA/SMK	Sekolah	137.00	86.00	105	275.00	261.90	121	121.00	88.32	Disdikpora
1 01 01 17 080	Pengembangan Kurikulum SMK	9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional:										Disdikpora
1 01 01 17 082	Pengembangan SMA Bertaraf Internasional	a. SD/MI	Sekolah	10.00	5.00	7	6.00	85.71	8	8.00	80.00	Disdikpora
1 01 01 17 085	Pengembangan SMK Bertaraf Internasional	b. SMP/MTs	Sekolah	23.00	12.00	12	12.00	100.00	13	13.00	56.52	Disdikpora
1 01 01 17 086	Pengembangan Pendidikan Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal	c. SMA/MA/SMK	Sekolah	65.00	26.00	25	26.00	104.00	25	25.00	38.46	Disdikpora
1 01 01 17 087	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 2 Wates Kulonprogo	10. Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Kab/Kota	5.00	4.00	3	5.00	166.67	4	4.00	80.00	Disdikpora
1 01 01 17 088	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul	11. Jumlah Lembaga PNF Memenuhi Standar Nasional	Lembaga	80.00	37.00	45	46.00	102.22	65	65.00	81.25	Disdikpora
1 01 01 17 089	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Pengasih Kulonprogo	12. Prestasi Kejuaraan PNF	Peringkat	1.00	2.00	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00	Disdikpora
1 01 01 17 090	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul	13. Jumlah Mahasiswa	Orang	300,605.00	270,650.00	280,550	272,647.00	97.18	290,520	290,520.00	96.65	Disdikpora
1 01 01 17 091	Penerbitan Jurnal Karya Ilmiah	14. Jumlah Mahasiswa Asing	Orang	1,050.00	8,000.00	990	8,342.00	842.63	1,015	1,015.00	96.67	Disdikpora
1 02	Kesehatan											

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	02	01	19		Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Umur Harapan Hidup	Tahun	74.60	74.20	74.30	74.00	99.60	74.40	74.40	99.73	Dinkes
1	02	01	19	002	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	2. Angka Kematian Balita	Per 1000 (KH)	16.00	18.00	17	19.00	88.24	16	16.00	100.00	Dinkes
1	02	01	19	009	Peningkatan Peran serta Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	3. Angka Kematian Bayi	Per 1000 (KH)	16.00	17.00	16	17.00	93.75	16	16.00	100.00	Dinkes
1	02	01	19		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	4. Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000 (KH)	100.00	103.00	102	103.00	99.02	101	101.00	99.00	Dinkes
1	02	01	19	001	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	5. Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0.79	0.70	0.83	0.67	119.28	0.81	0.81	97.47	Dinkes
1	02	01	19	002	Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin	6. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas	Persen	13.00	16.00	12.50	15.00	120.00	12.50	12.50	96.15	Dinkes
1	02	01	19	003	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit. A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	7. Cakupan Rawat Inap RS	Persen	1.39	1.32	1.35	2.50	185.19	1.38	1.38	99.28	Dinkes
1	03				Pekerjaan Umum											
1	03	01	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	85.00	70.00	75.00	83.89	111.85	80.00	83.89	98.69	DPUESDM
1	03	01	16	007	Pembangunan saluran drainase lingkungan	2. Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi	Persen	80.00	65.40	70.00	70.09	100.13	75.00	70.09	87.61	DPUESDM
1	03	01	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3. Persentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan	Persen	9.00	7.50	7.00	7.00	100.00	8.00	7.00	77.78	DPUESDM
1	03	01	18	003	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	75.00	50.00	60.00	65.29	108.82	70.00	65.29	87.05	DPUESDM
1	03	01	18	004	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	5. Persentase Layanan	Persen	50.00	20.00	30.00	55.00	183.33	40.00	55.00	110.00	DPUESDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB			
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
			Jaringan Air Limbah Terpusat di APY												
1	03	01	18	008	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK)	6. Persentase Penanganan Banjir Terhadap Daerah Potensi Persen	75.00	60.00	65.00	65.00	100.00	70.00	65.00	86.67	DPUESDM
1	03	01	18	010	Pemeliharaan Rutin Jalan	7. Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat Liter/detik	500.00	200.00	100.00	293.00	293.00	100.00	593.00	118.60	DPUESDM
1	03	01	18	011	Pemeliharaan Rutin Jembatan	8. Persentase Penurunan Genangan Persen	50.00	20.00	10.00	3.90	39.00	10.00	33.90	67.80	DPUESDM
1	03	01	20		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	9. Persentase Penduduk yang Terlayani Pengelolaan Sampah Persen	75.00	60.00	65.00	66.40	102.15	70.00	66.40	88.53	DPUESDM
1	03	01	20	001	Inspeksi Kondisi Jalan	10. Jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem <i>Sanitary Landfill</i> Jumlah	7.00	2.00	1	1.00	100.00	2	5.00	71.43	DPUESDM
1	04				Perumahan										
1	03	01	15		Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase Penurunan <i>Backlog</i> dalam Penyediaan Perumahan Persen	10.00	2.00	2.00	14.90	745.00	2.00	18.90	189.00	DPUESDM
1	03	01	15	001	Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan	2. Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan Persen	50.00	18.00	10.00	4.40	44.00	10.00	32.40	64.80	DPUESDM
1	03	01	15	002	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM)	3. Persentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi Persen	25.00	10.00	5.00	5.00	100.00	5.00	20.00	80.00	DPUESDM
1	03	01	15	004	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	4. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh Persen	50.00	30.00	10.00	13.05	130.50	10.00	53.05	106.10	DPUESDM
1	05				Penataan Ruang										
1	03	01	15		Program Perencanaan Tata Ruang	1. Jumlah Kawasan yang Dikembangkan Jumlah	7.00	2.00	1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	57.14	DPUESDM

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 01 15 004	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah											DPUESDM
1 03 01 15 005	Penyusunan Rencana Rencana Detail Tata Ruang Kawasan											DPUESDM
1 07	Perhubungan											
1 07 01 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan											DISHUBKO MINFO
1 07 01 15 007	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat*											DISHUBKO MINFO
1 07 01 15 010	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara*	1. V/C Rasio Kendaraan yang Melintas di Perkotaan	Rasio	0.60	0.80	0.70	0.75	92.86	0.65	0.75	75.00	DISHUBKO MINFO
1 07 01 15	Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service*	2. Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan	Persen	80.00	52.40	70.00	70.00	100.00	75.00	70.00	87.50	DISHUBKO MINFO
1 07 01 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	3. Load factor Penumpang Angkutan Umum	Persen	40.00	36.54	30.00	28.42	94.73	35.00	28.42	71.05	DISHUBKO MINFO
1 07 01 16 003	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasaran Jembatan Timbang*	4. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun	Persen	25.00	17.30	5.00	12.88	257.60	5.00	35.18	140.72	DISHUBKO MINFO
1 07 01 16 005	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP*	5. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek	Persen	25.00	20.00	5.00	-3.52	-70.40	5.00	21.48	85.92	DISHUBKO MINFO
1 07 01 16 006	Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	6. Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi	Persen	10.00	10.00	10.00	9.73	97.30	10.00	9.73	97.30	DISHUBKO MINFO
1 08	Lingkungan Hidup											
1 08 01 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air:										BLH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
										Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9	
1	08	01	15	11	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
1	08	01	15	11	Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	BOD (mg/l)	< 8	3.70	< 9	6.63	126.33	< 9	9.00	100.00	BLH	
1	08	01	16		Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	a. Air	COD (mg/l)	< 40	16.80	< 45	20.21	155.09	< 45	45.00	100.00	BLH
1	08	01	16	001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura		CO (ppm)	< 13	13.72	< 14	6.29	155.07	< 14	14.00	100.00	BLH
1	08	01	16	002	Koordinasi Penilaian Langit Biru (Dana cukai tembakau)	b. Udara	HC(µg/m ³)	< 140	177.00	< 145	100.34	130.80	< 145	145.00	100.00	BLH
1	08	01	16	004	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	2. Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani	Unit usaha	360.00	710.00	360	410.00	113.89	360	1,480.00	411.11	BLH
1	08	01	16	006	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	3. Penurunan Luas Kerusakan Lahan	Ha	9.00	23.00	6.00	7.50	125.00	9.00	9.00	100.00	BLH
1	08	01	16	007	Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup*	4. Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah	Cm	248.00	76.00	258.00	197.00	123.64	253.00	253.00	97.98	BLH
1	11				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	11	01	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	71.00	71.50	70.80	72.24	102.03	70.90	70.90	99.86	BPPM
1	11	01	15	003	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	2. Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM)	persen	62.52	62.87	62.48	63.32	101.34	62.50	62.50	99.97	BPPM
1	12				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
1	11	01	15		Program Keluarga Berencana (KB)	1. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB	Kelompok	5.00	7.00	5	5.00	1.00	5	17.00	340.00	BPPM
1	11	01	15	002	Pelayanan KIE	2. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR	Paket	78.00	5.00	15	15.00	1.00	30	50.00	64.10	BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	13															
1	13	01	15													
1	13	01	15	001	Peningkatan kemampuan (Capacity building Petugas dan Pedampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	1. Cakupan Penanganan PMKS	Persen	5.00	1.99	5.00	2.46	49.20	5.00	100.00	Dinsos	
1	13	01	15	005	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial										Dinsos	
1	13	01	15	006	Pemulangan / meneruskan Perjalanan Orang Terlantar										Dinsos	
1	13	01	15	009	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan										Dinsos	
1	14															
1	14	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Jumlah Angkatan Kerja		2,047,422.00	1,882,296.00	1,965,251	1,872,912.00	95.30	2,006,337	2,006,337.00	97.99	Disnakertrans
1	14	01	15	012	Bimtek Kompetensi Based Training	2. Jumlah Kesempatan Kerja		2,115,830.00	1,775,148.00	1,960,725	#REF!	#REF!	2,038,278	2,038,278.00	96.33	Disnakertrans
1	14	01	15	015	Pembinaan Peserta Pemagangan Ke Perusahaan	3. Tingkat Pengangguran Terbuka		79,345.00	107,148.00	84,387	74,317.00	111.93	81,866	81,866.00	96.82	Disnakertrans
1	14	01	15	020	Pelatihan dan Fasilitasi teknis HP bagi Pencari Kerja											Disnakertrans
1	14	01	15	022	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Untuk Penempatan											Disnakertrans
1	14	01	15	023	Pelatihan Ketrampilan untuk Tenaga Kerja Mandiri											Disnakertrans

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB			
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)				
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
1	14	01	15	024	Pelatihan Keterampilan Instiusional Bagi Pencari Kerja									Disnakertrans	
1	14	01	15	025	Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit									Disnakertrans	
1	14	01	15	026	Pelatihan Ketrampilan swadana									Disnakertrans	
1	14	01	15	027	Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna Untuk Usaha Mandiri									Disnakertrans	
1	14	01	15	031	Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja									Disnakertrans	
1	14	01	15	034	Pengembangan Produktivitas Melalui Pelatihan Kewirausahaan									Disnakertrans	
1	14	01	15	036	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja									Disnakertrans	
1	14	01	15	038	Sosialisasi dan Fasilitasi Peserta Pemagangan ke Jepang									Disnakertrans	
1	14	01	15	042	Pembinaan Peserta Pasca Pemagangan ke Perusahaan									Disnakertrans	
1	14	01	15	043	Bimtek Assesor Kompetensi									Disnakertrans	
1	14	01	15	044	Pembinaan Peserta Pasca Pemagangan ke Jepang									Disnakertrans	
1	14	01	15	047	Sertifikasi Uji Kompetensi Instruktur									Disnakertrans	
1	14	01	15	048	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan AMT Bagi Pencari Kerja									Disnakertrans	
1	14	01	15	049	Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Mantan Peserta MTU									Disnakertrans	
1	16				Penanaman Modal	1. Pertumbuhan Investasi (PMDN + PMA)	Persen	5.00	4.33	4.34	40.22	926.73	4.53	4.53	90.60

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	16	01	15									BKPM				
1	16	01	15	002	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah							BKPM				
1	16	01	15	006	Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha *							BKPM				
1	16	01	15	008	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*							BKPM				
1	16	01	15	010	Penyelenggaraan Pameran Investasi*							BKPM				
1	16	01	15	013	Penyelenggaraan Pameran Potensi Daerah*							BKPM				
1	16	01	15	014	Pemutakiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah*							BKPM				
1	16	01	15	016	Penyusunan Analisa Ekonomi Peluang Investasi Andalan Daerah							BKPM				
1	17				Kebudayaan											
1	17	01	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Jumlah Kunjungan Museum	Orang	424,000.00	365,000.00	387,000	623,500.00	161.11	405,000	405,000.00	95.52	Disbud
1	17	01	15	011	Pelestarian dan Pengembangan Upacara Adat*	2. Jumlah Grup/ Kelompok Kesenian	Grup	7,032.00	4,269.00	6,390	4,269.00	66.81	6,711	6,711.00	95.44	Disbud
1	17	01	15	012	Pemberdayaan Perempuan dalam bidang budaya	3. Jumlah Benda Cagar Budaya	Buah	455.00	350.00	385	515.00	133.77	420	420.00	92.31	Disbud
1	17	01	15	018	Penyelenggaraan Kompetisi bahasa dan sastra Jawa	4. Jumlah Peristiwa Budaya	Event	1,060.00	803.00	870	920.00	105.75	960	960.00	90.57	Disbud
1	17	01	15	019	Penyelenggaraan kompetisi budaya bagi anak-anak	5. Jumlah Penghargaan Budaya	Organisasi	415.00	312.00	360	329.00	91.39	390	390.00	93.98	Disbud
1	17	01	15	031	Penerbitan Majalah bahasa Jawa	6. Jumlah Desa Budaya	Desa	41.00	32.00	41	32.00	78.05	41	41.00	100.00	Disbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPDP tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	17	01	15	032	Pelatihan Seni dan Budaya di DIY							Disbud				
1	17	01	15	033	Konggres bahasa jawa*							Disbud				
1	17	01	15	034	Penyelenggaraan Macapat rutin							Disbud				
1	17	01	15	035	Penyelenggaraan Anugerah buaya kepada lembaga, pelaku pelestari budaya, pengembangan adat dan tradisi							Disbud				
1	17	01	15	036	Festival upacara adat Se-Provinsi DIY*							Disbud				
1	18				Kepemudaan dan Olahraga											
1	01	01	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1. Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	Unit	10.00	4.00	6	6.00	1.00	8	8.00	80.00	Disdikpora
1	01	01	16	001	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	2. Prestasi Olah Raga Tingkat Nasional:										Disdikpora
1	01	01	16	003	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	a. POPNAS	Peringkat	10.00	-	10	7.00	130.00	-	10.00	100.00	Disdikpora
1	01	01	16	010	Peningkatan Kemandirian dan Kepeloporan Pemuda	b. POSPENAS	Peringkat	3.00	18.00	-	-	-	3	3.00	100.00	Disdikpora
1	01	01	16	011	Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda	c. PON	Peringkat	10.00	-	-	-	-	10	10.00	100.00	Disdikpora
1	01	01	16	012	Pemberdayaan Peran Serta Pemuda untuk Pembangunan Pedesaan											Disdikpora
1	19				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
1	19	01	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Jumlah Pusat Penanggulangan Bencana	Buah	1.00	2.00	1	3.00	300.00	1	6.00	600.00	Bakesbang linmas
1	19	01	15	013	Pelatihan SAR Linmas Provinsi DIY	2. Jumlah Regulasi tentang	Buah	9.00	20.00	2	3.00	150.00	2	25.00	277.78	Bakesbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
			Pengurangan Resiko Bencana									linmas				
1	19	01	15	029	Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas							Bakesbang linmas				
1	19	01	15	030	Fasilitasi Validasi Anggota Satuan Linmas							Bakesbang linmas				
1	19	01	15	031	Pemberdayaan Potensi SAR Linmas							Bakesbang linmas				
1	19	01	15	032	Fasilitasi Rekrutmen Anggota Baru SAR Linmas							Bakesbang linmas				
1	19	01	15	034	Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas Provinsi DIY							Bakesbang linmas				
1	19	01	15	035	Pendirian Pos Kamling di Lokasi Shelter							Bakesbang linmas				
1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1	16	01	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1. SKPD yang Mendapatkan dan Menerapkan ISO	Jumlah SKPD	3.00	1.00	3	3.00	100.00	3	3.00	100.00	BKPM
1	16	01	25	001	Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik											BKPM
1	21				Ketahanan Pangan											
1	21	01	15		Program Pemberdayaan Penyuluhan Petani	Ketersediaan Pangan:										BKPP
1	21	01	15	006	Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh	a. Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	3,664.00	3,573.00	3,664	3,736.00	101.97	3,664	3,664.00	100.00	BKPP

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)*	11*		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	21	01	15	007	Fasilitasi Pendampingan FEATI	b. Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	94.59	87.59	94.59	92.88	98.19	94.59	94.59	100.00	BKPP
1	21	01	15	009	Pengembangan Kelembagaan Petani	2. Distribusi dan Akses:										BKPP
1	21	01	15	011	Penyusunan Programa Penyuluhan	a. Penguatan LDPM	Gapoktan	250.00	83.00	150	150.00	100.00	200	200.00	80.00	BKPP
1	21	01	16		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN	3. Peningkatan Mutu Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan:										BKPP
1	21	01	16	002	Penyusunan data Neraca Bahan Makanan	a. Konsumsi Energi	Kkal/kap/Hr	2,000.00	1,809.74	2,000	1,626.90	81.35	2,000	2,000.00	100.00	BKPP
1	21	01	16	004	Pengembangan Ketersediaan Pangan	b. Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	52.00	52.27	52	49.00	94.23	52	52.00	100.00	BKPP
1	21	01	16	005	Penguatan Cadangan Pangan	c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor	89.10	79.24	88.10	85.60	97.16	88.60	88.60	99.44	BKPP
1	21	01	16	007	Pemberdayaan Lumbung Pangan	4. Pengembangan Penyuluhan:										BKPP
1	21	01	16	014	Penyusunan SKPG	a. Peningkatan Kualitas Penyuluh	Orang	1,500.00	676.00	300	547.00	1.82	300	1,523.00	101.53	BKPP
1	21	01	16	018	Sertifikasi Prima pada Hortikultura Segar	b. Peningkatan Kemampuan Petani dan Pihak Terkait	Orang	2,500.00	1,332.00	500	1,067.00	2.13	500	2,899.00	115.96	BKPP
1	21	01	16	020	Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3BA)											BKPP
1	21	01	16	024	Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)											BKPP
1	21	01	16	029	Harmonisasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu OKKPD											BKPP
1	21	01	16	030	Surveillance Produk Bersertifikat											BKPP
1	21	01	16	031	Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal dan Pameran Hari pangan Sedunia (HPS)											BKPP
1	21	01	16	037	Apresiasi LDPM											BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPDP tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB			
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1	21	01	16	038	Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan.								BKPP		
1	21	01	16	039	Fasilitasi Stabilisasi Harga Pangan								BKPP		
1	21	01	16	040	Pemberdayaan Wanita dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Pangan								BKPP		
1	21	01	16	041	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara								BKPP		
1	21	01	16	042	Penanganan Keamanan Pangan								BKPP		
1	21	01	16	049	Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan								BKPP		
1	21	01	16	050	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan								BKPP		
1	21	01	16	052	Penyusunan Data/Informasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan								BKPP		
1	21	01	16	053	Gerakan Keamanan Pangan di Daerah Rawan Pangan								BKPP		
1	21	01	16	054	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA								BKPP		
1	21	01	16	055	Penyusunan Database Pangan Lokal (Peta Potensi Pangan Lokal)								BKPP		
1	21	01	16	056	Peningkatan Kelembagaan Pangan Desa								BKPP		
1	22				Pemberdayaan Masyarakat Desa										
1	11	01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Kelmpk (Desa/Kel)	30.00							
								33.00	25	39.00	156.00	25	25.00	83.33	BPPM
1	11	01	15	001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	2. Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	persen	35.00	30	30.69	102.30	30	30.00	85.71	BPPM

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPDP tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	11	01	15	002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	3. Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	persen	25.00	11.26	20	26.14	130.70	20	20.00	80.00	BPPM
1	11	01	15	003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat desa											BPPM
1	11	01	15	007	Fasilitasi TMMD											BPPM
1	11	01	15	010	Koordinasi Gelar TTG											BPPM
1	11	01	15	011	Fasilitasi dan Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan											BPPM
1	11	01	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan											BPPM
1	11	01	16	002	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa											BPPM
1	11	01	16	011	Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)											BPPM
1	11	01	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa											BPPM
1	11	01	17	001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa											BPPM
1	11	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa											BPPM
1	11	01	18	010	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat											BPPM
1	11	01	18	011	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan											BPPM
1	11	01	20		Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa											BPPM
1	11	01	20	005	Fasilitasi Pokja Profil Desa											BPPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	23															
1	06	01	15													
1	06	01	15	002	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	1. Pertumbuhan PDRB	Persen	5.40	4.88	4,9 - 5,4	5.16	109.79	5,2 - 5,7	5.16	95.56	
1	06	01	15	005	Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Skala Kabupaten/Kota	2. PDRB:										
						a. Atas Dasar Harga Konstan	Trilyun Rp	23.99	21.04	21.95	22.13	100.82	22.95	22.13	92.25	
						b. Atas Dasar Harga Berlaku	Trilyun Rp	61.19	45.63	50.57	51.78	102.39	55.63	51.78	84.62	
1	06	01	15	006	Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga di Bidang Statistik	3. Indeks Ketimpangan Regional	Angka Indeks	0.31	0.32	0.314	0.31	100.00	0.310	0.31	97.39	
						4. PDRB per Kapita										
						a. Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rp	6.88	6.09	6.27	6.35	101.28	6.56	6.35	92.30	
						b. Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	16.07	13.20	13.28	14.85	111.82	14.61	14.85	92.41	
1	24															
1	26	01	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1. Ketersediaan Peraturan Perundangan Kearsipan	Produk Hukum	16.00	20.00	14	31.00	221.43	15	15.00	93.75	BPAD
1	26	01	15	008	Digitalisasi Arsip Elektronik	2. Rasio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis	Orang	½	20/33	1.0	2/3	133.33	1/2	1/2	100.00	BPAD
1	26	01	15	009	Penanganan Arsip Foto											BPAD
1	26	01	15	011	Penanganan Arsip Tekstual											BPAD
1	26	01	15	012	Pengkajian Dan Pengembangan Bidang Kearsipan											BPAD
1	26	01	15	013	Perlindungan Arsip Vital ¹⁾											BPAD

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 26 01 15 016	Penilaian Dan Penyusutan Arsip Tekstual											BPAD
1 26 01 15 022	Penilaian Dan Penyusutan Arsip Kartografi											BPAD
1 26 01 15	Penyusunan Pedoman Arsip Statis											BPAD
1 26 01 16	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah											BPAD
1 26 01 16 005	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip											BPAD
1 26 01 16 009	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan											BPAD
1 26 01 16 010	Perawatan Dan Pemeliharaan Arsip Statis ²⁾											BPAD
1 25	Komunikasi dan Informatika											
1 07 01 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Penyediaan Pelayanan dari <i>Government Centris</i> menuju <i>Cityzen Centris</i>	Persen	20.00	na	10	12.00	120.00	15.00	15.00	75.00	DISHUBKO MINFO
1 07 01 15 005	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi*	2. Penambahan Layanan Data Center DGS	Unit	23.00	13.00	5.00	9.00	180.00	4.00	26.00	113.04	DISHUBKO MINFO
1 07 01 15 006	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi*	3. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital terhadap Data dan Informasi Keseluruhan	persen	25.00	10.00	15.00	39.00	260.00	20.00	20.00	80.00	DISHUBKO MINFO
1 07 01 15 010	Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik*											DISHUBKO MINFO
1 07 01 15 011	Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Pengembangan Layanan Informasi											DISHUBKO MINFO
1 26	Perpustakaan											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
									Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)*
1	26	01	21		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
					Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah Perpustakaan Berbasis TI	Unit	30.00	19.00	20	21.00	105.00	25	25.00	83.33	BPAD
1	26	01	21	002	Pengembangan Minat Dan Budaya Baca ¹⁴⁾	2. Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk	Unit/orang	1 : 3000	1:3800	1:4000	1:2750	54.55	1:3500	1:3500	85.71	BPAD
1	26	01	21	004	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan ¹⁵⁾	3. Rasio Jumlah Pemustaka terhadap Jumlah Penduduk	Orang	1 : 1000	1:2000	1:1500	1:1200	75.00	1:1250	1:1250	80.00	BPAD
1	26	01	21	012	Kerjasama Perpustakaan Dengan Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah ¹⁶⁾	4. Jumlah Anggota Jaringan <i>Jogja Library</i>	PT	20.00	19.00	16	21.00	131.25	18	18.00	90.00	BPAD
1	26	01	21	013	Layanan Perpustakaan	5. Ketersediaan <i>Jogja Study Centre</i> (Rumah Belajar Modern)	Unit	5.00	1.00	3	2.00	66.67	4	4.00	80.00	BPAD
1	26	01	21	014	Lomba Perpustakaan Dan Minat Baca ¹⁷⁾	6. Ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan	Unit	1.00	0.00	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00	BPAD
1	26	01	21	016	Pelestarian Fisik Bahan Pustaka											BPAD
1	26	01	21	017	Pelestarian Informasi Bahan Pustaka											BPAD
1	26	01	21	018	Pembinaan Perpustakaan											BPAD
1	26	01	21	019	Pengadaan Bahan Pustaka ¹⁸⁾											BPAD
1	26	01	21	020	Pengelolaan Bahan Pustaka											BPAD
1	26	01	21	021	Pengembangan Jaringan Perpustakaan											BPAD
1	26	01	21	022	Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka ¹⁹⁾											BPAD
1	26	01	21	023	Pengembangan Koleksi Jogjasiana											BPAD
1	26	01	21	024	Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling											BPAD
1	26	01	21	025	Pengembangan Otomasi Bahan Pustaka											BPAD

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	26	01	21	026	Pengembangan Portal B P A D								BPAD			
1	26	01	21	027	Pengkajian Dan Pengembangan Bidang Perpustakaan ²⁰⁾								BPAD			
1	26	01	21	028	Publikasi Perpustakaan ²²⁾								BPAD			
1	26	01	21	030	Pengembangan Elektronik Book								BPAD			
1	26	01	21	034	Pengukuran Kepuasan Pelanggan								BPAD			
1	26	01	21	035	Penyusunan Bibliografi dan KID								BPAD			
1	26	01	15		Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan								BPAD			
1	26	01	15	001	Pembangunan Gedung Perpustakaan								BPAD			
1	26	01	15	004	Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Belajar Modern ²³⁾								BPAD			
1	26	01	15		Kajian Sarana dan Fasilitas Perpustakaan								BPAD			
1	26	01	15		Penyusunan Grand Design Pengembangan Perpustakaan Desa								BPAD			
					PILIHAN											
2	01				Pertanian											
2	01	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani											
2	01	01	15	009	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan	1. Nilai Tukar Petani	Persen	107.78	112.64	106.78	114.89	107.60	107.28	107.28	99.54	Distan
2	01	01	15	016	Pengembangan Hortikultura di Lokasi Integrated Farming	2. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	persen	0.72	-0.56	0.72	-0.37	-51.39	0.72	0.72	100.00	Distan
2	01	01	15	016	Pengembangan Hortikultura di Lokasi Integrated Farming	3. Peningkatan Produksi Hortikultura	persen	2.00	4.29	2.00	4.13	206.50	2.00	2.00	100.00	Distan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 01 01 15 017	Fasilitasi Dana Penguatan Modal Hasil Pertanian (DMPHP)	4. Peningkatan Populasi Ternak	persen	4.36	0.52	4.36	6.64	152.29	4.36	4.36	100.00	Distan
2 01 01 15 020	Pengembangan Kelembagaan Pasca Panen dan Pelaku Usaha Olahan Hasil Pertanian	5. Berkembangnya Aktivitas Kelembagaan Petani	Gapoktan	100.00	40.00	20.00	20.00	100.00	20.00	80.00	80.00	Distan
2 01 01 15 029	Pengembangan Perbenihan Padi di Tingkat Petani	6. Konversi Lahan	Persen	0.49	0.36	0.49	0.49	1.00	0.49	0.49	100.00	Distan
2 01 01 15 039	Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan	7. Luas Wilayah Produktif	Persen	26.33	26.33	26.33	59.92	2.28	26.33	26.33	100.00	Distan
2 01 01 15 041	Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani											Distan
2 01 01 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan											Distan
2 01 01 16 012	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian											Distan
2 01 01 16 021	Pengembangan Sistem Informasi Pasar											Distan
2 01 01 16 022	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan											Distan
2 01 01 16 035	Fasilitasi Sarana Produksi Tanaman Garut											Distan
2 01 01 16 041	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan											Distan
2 01 01 16 055	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Produksi Pertanian											Distan
2 01 01 16 058	Peningkatan Mutu Hasil Pertanian SNI (Pangan, Horti, Ternak)											Distan
2 01 01 16 045	Pengembangan Benih Hortikultura											Distan
2 01 01 16 054	Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai											Distan
2 01 01 16 057	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan											Distan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPDP tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 01 01 16 059	Pembenahan Lahan Pembibitan Unit Produksi Ngipiksari											Distan
2 01 01 16 050	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan											Distan
2 01 01 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian											Distan
2 01 01 17 007	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah											Distan
2 01 01 17 017	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian											Distan
2 01 01 17 021	Penyebarluasan Informasi Perbenihan											Distan
2 01 01 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian											Distan
2 01 01 18 023	Fasilitasi PENAS dan PEDAS											Distan
2 01 01 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian											Distan
2 01 01 19 010	Fasilitasi Subsidi Pupuk Organik											Distan
2 01 01 19 011	Operasional Laboratorium											Distan
2 01 01 19 015	Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jaringan Irigasi											Distan
2 01 01 19 018	Penerapan GPP Komoditas Unggulan											Distan
2 01 01 19 027	Bimb. dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi											Distan
2 01 01 19 037	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Berkelanjutan											Distan
2 01 01 19 038	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Pangan dan Horti											Distan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	01	01	19	042	Fasilitasi Lahan Pertanian Berkelanjutan							Distan
2	01	01	19	044	Pembinaan Pengedar dan Pengawasan Mutu Benih							Distan
2	01	01	19	045	Sertifikasi Padi, Palawija dan Bibit Ternak							Distan
2	01	01	19	046	Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka							Distan
2	01	01	19	047	Fasilitasi Sarana Laboratorium dan Lahan Praktek							Distan
2	01	01	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak							Distan
2	01	01	21	002	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis							Distan
2	01	01	21	006	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak							Distan
2	01	01	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan							Distan
2	01	01	22	005	Pengembangan Ternak Kambing							Distan
2	01	01	22	012	Pengembangan Ternak Sapi Perah							Distan
2	01	01	22	013	Pengembangan Ternak Sapi Potong							Distan
2	01	01	22	014	Pengembangan Ternak Unggas							Distan
2	01	01	22	016	Pengembangan Aneka Ternak							Distan
2	01	01	22	017	Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak							Distan
2	01	01	22	019	Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi							Distan
2	01	01	22	023	Pengembangan Pembibitan Ternak							Distan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
2	01	01	25									Distan				
2	01	01	25	006	Diklat Agribisnis Hortikultura							Distan				
2	01	01	25	010	Apresiasi Perencanaan Diklat							Distan				
2	01	01	25	011	Evaluasi Pasca Latihan							Distan				
2	01	01	25	012	Diklat Tata Guna Air Bagi Petugas							Distan				
2	01	01	25	015	Pengkajian Kediklatan							Distan				
2	01	01	25	016	Temu Teknis Teknologi Pertanian							Distan				
2	01	01	25	019	Pelatihan Kader Kesehatan Hewan							Distan				
2	01	01	25	021	Diklat Pemandu SLPHT dan SL Iklim							Distan				
2	01	01	25	025	Diklat Manajemen Kelembagaan Petani							Distan				
2	01	01	25	026	Diklat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian							Distan				
2	02				Kehutanan dan Perkebunan											
2	02	01	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1. Persentase Luas Hutan	Persen	6.00	5.87	6.00	5.87	97.83	6.00	6.00	100.00	Dishutbun
2	02	01	15	001	Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan										Dishutbun	
2	02	01	15	002	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi										Dishutbun	
2	02	01	15	007	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan										Dishutbun	
2	02	01	15	008	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan										Dishutbun	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
2	02	01	15	011	Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB								Dishutbun
2	02	01	15	012	Pelatihan SDM Penatausahaan Hasil Hutan								Dishutbun
2	02	01	15	013	Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan								Dishutbun
2	02	01	15	014	Peningkatan SDM Pengamanan Hutan								Dishutbun
2	02	01	15	016	Pengelolaan Hutan Terpadu Kerjasama Pemda DIY dengan Perguruan Tinggi								Dishutbun
2	02	01	15	019	Pengembangan Hutan Tanaman								Dishutbun
2	02	01	15	020	Optimalisasi Tegakan Kayu Putih								Dishutbun
2	02	01	15	022	Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih								Dishutbun
2	02	01	16		Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan								Dishutbun
2	02	01	16	002	Pembuatan Bibit/benih Tanaman Kehutanan								Dishutbun
2	02	01	16	005	Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan								Dishutbun
2	02	01	16	006	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan								Dishutbun
2	02	01	16	008	Pemeliharaan Kebun Pangkas								Dishutbun
2	02	01	16	010	Rehabilitasi Hutan Konservasi								Dishutbun
2	02	01	16	011	Gerakan Cinta Hutan								Dishutbun
2	02	01	16	012	Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Konservasi S D A								Dishutbun
2	02	01	16	013	Pengembangan Hutan Rakyat								Dishutbun

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
2	02	01	16	015	Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan*								Dishutbun
2	02	01	17		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan								Dishutbun
2	02	01	17	001	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan								Dishutbun
2	02	01	17	005	Pengamanan Hutan								Dishutbun
2	02	01	17	007	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan								Dishutbun
2	02	01	17	008	Operasional Perlindungan Hutan								Dishutbun
2	02	01	19		Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan								Dishutbun
2	02	01	19	006	Penatausahaan Dan Penerbitan Peredaran Hasil Hutan								Dishutbun
2	02	01	19	007	Audit Peredaran Hasil Hutan Dan Industri Primer								Dishutbun
2	02	01	26		Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan								Dishutbun
2	02	01	26	002	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan								Dishutbun
2	02	01	26	004	Pengembangan Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal								Dishutbun
2	02	01	27		Program Peningkatan Pemasaran Dan Distribusi Hasil Perkebunan								Dishutbun
2	02	01	27	001	Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah								Dishutbun
2	02	01	28		Program Pemanfaatan Teknologi Dan Peningkatan Produksi Perkebunan								Dishutbun
2	02	01	28	001	S L - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Dana Cukai)								Dishutbun
2	02	01	28	002	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Lahan Dan Air								Dishutbun

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPDP tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
2	02	01	28	005	Intensifikasi Tanaman Perkebunan Pada Lahan Marginal							Dishutbun				
2	02	01	28	006	Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (Dana Cukai)							Dishutbun				
2	02	01	28	007	Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu							Dishutbun				
2	02	01	28	008	Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan Sesuai GAP (Dana Cukai)							Dishutbun				
2	02	01	28	011	Pemeliharaan Kebun Dinas							Dishutbun				
2	02	01	28	012	Pengembangan Agenia Hayati dan Pestisida Nabati							Dishutbun				
2	02	01	28	013	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan							Dishutbun				
2	02	01	28	015	Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Benih Perkebunan							Dishutbun				
2	02	01	28	018	Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan							Dishutbun				
2	02	01	28	019	Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan							Dishutbun				
2	02	01	28	020	Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul / Lokal (Dana Cukai)							Dishutbun				
2	02	01	28	021	Rehabilitasi Tanaman Perkebunan							Dishutbun				
2	02	01	28	022	S L - P H T Komoditas Tembakau (Dana Cukai)							Dishutbun				
2	03				Energi dan Sumberdaya Alam Mineral											
2	03	01	15		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	1. Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Persen	0.09	0.04	0.020	0.02	100.00	0.015	0.08	83.33	DPUESDM

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 03 01 15 007	Koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan lintas propinsi	2. Peningkatan Kapasitas Energi Listrik	Persen	1.50	0.60	0.30	1.33	443.33	0.30	2.23	148.67	DPUESDM
2 03 01 15 012	Pemetaan geologi teknik dan wilayah pertambangan	3. Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air	Persen	30.00	12.00	6.00	8.00	133.33	6.00	26.00	86.67	DPUESDM
2 03 01 18	Program Pengelolaan air tanah berwawasan konservasi	4. Tersedianya Informasi Publik Bagi Kelompok Strategis	Jmlh kelompok	15.00	na	10.00	na		13.00	13.00	86.67	DPUESDM
2 03 01 18 002	Pembangunan sarana pemantauan Air Tanah											DPUESDM
2 03 01 18 003	Pembinaan dan Pengendalian Pengambilan air Tanah											DPUESDM
2 03 01 18 004	Pendayagunaan Air Tanah Di Daerah Sulit Air											DPUESDM
2 03 01 18 007	Penyusunan Desain Pemboran Air Tanah											DPUESDM
2 03 01 20	Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan energi											DPUESDM
2 03 01 20 001	Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola energi terbarukan											DPUESDM
2 03 01 20 002	Pengembangan biogas untuk masyarakat pedesaan											DPUESDM
2 03 01 20 003	Penyusunan rencana umum energi											DPUESDM
2 03 01 20 004	Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan											DPUESDM
2 03 01 20 005	Rehabilitasi/pemeliharaan pembangkit listrik energi terbarukan											DPUESDM
2 03 01 20 006	Rehabilitasi/pemeliharaan pembangkit listrik energi terbarukan											DPUESDM
2 03 01 21	Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar											DPUESDM

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 03 01 21 001	Penyusunan Detail Desain Energi Terbaru											DPUESDM
2 03 01 21 002	Pemanfaatan energi alternatif untuk IKM											DPUESDM
2 03 01 21 003	Pengawasan bahan bakar bersubsidi											DPUESDM
2 03 01 21 004	Pengawasan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan usaha Bahan Bakar dan Energi											DPUESDM
2 03 01 21 005	Pengembangan bahan bakar nabati											DPUESDM
2 03 01 23	Program Pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan											DPUESDM
2 03 01 23 001	Fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan Pemenuhan listrik											DPUESDM
2 03 01 23 002	Pembangunan pembangkit listrik											DPUESDM
2 03 01 23 003	Pembangunan jaringan listrik pedesaan											DPUESDM
2 03 01 23 004	Peningkatan kinerja pengelola bidang energi dan ketenagalistrikan											DPUESDM
2 03 01 23 005	Penyediaan sistem informasi energi dan ketenagalistrikan											DPUESDM
2 03 01 23 006	Perbaikan, pemeliharaan, dan pemindahan pembangkit listrik											DPUESDM
2 03 01 23 007	Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan											DPUESDM
2 04	Pariwisata											
2 04 01 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3.00	2.40	2.20	1.82	82.73	2.60	2.60	86.67	Dispar
2 04 01 15 001	Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	2. Jumlah Wisatawan	Orang	2,049,211.00	1,710,910	1,554,555.00	1,607,194.00	103.39	1,881,011	1,881,011.00	91.79	Dispar

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPDP tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPDP tahun 2011	Realisasi RKPDP tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
2	04	01	15	002	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata*	a. Wisnus	Orang	1,861,906.00	1,538,765	1,398,877.00	1,437,629.00	102.77	1,692,642	1,692,642.00	90.91	Dispar
2	04	01	15	003	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata*	b. Wisman	Orang	207,205.00	171,425	155,678.00	169,565.00	108.92	188,369	188,369.00	90.91	Dispar
2	04	01	15	005	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	3. Jumlah MICE	Satuan	6,588.00	5,445	4,950.00	8,693.00	175.62	5,990	5,990.00	90.92	Dispar
2	04	01	15	007	Pengembangan Statistik Kepariwisata	4. Jumlah Desa Wisata	Satuan	50.00	47	45.00	54.00	120.00	49	49.00	98.00	Dispar
2	04	01	15	008	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	5. PAD Pariwisata DIY	Milyar Rp	98.70	81.57	74.16	96.78	130.50	89.73	89.73	90.91	Dispar
2	04	01	15	009	Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Kepariwisata*	6. Tingkat Hunian Hotel	Persen	75.00	65.00	60.00	45.33	75.55	70.00	70.00	93.33	Dispar
2	04	01	15	010	Penyusunan dan Penerbitan Tabloid Pariwisata*											Dispar
2	04	01	15	011	Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata*											Dispar
2	04	01	15	012	Penyelenggaraan Fam Tour*											Dispar
2	04	01	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata											Dispar
2	04	01	16	002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata											Dispar
2	04	01	16	007	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi*											Dispar
2	04	01	16	008	Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona*											Dispar
2	04	01	16	011	Pengembangan Desa Wisata*											Dispar
2	04	01	17		Program Pengembangan Kemitraan											Dispar
2	04	01	17	001	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database											Dispar

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 04 01 17 002	Pengembangan dan Penguatan Litbang Kebudayaan dan Pariwisata*											Dispar
2 04 01 17 005	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata*											Dispar
2 04 01 17 010	Fasilitas Penyelenggaraan Atraksi Kesenian											Dispar
2 04 01 17 011	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata											Dispar
2 04 01 17 012	Fasilitas Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pelaku Wisata*											Dispar
2 04 01 17 013	Fasilitas Penyelenggaraan Event Kepariwisata*											Dispar
2 04 01 17 015	Penyelenggaraan Event Kepariwisata*											Dispar
2 05	Kelautan dan Perikanan											Dislautkan
2 05 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1. Jumlah Kelompok Wanita Nelayan	Kelompok	80.00	50.00	60	60.00	100.00	70	70.00	87.50	Dislautkan
2 05 01 15 001	Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir	2. Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya di Lahan Marginal	persen	12.00	5.00	7.00	9.00	128.57	10.00	10.00	83.33	Dislautkan
2 05 01 16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	3. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	Kelompok	40.00	25.00	30	35.00	116.67	35	35.00	87.50	Dislautkan
2 05 01 16 004	Optimalisasi dan Pengembangan Siswasmas	4. Peningkatan Jumlah Masyarakat Pesisir yang Diberdayakan	persen	40.00	25.00	30	30.00	100.00	35	35.00	87.50	Dislautkan
2 05 01 17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	5. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	32,035.00	20,743.00	24,239	42,000.00	173.27	28,338	28,338.00	88.46	Dislautkan
2 05 01 17 002	Fasilitas Perijinan Perikanan Tangkap dan Budidaya	6. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7,425.00	5,694.00	6,039	5,000.00	82.80	6,875	6,875.00	92.59	Dislautkan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RPKD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RPKD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)					
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
2	05	01	18		Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut	7. Konsumsi Ikan per Kapita	Kg/kapita /th	20.81	18.66	19.40	23.01	118.61	20.30	20.30	97.55	Disloutkan
2	05	01	18	002	Pembinaan Mitigasi Bencana pada Masyarakat	8. Luas Potensi Lahan yang Dimanfaatkan	persen	10.00	4.00	6.00	12.00	200.00	8.00	8.00	80.00	Disloutkan
2	05	01	19		Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	9. Luasan Kawasan Konservasi, Restocking, Resensing	persen	20.00	5.00	10.00	15.00	150.00	15.00	15.00	75.00	Disloutkan
2	05	01	19	003	Pengembangan Jiwa Kebaharian	10. Peningkatan Jumlah Nelayan dan Pembudidaya	Persen	40.00	10.00	20	20.00	1.00	30	30.00	75.00	Disloutkan
2	05	01	19	004	Penyelenggaraan Hari Nusantara (sarasehan bersih pantai, seminar)	11. Peningkatan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Persen	90.00	45.00	60	60.00	1.00	75	75.00	83.33	Disloutkan
2	05	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	12. Peningkatan Jumlah Generasi Muda Cinta Bahari	Persen	22.00	13.00	16	16.00	1.00	19	19.00	86.36	Disloutkan
2	05	01	20	003	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan											Disloutkan
2	05	01	20	004	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan											Disloutkan
2	05	01	20	006	Pembinaan Mutu Benih dan Induk Perikanan dalam rangka YSC											Disloutkan
2	05	01	20	007	Pengemb. Induk, calon Induk dan bibit unggul di unit Budidaya Air Tawar											Disloutkan
2	05	01	20	009	Pengemb Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut											Disloutkan
2	05	01	20	010	Pengemb Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau											Disloutkan
2	05	01	20	016	Pengembangan seed center perikanan											Disloutkan
2	05	01	20	017	Optimalisasi pemanfaatan pakan ikan alternatif											Disloutkan
2	05	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap											Disloutkan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2012	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2012 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 05 01 21 009	Pengembangan pelabuhan perikanan											Disloutkan
2 05 01 21 011	Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil											Disloutkan
2 05 01 21 012	Peningkatan Pelayanan PPP Sadeng											Disloutkan
2 05 01 21 014	Uji coba pengembangan teknologi alat penangkapan ikan											Disloutkan
2 05 01 21 015	Pengadaan kapal 30 GT bagi nelayan (DAK)											Disloutkan
2 05 01 22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan											Disloutkan
2 05 01 22 002	Pengembangan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan											Disloutkan
2 05 01 22 004	Pengembangan kelembagaan penyuluh swadaya											Disloutkan
2 05 01 22 005	Pengembangan kelembagaan kelompok kelautan dan perikanan											Disloutkan
2 05 01 22 007	Pengembangan kader nelayan											Disloutkan
2 05 01 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan											Disloutkan
2 05 01 23 003	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)											Disloutkan
2 05 01 23 004	Monitoring dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan											Disloutkan
2 05 01 23 008	Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan											Disloutkan
2 05 01 23 010	Promosi perikanan dan kelautan / pameran											Disloutkan
2 05 01 23 015	Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan dan Kelautan											Disloutkan
2 05 01 23 016	Optimalisasi pemasaran produk perikanan											Disloutkan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2013	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2010	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2011			Target program / kegiatan RKPDP tahun berjalan (tahun 2012)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
										Target RKPD tahun 2011	Realisasi RKPD tahun 2011	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
2	05	01	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar											Dislautkan
2	05	01	24	004	Pengembangan Rekayasa teknologi Budidaya Air Laut Sundak											Dislautkan
2	05	01	24	005	Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar											Dislautkan
2	05	01	24	06	Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Payau											Dislautkan
2	05	01	25		Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam											Dislautkan
2	05	01	25	005	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir											Dislautkan

2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam pembangunan. Berikut adalah rangkuman permasalahan pembangunan dari masing-masing urusan.

A. URUSAN WAJIB

1. URUSAN PENDIDIKAN

- a) Faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua siswa yang masih rendah sehingga tidak bisa mempertahankan anaknya untuk bersekolah
- b) Pembinaan pendidikan inklusi belum optimal
- c) Penanganan anak kebutuhan khusus belum optimal
- d) Pembinaan SDM Pendidikan belum optimal
- e) Menurunnya minat baca siswa dan generasi muda
- f) Masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan yang agak tinggi kepada orang tua
- g) Keyakinan masyarakat terhadap sekolah masih lebih rendah dibandingkan dengan bimbingan belajar terutama dalam menghadapi ujian nasional yang menggambarkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah belum berkualitas dan mantap
- h) Sikap mental kejujuran, kepercayaan diri dan tanggungjawab siswa/generasi muda masih lemah/rendah
- i) Belum ada standar/acuan bagi sekolah dalam penyusunan RAPBS
- j) Penurunan minat pelajar/mahasiswa untuk belajar di Yogyakarta karena mahalnya biaya pendidikan.

2. URUSAN KESEHATAN

- a) Derajat kesehatan Provinsi DIY telah berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DIY perlu mewaspadaai hal terkait program kesehatan yang akan memiliki tantangan tersendiri mengingat permasalahan kesehatan semakin variatif dan kompleks dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat kecenderungan stagnasi perbaikan dalam pencapaian indikator baik indikator AKI, AKB maupun AKABA.
- b) Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja karena permasalahan kesehatan banyak dipengaruhi dari berbagai masalah di luar kesehatan, sehingga perlu dukungan dari berbagai sektor di luar kesehatan. Peran sektor swasta dan sektor pemerintah di luar kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan, masih belum optimal.
- c) Masih terdapat prevalensi gizi buruk di DIY. Hal tersebut sejalan dengan realita bahwa kemiskinan di DIY masih cukup tinggi. Selain itu terjadi kecenderungan meningkatnya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih.
- d) Implementasi Pola Hidup Bersih dan Sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Implementasi tersebut

melibatkan beberapa aspek diantaranya pola makan keluarga, kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, penggunaan obat, jaminan kesehatan dan lain sebagainya yang perlu ditingkatkan.

- e) Implementasi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di Provinsi DIY memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
- f) Sistem rujukan kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan kasus rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit semakin meningkat.
- g) Kemampuan anggaran yang belum merata berpengaruh pencapaian target pembangunan kesehatan.
- h) Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan jiwa di Provinsi DIY :
 - 1) Masalah kesiapan keluarga pasien menerima kembali paska perawatan di RS Ghrasia.
 - 2) Selisih klaim Jamkesda / Jamkesos pasien yang bermasalah sehingga mengakibatkan piutang rumah sakit tidak tertagih.
 - 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang masalah kesehatan jiwa dan deteksi dini-nya. Masyarakat baru memahami masalah kesehatan jiwa terbatas pada masalah gangguan jiwa (psikotik.)

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- a) Letusan erupsi Gunung Merapi yang terjadi tahun 2010 menyebabkan perubahan kualitas air sungai, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, serta perubahan bentang lahan terutama di daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu yang panjang. Pemulihan kondisi seperti semula secara alami akan memerlukan waktu yang cukup panjang serta sumberdaya yang besar.
- b) Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- c) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kesadaran dan keterlibatan berbagai pihak, lintas pelaku, lintas wilayah administrasi serta lintas kepentingan. Tanpa adanya keterlibatan aktif dan keterpaduan secara luas dari berbagai pihak, maka tingkat keberhasilannya relatif kecil.
- d) Pola pikir, sikap dan prilaku sebagian besar warga kita yang masih belum berorientasi kuat dan mengedepankan aspek lingkungan. Kondisi ini menyebabkan program pengelolaan lingkungan hidup tidak cepat mendapat respon positif dan berkembang di masyarakat.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
 - a) Adanya keterbatasan sumber air baku air minum di Provinsi DIY, khususnya yang selama ini menggantung pada sumber mata air di wilayah terdampak erupsi Merapi
 - b) Kontribusi pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang tanggung jawab utama penanganan drainase belum maksimal
 - c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan cakupan pelayanan air limbah terpusat.
 - d) Manajemen jasa pengujian belum optimal
 - e) Belum optimalnya pemahaman pihak-pihak terkait terhadap regulasi jasa konstruksi
 - f) Belum optimalnya penyediaan data dan updating terbaru terkait informasi permukiman dan bahan bangunan

5. URUSAN PENATAAN RUANG
 - a) Rencana Tata Ruang Provinsi DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
 - b) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 - a) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
 - b) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan;
 - c) Belum optimalnya hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan karena masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing SKPD.
 - d) Belum optimalnya Koordinasi/kerjasama antar sektor dan antar daerah (kabupaten/kota);
 - e) Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
 - f) Belum optimalnya evaluasi perencanaan pembangunan terhadap perencanaan pembangunan kabupaten/kota
 - g) Belum adanya tenaga fungsional perencana di Bappeda.

7. URUSAN PERUMAHAN
 - a) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan
 - b) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung

- c) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- a) Belum adanya bantuan permodalan untuk pemuda sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan;
 - b) Sarana latihan para atlet semakin berkurang;
 - c) Pembibitan atlet masih memerlukan optimalisasi;
 - d) Sikap mental atlet seperti sportifitas, disiplin dan semangat juang masih rendah.
9. URUSAN PENANAMAN MODAL
- a) Identifikasi potensi investasi sektor unggulan di Provinsi DIY masih memerlukan telaah lebih lanjut.
 - b) Peluang-peluang investasi yang sudah ada belum detail dan jelas.
 - c) Permasalahan lahan, di mana umumnya masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah minimnya ketersediaan tanah/lahan terkait dengan luas wilayah DIY yang sempit dan harga tanah di Yogyakarta yang cenderung semakin mahal.
 - d) Belum adanya aturan khusus terkait peningkatan iklim investasi di Provinsi DIY.
 - e) Kurangnya koordinasi antar *stakeholder* penanaman modal di Provinsi DIY dalam melaksanakan perencanaan investasi (sebagai contoh : program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kulon progo yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan)
 - f) Perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan pameran investasi yang dikoordinir oleh BKPM RI.
 - g) Belum semua perusahaan (investor) yang terdaftar, merealisasikan investasinya di DIY.
 - h) Aliran listrik yang tidak stabil (sering padam secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu), menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian karena gangguan proses produksi dan komunikasi
10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
- a) Sektor Koperasi
 - 1. Pembina Teknis Koperasi
 - a) Kurangnya tenaga untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan koperasi, tim verifikasi dan proses badan hukum koperasi, penilai kesehatan koperasi, penilai pemeringkatan koperasi, pembinaan kelembagaan, pembinaan usaha, monitoring dan evaluasi.
 - b) Belum adanya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, padahal organisasi koperasi banyak bersentuhan dan rentan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata.

2. Gerakan Koperasi
 - a. Pengurus dan pengelola koperasi rata-rata masih belum profesional dalam pengelolaan kegiatan usaha dan kurang memahami kewirausahaan
 - b. Belum semua koperasi melaksanakan kemitraan usaha antar koperasi yang sebenarnya potensinya cukup besar
 - c. Pengurus koperasi rata-rata belum mampu memanfaatkan dan menangkap peluang usaha serta belum mampu mencari terobosan usaha baru

b) Sektor Usaha Kecil dan Menengah.

Permasalahan–permasalahan UMKM yang masih dirasakan dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan, ketrampilan, pengetahuan UMKM untuk mengelola usahanya.
2. Lemahnya UMKM untuk mengakses Permodalan ke Lembaga Keuangan Bank /Non Bank karena terbatasnya Pengetahuan dan Pemenuhan persyaratan yang harus di penuhi oleh UMKM.
3. Belum semua UMKM memahami pentingnya HAKI dan sertifikasi halal.
4. Lemahnya pengetahuan terhadap proses ekspor produk UMKM ke luar negeri/ kerjasama dengan buyer dan terkendalanya bahasa asing yang dikuasainya.
5. Laporan perkembangan data UMKM dari Kab/Kota secara periodik belum dapat terpenuhi.

c) Sektor Pembiayaan Perekonomian Syari'ah

Dalam upaya untuk mengembangkan KUMKM ada beberapa kendala antara lain sulitnya mengakses sumber-sumber pembiayaan dan permodalan serta terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal yang dimiliki.

Realita menunjukkan bahwa sumber pembiayaan yang berasal dari Perbankan dalam memperkuat permodalan usaha yang dikembangkan relatif masih kecil. Perbankan masih terikat kepada beberapa persyaratan klasik yang mempersulit KUKM di dalam memperoleh sumber permodalan. Karakteristik yang melekat pada KUKM seringkali dijadikan alasan untuk menjatuhkan KUKM dengan Perbankan dan sebagian KUKM masih belum menggunakan manajemen modern dan Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga mempersulit/menghambat akses KUKM bermitra dengan lembaga lain termasuk lembaga keuangan Perbankan/non Perbankan.

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a) Masih adanya perbedaan data orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas /Izin Tinggal Tetap (ITAS/ITAP) antar instansi yang berwenang.

- b) Masih terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk agama non Islam.
- c) Aplikasi SIAK yang merupakan sistem program yang bersifat nasional sering menemui berbagai kendala.
- d) Jaringan komunikasi database kependudukan khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki topografi pegunungan belum terkoneksi dengan baik.
- e) Petugas Registrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan dan operator SIAK di kecamatan, kota dan kabupaten saat ini masih sering dipindah tugas ke tempat lain, sehingga petugas baru perlu mendapat pelatihan pengoperasian SIAK.
- f) Masih terbatasnya pemahaman pelaksana administrasi kependudukan mengenai SIAK secara *on line* dan jaringan komunikasi database kependudukan bagi petugas kecamatan, kota/kabupaten, provinsi. Belum terwujudnya jaringan komunikasi database kependudukan secara nasional.

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

- a) Data penganggur yang tidak berdasar nama (by name) atau kurang akurat, serta sistem informasi pendukung yang kurang menyebabkan sulitnya mendata calon peserta kegiatan.
- b) Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan.
- c) Kurangnya semangat dan inovasi kewirausahaan para pencari kerja maupun buruh atau pengusaha kecil, sehingga perluasan kesempatan kerja belum dapat maksimal, sementara penempatan kerja masih tergantung pada investor yang masuk.
- d) Produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah.
- e) Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja.
- f) Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (community development) maupun tanggung jawab sosial (social responsibility) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

- a) Perlunya pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak.
- b) Masih munculnya kesulitan dalam pendataan keluar masuk bahan pangan dari dan ke DIY karena data yang diperoleh dari jembatan timbang masih sangat terbatas baik komoditas maupun keakuratan datanya.
- c) Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman (3BA).

- d) Masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu.
- e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengkonsumsi/memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan bermartabat.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a) Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
- b) Pemahaman aparat tentang penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG masih rendah.
- c) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani P2TPA dari tahun ke tahun semakin meningkat (tahun 2008 : 120 kasus, tahun 2009 : 135 kasus, tahun 2010 : 125 kasus dan tahun 2011 : 140 kasus. 60% dari korban kekerasan terhadap perempuan berlatar belakang masalah ekonomi.
- d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak (UUPA, UUPKDRT, UUPTPPO)

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

- a) Masih adanya duplikasi kelembagaan KB di daerah, yaitu BPPM sebagai lembaga yang mengampu Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di daerah (PP 38/2007) dan perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan instansi vertikal dengan urusan yang sama.
- b) Rendahnya partisipasi pria terhadap program KB dan Kesehatan Reproduksi, serta masih dominannya pemakaian kontrasepsi dengan metode sederhana misalnya melalui Pil dan Suntik.
- c) Rendahnya tingkat pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi, hal ini dapat dilihat dari hasil survei perilaku KRR (BPPM-2011) bahwa 84,20% remaja menyatakan perlu pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah.
- d) Program penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan BKB mengalami penurunan akibat kurang tersosialisasikannya secara merata, rutin dan berkesinambungan.

16. URUSAN PERHUBUNGAN

- a) Dari capaian indikator kinerja yang ada, indikator yang belum tercapai yaitu belum tercapainya load factor angkutan umum. Hal ini disebabkan karena dari 3 jenis moda pelayanan angkutan umum yang ada (AKDP, Perkotaan dan Trans Jogja), hanya layanan Trans Jogja yang dapat mencapai target. Untuk angka rata-rata, layanan Trans Jogja diharapkan dapat meningkatkan load factor penggunaan angkutan umum secara keseluruhan.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a) Pelaksanaan Program DGS belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya Program DGS di setiap SKPD
- b) Kondisi jaringan masih lemah dikarenakan masih sangat tergantung dengan pihak lain
- c) Kurang optimalnya fungsi Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi (TiMPII) DGS
- d) SDM yang memiliki kemampuan TI relatif sedikit.

18. URUSAN PERTANAHAN

- a) Belum adanya kepastian hak pemanfaatan tanah baik SG, PAG dan Tanah Kas Desa karena pengaturan tentang pertanahan yang masuk dalam RUUK DIY masih dalam pembahasan di DPR RI.
- b) Kurang lancarnya proses pengumpulan berkas pendaftaran tanah di Desa Glagaharjo, sehingga dari target 500 sertifikat hanya tercapai 428 sertifikat sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- c) Masih banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, belum semua permasalahan yang masuk bisa ditangani, baru 40 permasalahan yang bisa ditangani pada 2011.
- d) Masih ada kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, serta masih ditemuinya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonannya.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

- a) Dinamika kehidupan dan mobilitas kegiatan orang asing pemegang KITAS/KITAP yang cukup tinggi dan kompleks dengan segala aktivitasnya yang tidak hanya berada di DIY, tetapi mobilitas mereka sampai di luar Yogyakarta tidak selalu dapat terpantau
- b) Belum adanya keterpaduan antar daerah dalam rangka melakukan koordinasi dan saling tukar menukar informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan keberadaan orang asing didaerahnya masing-masing.
- c) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing pemegang surat pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam negeri tidak seluruhnya melaporkan pelaksanaan kegiatan penelitian di DIY, oleh karena itu pemantauan kegiatan penelitian oleh orang asing di daerah tidak seluruhnya dapat terpantau.
- d) Data orang asing pemegang visa kunjungan singkat seperti kunjungan wisata ke Yogyakarta dengan pintu masuk tidak melalui Yogyakarta sulit di peroleh data yang akurat karena keberadaan mereka hanya tercatat di hotel tempat menginap, sedangkan pihak hotel tidak melaporkan data tersebut kepada instansi resmi pemerintah

- e) DIY belum memiliki tempat penampungan imigran atau yang dikenal dengan Rumah Deteksi Imigran (Rudenim) sehingga ketika terjadi ada imigran ilegal yang tertangkap akan mengalami kesulitan untuk penempatannya.
- f) Masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian imigran ilegal.
- g) Kasus pencurian kendaraan bermotor masih merupakan kasus yang menonjol. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal diantaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial.
- h) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya diperlukan peningkatan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- i) Terdapat Perda Provinsi yang perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini khususnya yang menyangkut sanksi pidana dan besaran denda.
- j) Permasalahan perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

a) Otonomi Daerah

1. Substansi PP 38 Tahun 2007 belum implementatif masih menimbulkan multitafsir karena bahasa antara bidang urusan satu dengan bidang yang lain berbeda-beda ada yang menggunakan bahasa program dan ada yang menggunakan bahasa kegiatan. Juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh sektor atau kementerian masih ada yang tidak sinkron dengan PP 38 Tahun 2007 sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Petunjuk operasional PP 38 Tahun 2007 seperti NSPK dan SPM sangat terlambat keluarnya, bila ada/telah keluar tidak disosialisasikan ke daerah-daerah.
2. Duplikasi peran dengan instansi vertikal (Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY), ketidakjelasan peran, tugas dan fungsi dari BPPM Provinsi DIY dalam pelaksanaan program KB dan KS, karena kegiatan yang seharusnya menjadi kewenangan Provinsi DIY sebagian besar telah dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi DIY.
3. Berpedoman pada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 54 bahwa Pemerintah Daerah membentuk BKKBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kondisi saat ini BKKBD di Provinsi DIY belum terbentuk.
4. Indikator dan subindikator penilaian perlombaan desa yang kurang representatif. Poin utama perlombaan desa pada dasarnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Namun skor penilaian penilaian dari bidang tersebut hanya sebesar 25.

5. Aplikasi komputer pendukung dalam rangka penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat nasional belum berfungsi secara maksimal.
- b) Pemerintahan Umum
1. Tata Pemerintahan
 - a RUUK DIY sampai saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI, yang memasuki masa sidang perpanjangan ke II periode Januari 2012–April 2012, sehingga target kinerja tahun 2011 berupa 1 Undang-undang tentang Keistimewaan Yogyakarta belum dapat terealisasi.
 - b Dengan belum selesainya pembahasan RUUK DIY maka kegiatan sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan target kinerja sosialisasi terhadap 100 orang belum dapat dilaksanakan.
 2. Biro Organisasi

Adanya peraturan pusat yang memerlukan tindak lanjut di daerah, antara lain :

 - a Kelembagaan
 1. Amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berpengaruh terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Kesbanglinmas. Susunan organisasi Badan Kesbanglinmas yang sebelumnya terdapat bidang Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana perlu disesuaikan.
 2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini menjadi urusan Badan Kesbanglinmas akan dialihkan menjadi fungsi Satpol PP.
 3. UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, mengamanatkan bahwa arsip inaktif kurang dari 10 tahun dikelola oleh masing masing SKPD, sehingga susunan organisasi BPAD yang memuat Bidang Arsip Dinamis perlu dievaluasi;
 4. Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) di Daerah, ditindaklanjuti dengan pembentukan Gerai P2T sehingga susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada BKPM perlu dievaluasi;
 5. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 061/1255/SJ tanggal 7 April 2011 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Surat

Mendagri Nomor 061/294/SJ tanggal 1 Februari 2012 perihal Perubahan Nomenklatur Kementerian yang mengamanatkan agar evaluasi kelembagaan daerah menunggu perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 41 tahun 2007.

- b. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 baru berdasarkan kinerja instansi dan disiplin pegawai, belum menggambarkan kinerja pegawai.
 - c. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pelayanan publik sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Biro Hukum
- a. Untuk tenaga legal drafting (fungsional tertentu) belum sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Banyak peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah berupa Peraturan Gubernur yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD.
4. Inspektorat
- a. Jumlah pemeriksa/auditor yang ada tidak sebanding dengan beban kerja.
 - b. Terkait dengan pertimbangan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya terbatas pada hasil audit atas Laporan Keuangan, tetapi juga terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK.
 - c. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu APIP harus terus melakukan perubahan guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - d. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang begitu cepat, sehingga menuntut para auditor di Inspektorat Provinsi DIY untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai pengawas.
5. Biro Administrasi Pembangunan
- a. Implementasi dalam pelaksanaan Bagian Penelitian dan Pengembangan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi DIY banyak menemui hambatan yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Belum seluruh instansi yang melakukan penelitian atau lembaga penelitian di perguruan tinggi negeri maupun swasta bersedia

- mengirimkan atau memberikan hasil-hasil penelitian ke Pemerintah Provinsi DIY.
- c Hasil-hasil penelitian yang sudah dikirimkan sebagian besar kurang implementatif bagi Pembangunan Daerah Provinsi DIY, hal ini disebabkan karena penelitian yang dilakukan di lembaga penelitian perguruan tinggi negeri maupun swasta banyak pada penelitian-penelitian ilmu murni, sehingga terlalu teoritis keilmuan saja.
 - d Banyak hasil-hasil penelitian terapan/tepat guna yang belum terdata sehingga masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat untuk bisa dimanfaatkan.
 - e Belum kuatnya kedudukan lembaga penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota, menyebabkan tidak optimal dalam memonitor kegiatan penelitian yang tidak terpantau. Hal ini juga berakibat pada litbang Provinsi yang tidak dapat mengetahui secara pasti kegiatan penelitian yang dilaksanakan di kabupaten/kota.
 - f Minimnya hasil penelitian yang sesuai dengan tema pembangunan dan implementatif bagi pembangunan di Provinsi DIY.
6. Biro Administasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- a Kelembagaan yang mengatur mengenai perizinan dirasa belum memadai, mengingat banyaknya jenis perizinan yang harus ditangani dan memerlukan spesifikasi kemampuan yang cukup spesifik bagi pengampunya
 - b Perkembangan UKM yang terhambat akibat keterbatasan penyaluran dana baik berupa bantuan maupun pinjaman oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diakibatkan oleh status yang masih berupa Perusahaan Daerah (PD).
 - c Belum ada kesepemahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi prakiraan kondisi yang akan datang, yang diakibatkan oleh perubahan status BPD
 - d Peran Penyuluh dalam melakukan bimbingan teknis kepada petani/peternak/petani ikan/petani kehutanan/petani kebun belum optimal.
7. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- a Munculnya penyakit yang bersumber pada binatang (leptospirosis) yang menjangkiti masyarakat.
 - b Penanganan lansia belum optimal.
 - c Pelayanan penempatan dan perlindungan bagi TKI belum optimal.
 - d Penempatan transmigran dan sarana serta prasarana pendukung pengembangan wilayah transmigrasi lokal belum memadai.

- e Belum terbentuknya Tim Koordinasi Program Keluarga Berencana tingkat Provinsi DIY sehingga pelaksanaan keterpaduan/kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait belum optimal
 - f Belum validnya data tentang Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Raskin
 - g Belum maksimalnya kesadaran bagi umat muslim untuk melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh dan belum optimalnya pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh
 - h Belum optimalnya penegakan regulasi hukum berkaitan dengan kedisiplinan bagi para pemilik kos/pondokan bagi pelajar dan mahasiswa
8. Biro Umum
- a Jumlah petugas protokol yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah penerimaan tamu, kegiatan kunjungan Gubernur ke Daerah, dan kegiatan acara resmi yang dihadiri Gubernur DIY.
 - b Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah dan masih bersifat umum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, sehingga menuntut petugas protokol untuk menyesuaikan.
 - c Pengelolaan Pengelolaan informasi yang berkembang di media massa sebagai dampak dari persaingan antar media dan kebebasan media yang masih perlu diimbangi dengan SDM media yang berkualitas. Media elektronik, yaitu televisi masih terjebak pada pemberitaan yang cenderung bombastis, tanpa memperhitungkan dampak psikologis masyarakat misalnya dalam pemberitaan tentang bencana erupsi Merapi.
 - d Frekuensi pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi.
9. Sekretariat DPRD
- a Untuk mendukung tugas dan fungsi dalam rangka pelayanan terhadap kegiatan DPRD Provinsi DIY, maka baik kualitas dan kuantitas SDM masih kurang sesuai kebutuhan.
 - b Masih terdapat pegawai yang belum memiliki kemampuan teknis / keterampilan yang mencukupi sesuai bidang tugasnya, misalnya dalam hal jurnalisme, web, audio visual, komputer, kemampuan dalam berbahasa Inggris, akuntansi, listrik dan sound system.
 - c Kesadaran disiplin meningkatkan kinerja masih dirasakan kurang.
 - d Perubahan Pola pikir, sikap dan transformasi birokrasi masih memerlukan waktu.

10. Administrasi Keuangan Daerah
 - a Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah.
 - b Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi.
 - c Dana Perimbangan yang masih bersifat given.
 - d Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.
 - e Belum semua SKPD yang mempunyai pendapatan memahami mekanisme penyetoran pendapatan.
 - f Belum semua SKPD dalam penyusunan aliran kas berdasarkan anggaran yang dibutuhkan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan kesulitan dalam merealisasikan dan harus melakukan revisi anggaran kas dan DPA yang telah ditetapkan.
 - g Belum semua SKPD mengetahui Sisdur pengelolaan Keuangan Daerah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pencatatan Akuntansi untuk pelaporan.
 - h Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset daerah masih diperlukan tenaga yang kompeten dibidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan.
 - i Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang TI dan sarana prasarana untuk Aplikasi SIKPD yang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2011.
 - j Pengelolaan Aset dalam tahun 2010 dalam LHP BPK dinyatakan telah tercapai WTP 2011 namun masih terdapat paragraf penjelasan aset kabupaten/kota belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), temuan itu sudah ditindaklanjuti penyelesaiannya di tahun 2011. Untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam mempertahankan opini WTP.
 - k Pengelola barang dan pengurus barang terhadap aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIMA) masih kurang dan dalam pencatatan aset untuk modal dan belanja barang dan jasa yang bisa dikapitalisasi dan dicatat sebagai Aset.
 - l Masih ada kesulitan dalam inventarisasi Barang Milik Daerah yang ada di SKPD – SKPD.
 - m Penyelesaian tanah eks Bioskop Indra. Kegiatan T.A 2010 (perubahan) belum selesai untuk biaya penggantian untuk pengosongan 7 penghuni yang menguasai tanah dan bangunan, baru 4 orang yang terealisasi sisanya 3 orang akan diselesaikan T.A berikutnya, tetapi T.A 2011 dan T.A 2010 belum dianggarkan.
11. Kepegawaian
 - a Pemeliharaan mesin absensi elektronik cukup merepotkan karena terjadi banyak kerusakan mesin di masing-masing SKPD.

- b Seleksi Penerimaan Calon PNS Berdasarkan Peraturan bersama MENPAN dan RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penundaaan sementara penerimaan CPNS tahun 2011-2012
- c Upaya penerapan Diklat Sistem Satu Pintu belum optimal.
- d Belum maksimalnya pemanfaatan alumni Diklat baik alumni Diklat Struktural maupun Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
- e Sarana dan prasarana penyelenggaraan Diklat belum optimal
- f Belum optimalnya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang mengakibatkan Diklat-Diklat (Teknis Fungsional) yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan.
- g Banyak daerah yang mengutamakan diklat aparatur di daerahnya sendiri dan meningkatnya kompetisi dengan lembaga diklat yang lain dalam hal penyelenggaraan diklat.

12. Persandian

- a Rendahnya Pemanfaatan Persandian
- b Persandian sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pejabat/pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menjaga informasi rahasia di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi DIY
- c Kelembagaan Persandian
- d Belum terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang dampaknya menyulitkan pelaksanaan fungsi pembinaan dan persandian
- e Keterbatasan SDM
- f Pada proses regenerasi SDM terdapat hambatan kekurangan personel yang membidangi persandian
- g Peralatan
- h Keterbatasan peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk mendukung kinerja persandian masih sangat dirasakan.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a) Berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan beban kerja urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan yang dilaksanakan di Provinsi DIY belum secara optimal.
- b) Masih banyak program kegiatan dari Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri yang dibebankan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat belum dapat tertangani secara keseluruhan.

- c) Koordinasi program dan kegiatan dengan kabupaten/kota belum optimal, dikarenakan SKPD kabupaten/kota yang mengampu urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masih tersebar di beberapa SKPD.

22. URUSAN SOSIAL

- a) Program Pengentasan kemiskinan melalui Pola Konsentrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal .
- b) Penanganan masalah kemiskinan melalui kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait.
- c) Pendampingan PMKS belum dilakukan secara berkesinambungan dan belum optimal, sedangkan penanganan PMKS harus dilakukan pendampingan yang berkelanjutan.
- d) Data monitoring dan evaluasi hasil penanganan program dan kegiatan yang dilakukan, belum terpetakan tingkat perkembangan, keberhasilan atau kegagalannya.
- e) Keberadaan UPTD belum dikembangkan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada klien maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.

23. URUSAN KEBUDAYAAN

- a) Belum tersusunnya Draft Review Master Plan Museum dengan pengelolaan berstandar internasional yakni Museum Sonobudoyo dan Museum Ulen Sentalu sehingga pedoman untuk menuju berstandar internasional belum ada, masih menggunakan master plan yang lama.
- b) Belum ditetapkannya cagar budaya yang ada di Provinsi DIY oleh kabupaten/kota walaupun inventarisasi mengenai cagar budaya telah tersedia.

24. URUSAN STATISTIK

- a) Urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data, sering terjadi perbedaan angka atau data.
- b) Sifat data statistik yang dinamis, berakibat pada sulitnya penentuan data akhir secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan yang diharapkan.
- c) Beberapa data statistik dalam pengadaannya sangat komprehensif, sehingga dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan angka akhir dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini berakibat pada beberapa data penting belum dapat diwujudkan.
- d) Sering terjadi tuntutan peraturan perundang-undangan tentang kebutuhan data guna berbagai kepentingan saling tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Hal ini berakibat munculnya ragam data

yang sangat banyak, dan menyulitkan dinas, instansi, lembaga terkait penanggung jawab data dalam penyediaannya.

25. URUSAN KEARSIPAN

- a) Sampai dengan akhir tahun 2011 belum tersedia gedung depo penyimpanan arsip dinamis dan arsip statis. Saat ini penyimpanan arsip dilakukan di Ruang Hall (terbuka) akibatnya memperpendek umur arsip.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

- a) Jumlah tenaga fungsional tertentu (pustakawan dan arsiparis) yang tersedia masih belum sesuai dengan Pergub Nomor 68/07 jumlah arsiparis 20 orang dan pustakawan 25 orang. Saat ini ada 15 orang tenaga pustakawan dan 12 tenaga arsiparis. Akibat dari kekurangan tenaga fungsional, maka pengelolaan kearsipan dan pelayanan perpustakaan kurang maksimal.
- b) Belum rampungnya pembangunan gedung layanan yang representatif, saat ini gedung yang digunakan untuk layanan kurang nyaman, disamping itu daya tampung dan ketahanan gedung/bangunan akibat gempa menjadikan pelayanan kurang nyaman.
- c) Pada tahun 2011 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY ditetapkan sebagai Center Of Exellent Budaya Jawa, untuk mendukung CEO tersebut diperlukan dukungan sarana dan prasarana maupun pengembangan serta koordinasi yang pada tahun anggaran ini belum ada.
- d) Pengembangan perpustakaan oleh Pemda Provinsi DIY masih kurang menyentuh sampai ke tingkat desa/kelurahan, sehingga pertumbuhan perpustakaan desa/kelurahan masih tersendat-sendat terlebih dalam pengelolaan SDM nya yang belum sepenuhnya diperhatikan melalui APBDes.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PARIWISATA

- a) Persaingan antar wilayah di Indonesia dalam bidang kepariwisataan
- b) Tingkat kejenuhan wisatawan terhadap ODTW yang ada di Provinsi DIY, sebagai akibat kurangnya diversifikasi ODTW yang ada
- c) Strategi promosi yang kurang efektif
- d) Sarana, prasarana dana komodasi yang belum maksimal, misal kurangnya sarana transportasi ke dan dari ODTW di malam hari
- e) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Sadar Wisata dan Sapta Pesona.

2. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a) Produksi dan produktivitas masih rendah.
- b) Produksi perikanan dan kelautan lokal Provinsi DIY belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan masyarakat di Provinsi DIY, sehingga 70% kebutuhan produk masih didatangkan dari luar daerah. Belum optimalnya kelembagaan pelaku

usaha bidang kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan, nelayan, pengolah maupun pemasar produk perikanan).

- c) Overfishing penangkapan di jalur I atau perikanan pantai, berpotensi menimbulkan konflik antara pelaku usaha penangkapan.
- d) Terbatasnya kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan dalam tingkat pendidikan serta penguasaan teknik tangkap dan budidaya, serta ketidakmampuan mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi maju, khususnya di bidang aqua bisnis, sehingga mengalami hambatan dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain.
- e) Masih lemahnya kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan yang menyebabkan terhambatnya upaya meningkatkan pendapatan serta memperbaiki taraf hidup.
- f) Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti terbatasnya pelabuhan perikanan, kapal serta alat tangkap bagi nelayan, sehingga nelayan belum mampu menjangkau jalur yang lebih jauh yang memiliki potensi ikan yang masih banyak.
- g) Perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi penangkapan di laut.
- h) Terbatasnya akses modal nelayan dan pembudidaya ikan.

3. URUSAN PERTANIAN

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian
SDM pertanian meliputi petani dan petugas. Sebagian besar petani di Provinsi DIY berusia lanjut dengan pendidikan relatif rendah. Minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian rendah, terutama pada sisi *on-farm* (budidaya). Selain itu, jumlah petugas Penyuluh dan Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) makin terbatas, dengan angka pensiun yang tidak berimbang dengan perekrutan petugas baru sehubungan dengan moratorium rekrutmen PNS. Akibatnya, rasio antara petugas dan petani/kelompok tani jauh dari ideal yaitu satu desa satu petugas.
- b) Adopsi teknologi budidaya dan teknologi pascapanen/pengolahan
Petani pada umumnya masih menggunakan cara-cara yang sudah terbiasa dilakukan secara turun-temurun. Petani akan mengadopsi teknologi terbaru apabila sudah meyakini benar dan sudah terbukti bahwa teknologi baru tersebut benar-benar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan teknologi yang sudah diyakininya selama bertahun-tahun. Temuan teknologi terbaru belum secara cepat dapat diinformasikan ke tingkat lapang.
- c) Akses terhadap permodalan
Sumber utama pembiayaan usahatani sebagian besar berasal dari modal sendiri. Sementara itu pemerintah telah menyediakan beberapa skema pembiayaan/SKIM kredit bagi petani/peternak dengan bunga yang relatif rendah dibanding skim kredit komersial. Skema pembiayaan usahatani antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR),

Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS). Namun demikian, penyerapan skema kredit tersebut belum maksimal karena bank-bank penyalur mensyaratkan agunan ataupun penjaminan kepada petani/peternak, sehingga petani/peternak belum dapat secara maksimal memanfaatkan kredit dimaksud.

d) Sarana dan prasarana.

1. Pemilikan lahan pertanian

Hasil PUT Tahun 2009 Provinsi DIY juga menunjukkan bahwa sebagian besar RTUT-PJKT di Provinsi DIY (78,32%) menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha.

2. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi tersier pada saat ini sebagian besar merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada beberapa puluh tahun yang lalu, atau merupakan jaringan irigasi sangat sederhana yang dibangun secara swakarsa oleh masyarakat. Saat ini cukup banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, karena mengalami kerusakan. Di sisi lain kondisi jaringan irigasi tersier masih banyak yang belum permanen atau terbuat dari tanah sehingga memperlambat aliran air bahkan menyebabkan kebocoran di sepanjang saluran yang mengakibatkan ketidakmerataannya pembagian air sejak hulu hingga hilir.

3. Jalan Pertanian

Di sebagian besar wilayah perdesaan jalan pertanian belum memadai sehingga terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usahatani maupun dalam pemasaran hasil pertanian.

4. Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimiawi

Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik maupun pestisida kimiawi masih cukup tinggi dalam budidaya, bahkan untuk komoditas tertentu penggunaannya melampaui jumlah yang direkomendasikan, sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi dan kerusakan ekosistem.

e) Faktor luar

1. Pemanasan global

Perubahan iklim global mengakibatkan perubahan iklim yang cukup ekstrem dan tidak menentu sehingga menyulitkan petani dalam pengaturan musim tanam.

2. Kebijakan ekonomi makro

Kebijakan Pemerintah berupa ratifikasi Persetujuan WTO dan ACFTA berakibat pada masuknya produk impor ke pasar domestik secara masal yang tidak dapat dibendung. Hal tersebut menjadi ancaman bagi produk pertanian lokal karena pada umumnya harga produk lokal lebih mahal, akibat inefisiensi dalam pengelolaan usaha. Di samping itu penjualan produk pertanian lokal biasanya dilakukan dengan sistem curah sehingga kalah bersaing dengan produk impor dalam hal pengemasan produk.

3. Dampak lahar dingin Merapi
Lahan dingin berdampak pada tidak berfungsinya jaringan irigasi hulu yang mengakibatkan ketersediaan aliran dari hulu ke hilir berkurang dan tidak mencukupi untuk budidaya tanaman.
Aliran lahan dingin juga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian karena tertutup pasir (di wilayah Kulonprogo 100 ha, Sleman 130 ha dan Bantul 8 ha)
4. URUSAN KEHUTANAN
 - a) Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang dan masih terjadi pencurian kayu hutan.
 - b) SDM dan kelembagaan petani hutan dan kebun masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan agribisnis perkebunan secara utuh.
 - c) Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan secara keseluruhan belum sesuai standar teknis.
 - d) Produk primer dan atau produk olahan perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu.
 - e) Daya dukung lahan, air dan hutan masih belum optimal sesuai yang diharapkan sehingga perlu terus ditingkatkan.
 - f) Keterlambatan proses lelang sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan seperti pemupukan dan penanaman.
5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - a) Masih terdapat kurang lebih 244 dusun yang sebagian besar KK nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang, karena pembangunan jaringan listrik di wilayah-wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar
 - b) Masih terjadinya ketidaklancaran distribusi LPG tabung 3 Kg di beberapa wilayah terpencil yang disebabkan karena belum optimalnya pengawasan dan belum meratanya sebaran penyalur/agen dan sub penyalur/pangkalan khususnya di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul
 - c) Kegiatan usaha pertambangan belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum ditetapkannya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati.
6. URUSAN INDUSTRI
 - a) Terbatasnya kemampuan SDM pembina industri dalam penguasaan manajemen bisnis.
 - b) Pengusaha IKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi.

- c) Persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah dan Negara lain misalnya: Serat tumbuhan, Kayu, Kulit, Perak, Bambu, IKM, Terigu, Kedelai, dan Susu.
- d) Umumnya IKM masih lemah dalam desain, inovasi dan kreativitas produk.
- e) Dalam berproduksi sebagian besar pengusaha hanya berdasarkan Job Order/Buyer Minded
- f) Kemitraan Usaha pemasaran masih minim sehingga jaringan pasar masih terbatas.
- g) IKM belum optimal memanfaatkan pasar global karena daya saing masih rendah dan dihadapkan adanya peraturan lingkungan hidup, HAKI, Manajemen Mutu atau ISO 9000.
- h) Masih banyak barang dijual belum menggunakan SNI, misalnya: Pupuk dan Air Minum Isi Ulang, produk logam, batik, kerajinan dan lain-lain karena Penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal.
- i) Kemampuan promosi IKM masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap relatif mahal.
- j) Program pengembangan HAKI masih kurang optimal karena manfaat HAKI belum begitu dirasakan oleh perajin, terbatasnya dukungan dengan bantuan pendaftaran merk, sosialisasi HAKI serta operasional klinik HAKI juga kurang optimal

7. URUSAN PERDAGANGAN

Perdagangan Dalam Negeri

- a) Gejolak harga bahan pokok yang terjadi setiap tahun cukup menjadi permasalahan yang harus di minimalkan meskipun hal tersebut tidak bisa dihindari terkait pada setiap adanya menjelang hari-hari besar agama, pergantian tahun, permintaan yang meningkat dan persediaan barang yang kurang memadai. Pengaruh cuaca yang mengakibatkan produksi bahan pokok menurun juga mengakibatkan terjadi gejolak harga.
- b) Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif, sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah, disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi dan fluktuasi harga belum terkendali.
- c) Sarana dan Prasarana khususnya pergudangan keberadaannya belum merata ke semua Kabupaten/Kota, khususnya untuk pergudangan komoditi primer seperti hasil pertanian.
- d) Pembinaan dan pengawasan sistem penjualan langsung belum optimal.
- e) Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan dari BPSK dan LPKSM yang ada kinerjanya masih belum optimal karena terbatasnya dukungan dana operasional.
- f) Pengembangan pasar tradisional cukup dipengaruhi oleh adanya persaingan dengan munculnya pasar modern/toko modern yang cukup banyak,

mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional.

- g) Keberadaan sektor informal yang bergerak di usaha perdagangan belum sepenuhnya menerima pembinaan yang semestinya, karena keterbatasan anggaran dan besarnya unit usaha yang harus dibina.
- h) Banyaknya produk impor yang masuk ke Provinsi DIY menurunkan daya saing pemasaran produk dalam negeri yang mengakibatkan pengusaha/IKM dalam negeri yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya.
- i) Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- j) Untuk mengikuti penyelenggaraan pasar lelang, pelaku usaha masih memerlukan bantuan pendampingan.
- k) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan distribusi komoditi tertentu seperti gula rafinasi, pupuk bersubsidi, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan barang kebutuhan strategis lainnya.
- l) Daya saing produk dan kemampuan UMKM dalam mengakses pasar masih relatif rendah, khususnya kemitraan dengan toko-toko modern dalam hal pemasaran.

Perdagangan Luar Negeri

- a) Krisis keuangan yang masih berlanjut mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor potensial Provinsi DIY yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa mengakibatkan permintaan ekspor menurun 60% dengan terjadinya hal tersebut otomatis ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami penurunan. Beberapa komoditi yang mengalami penurunan secara signifikan dan mempengaruhi total ekspor Provinsi DIY di antaranya adalah komoditi mebel kayu/furnitur, kerajinan kayu, kerajinan perak, kertas, teh hijau, teh hitam, produk kulit, dan beberapa produk ekspor lain.
- b) Di samping itu ada beberapa negara tujuan ekspor yang mengalami peningkatan di antaranya adalah negara tujuan India, Cina, Jepang, Korea Selatan, ke-4 negara tersebut mengisi kekosongan permintaan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Prediksi ke depan jika krisis Eropa membaik ekspor akan meningkat lebih dari 5%.
- c) Bahan baku beberapa jenis industri yang menghasilkan produk ekspor mulai langka dan sangat tergantung pada daerah lain, sehingga harga menjadi mahal misalnya serat alam, kayu dan bambu.
- d) Bahan Baku Perak
 1. Adanya PPn 10%, maka bahan baku perak menjadi mahal (dikenakan pajak ganda PPn dan PPh masing-masing 10%).
 2. Bahan Perak yang bermutu baik lebih menguntungkan di ekspor karena tidak dikenakan pajak ekspor dan harga jual bahan baku lebih mahal.

3. Adanya Black Market yang memanfaatkan fasilitas ekspor, hanya dengan permainan dokumen ekspor bahan baku perak diekspor tapi hanya masuk pabean dan bahan baku perak beredar lagi di pasar lokal.
- e) Bahan baku industri kulit dan produk kulit (KPK) langka dan mahal :
 1. Karena masih dibukanya kran ekspor bahan baku kulit dengan pungutan ekspor relatif rendah (15% & 20%) sesuai PP No. 35 Tahun 2005.
 2. Larangan impor bahan baku kulit mentah dari beberapa negara yang terkena virus PMK sesuai edaran Menteri Pertanian No. TN510/94/A/N/2001
- f) Penerapan sertifikat legalitas bagi bahan baku kayu oleh negara Uni Eropa dimana bahan baku harus bersumber dari hutan yang dikelola secara berkesinambungan.
- g) Belum adanya IPAL terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh industri kulit
- h) Kondisi infrastruktur (jalan dan jembatan) di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, belum memadai bagi angkutan kontainer, menyebabkan terhambatnya kelancaran angkutan barang.
- i) Belum memadainya layanan pelabuhan ekspor dan prasarannya.
- j) Media perbankan dalam mendukung peningkatan produksi/ekspor belum berjalan dengan lancar.

Balai Metrologi

- a) Belum terpenuhinya alat standar jenis tertentu.
- b) Masyarakat pemilik/pemakai alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) belum sepenuhnya memahami tentang hak dan kewajibannya berkait dengan peraturan kemetrologian.
- c) Pengusaha alat UTTP di Provinsi DIY saat ini sulit berkembang karena kekurangan tenaga ahli.
- d) Banyaknya produk UTTP impor yang ilegal (Produk Cina) yang beredar.

Balai Pelayanan Bisnis Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

- a) Mahalnya Biaya pengurusan sertifikat HKI .
- b) Belum adanya peraturan daerah terkait dengan pengelolaan layanan bisnis on line (www.jogjaplaza.com)
- c) Belum tersedianya database HKI.

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

- a) Jumlah warga masyarakat yang menginginkan transmigrasi lebih banyak dari jumlah alokasi program. Sehingga setiap tahun ada masyarakat yang tidak bisa terlayani untuk ikut transmigrasi.
- b) Kondisi di lokasi transmigrasi kadang masih dijumpai tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan, sehingga tidak sesuai dengan azas 2 C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha). Hal ini

mendorong terjadi keresahan/ketidakbetahan transmigran. Hal ini terbukti 2 lokasi penempatan yang gagal yaitu:

1. UPT Linuang Kayam Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur sebanyak 25 KK karena rumah, fasilitas dan prasarana lain belum siap.
 2. Lokasi Gebang Perkasa, sembuga Kabupaten Sambas Kalimantan Barat sebanyak 25 KK karena Lokasi tumpang tindih dengan perusahaan waktu Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dijanjikan setiap kk 2 H ternyata setelah ditinjau hanya 1 H dan masih ada sengketa dengan penduduk setempat.
- c) Persiapan lokasi permukiman dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini menyebabkan penumpukan kegiatan pengerahan dan pemindahan calon transmigran di akhir tahun anggaran. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban menumpuk pada akhir tahun anggaran.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan suatu provinsi tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB Provinsi DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 21,042 trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87%, sedangkan proyeksi PDRB tahun 2011 diperkirakan masing-masing mencapai kisaran Rp22.094.384.000.000 - Rp22.157.510.000.000 (2011). Nilai PDRB tahun 2011 sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp24,558 trilyun. Prediksi kisaran PRDB pada 2012 dan 2013 adalah Rp23.243.291.000.000 - Rp23.354.016.000.000 dan Rp24.428.699.000.000 - Rp24.591.779.000.000 seperti ditunjukkan di Tabel 3.1.

Tabel III.3.1.1

Nilai PDRB Provinsi DIY

Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2000) (juta Rp) Tahun 2010 - 2013

Lapangan Usaha	2010	2011*		2012*		2013*	
		2011m	2011o	2012m	2012o	2013m	2013o
1. Pertanian	3.632.681	3,756,045	3,766,777	3,904,873	3,923,475	3,979,435	4,006,001
2. Pertambangan & Penggalian	139.967	143,613	144,024	146,433	147,130	153,901	154,928
3. Industri Pengolahan	2,793,580	2,940,762	2,949,165	3,109,952	3,124,767	3,075,573	3,096,105
4. Listrik, Gas & Air Bersih	193.027	198,849	199,418	202,217	203,180	227,187	228,704
5. Bangunan	2.040.306	2,154,202	2,160,357	2,266,221	2,277,017	2,545,470	2,562,463
6. Perdgngn, Hotel & Restoran	4.383.851	4,600,051	4,613,194	4,850,875	4,873,983	5,142,241	5,176,569
7. Pengangkutan	2.250.664	2,364,099	2,370,854	2,496,330	2,508,221	2,687,157	2,705,096

Lapangan Usaha	2010	2011*		2012*		2013*	
		2011m	2011o	2012m	2012o	2013m	2013o
& Komunikasi							
8. Keu, Persewaan & Jasa Prushn	2.024.368	2,165,250	2,171,436	2,291,789	2,302,706	2,450,199	2,466,555
9. Jasa-jasa	3.585.598	3,771,511	3,782,287	3,974,603	3,993,537	4,167,536	4,195,357
PDRB	21.044.042	22,094,384	22,157,510	23,243,291	23,354,016	24,428,699	24,591,779

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

Proyeksi tersebut menggunakan perkiraan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 4,70 – 5,20% dan 4,90–5,40%. Pada tahun 2013 perekonomian akan menghadapi tantangan berat berupa perlambatan sebagai dampak krisis global dan stabilitas sosial politik terkait persiapan menyambut perhelatan politik tahun 2014.

3.1.2. Struktur Sektor Ekonomi

Selama tahun 2010 dan 2011 tidak ada perubahan struktur kontributor PDRB regional Provinsi DIY. Sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB pada tahun 2010 – 2011. Hal ini sejalan dengan peranan dinamika sektor perdagangan dan kepariwisataan Provinsi DIY yang semakin meningkat.

Tabel III.3.1.2

Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), 2010 – 2013 (%)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	17,26	17,00	16,80	16,47
2. Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,65	0,63	0,63
3. Industri Pengolahan	13,27	13,31	13,38	13,01
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,92	0,90	0,87	0,88
5. Konstruksi	9,70	9,75	9,75	9,90
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,83	20,82	20,87	20,95
7. Transportasi dan Komunikasi	10,70	10,70	10,74	11,00
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,62	9,80	9,86	10,00
9. Jasa-jasa	17,04	17,07	17,10	17,16
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

Peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Pola ini juga akan terus berlanjut di masa mendatang mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sektor perdagangan DIY didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor. Komoditas dengan nilai ekspor tertinggi adalah pakaian jadi tekstil dengan pangsa 30,07% dari total ekspor DIY. Penyumbang terbesar berikutnya adalah Mebel Kayu dengan pangsa 12,97% dan Sarung Tangan Kulit dengan pangsa 12,30%.

Secara sektoral seperti ditampilkan dalam Tabel III.3.1.3, pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi di sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Keuangan seperti. Hal ini terjadi karena dinamika di sektor perumahan. Sejalan dengan nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tertinggi, maka kontribusi sektor ini secara konsisten juga menjadi yang tertinggi dalam perekonomian. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian dan industri pengolahan bahkan proyeksi pertumbuhan optimis sektor pertanian selalu berada di bawah 5% sampa tahun 2013 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.3. Sektor pertanian memberikan kontribusi besar karena sebagian besar wilayah DIY khususnya di Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Sleman masih merupakan lahan pertanian dengan karakteristik berbeda. Meskipun demikian pertumbuhannya sektor ini cenderung melambat dari tahun ke tahun.

Tabel III.3.1.3
Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000) Tahun 2010 – 2010 (%)

Lapangan Usaha	2010	2011		2012		2013	
		m	o	m	o	m	o
1. Pertanian	0,27	3,84	4,14	3,96	4,16	3,04	3,23
2. Pertambangan dan Penggalian	0,88	2,60	2,90	1,96	2,16	5,10	5,30
3. Industri Pengolahan	7,00	5,27	5,57	5,75	5,95	2,19	2,39
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4,00	3,01	3,31	1,69	1,89	6,31	6,51
5. Konstruksi	6,06	5,58	5,88	5,20	5,40	6,72	6,92
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,33	5,17	5,47	5,45	5,65	5,50	5,70
7. Transportasi dan Komunikasi	5,73	5,27	5,57	5,59	5,79	7,64	7,85

Lapangan Usaha	2010	2011		2012		2013	
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	6,35	5,46	5,76	5,84	6,05	6,59	6,80
9. Jasa-jasa	6,44	5,18	5,49	5,38	5,59	5,47	5,67
PDRB	4,88	5,00	5,30	5,20	5,40	5,10	5,30

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

3.1.3. Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Dari sisi permintaan dari tahun ke tahun, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan konsumsi adalah pendapatan masyarakat yang membaik dan di sisi lain dukungan pembiayaan meningkat. Beberapa survei mendukung adanya peningkatan konsumsi pada tahun 2010. Hasil Survei Konsumen yang menunjukkan bahwa nilai Indeks Keyakinan Konsumen selama tahun 2010 berada dalam zona optimis walaupun pada akhir tahun menurun akibat erupsi Merapi.

Tabel III.3.1.4

Nilai PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan 2000),
2010 – 2013 (juta Rp)

Jenis Penggunaan	2010	2011		2012		2013	
		m	o	m	o	m	o
1. Konsumsi Rumah Tangga	9,881,632	10,390,989	10,420,677	10,984,780	11,037,108	11,562,103	11,639,289
2. Konsumsi Pemerintah	4,215,320	4,474,113	4,486,896	4,720,712	4,743,201	4,976,126	5,009,345
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,561,440	5,832,917	5,849,583	6,078,121	6,107,075	6,412,534	6,455,342
4. Lainnya	1,383,880	1,396,365	1,400,355	1,459,679	1,466,632	1,477,936	1,487,803
PDRB	21,042,270	22,094,384	22,157,510	23,243,291	23,354,016	24,428,699	24,591,779

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

Tabel III.3.1.5 menunjukkan dinamika proyeksi pertumbuhan PDRB Provinsi DIY berdasarkan Penggunaan. Pertumbuhan investasi mengalami peningkatan sejalan dengan dimulainya pembangunan proyek investasi baik oleh swasta maupun pemerintah di DIY, antara lain dimulainya pembangunan *flyover*, *underpass*, *waterbom*, *Industrial Estate* di Piyungan dan Sentolo, *Inland Port*, pembangunan beberapa hotel berbintang, dan lain-lain. Permintaan ekspor juga mulai membaik walaupun belum sepenuhnya pulih dan ikut memicu tambahnya investasi. Sedangkan, perdagangan antar daerah DIY diperkirakan masih akan mengalami defisit, mengingat DIY bukan merupakan daerah industri sehingga banyak mendatangkan barang manufaktur dari luar daerah.

Tabel III.3.1.5
 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan 2000), (%)

Jenis Penggunaan	2011		2012		2013	
	m	o	m	o	m	o
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.15	5.46	5.71	5.92	5.26	5.46
2. Konsumsi Pemerintah	6.14	6.44	5.51	5.71	5.41	5.61
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.88	5.18	4.20	4.40	5.50	5.70
4. Lainnya	0.90	1.19	4.53	4.73	1.25	1.44
PDRB	4.94	5.24	5.20	5.40	5.10	5.30

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

Keterangan: "m" = moderat dan "o" = optimis

Menurut data BPS, pertumbuhan nilai PDRB riil berdasarkan harga konstan 2000 Provinsi DIY tahun 2010 berdasarkan penggunaan adalah berturut-turut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 7,28%, Pengeluaran Konsumsi LSN 16,22%, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2,82%, Pembentukan Modal Tetap 3,41%, Ekspor Barang dan Jasa -6,43% dan Lainnya adalah 0,63%. Sementara proyeksinya untuk tahun 2011 disajikan di Tabel III.3.1.5

Survei penjualan eceran juga menunjukkan masih terdapatnya kecenderungan masyarakat umum untuk menaikkan konsumsi terhadap hampir semua kelompok komodit Indeks Penjualan Eceran selama tahun laporan meningkat, yaitu dari 151,26 pada tahun 2009 menjadi 160,98 pada tahun 2010. Beberapa indikator konsumsi menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor meningkat, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) juga meningkat.

Di sisi Konsumsi Pemerintah, nilai riil konsumsi pemerintah hanya tumbuh 2,82 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2009 sebesar 7,55 persen. Perlambatan peningkatan nilai riil konsumsi dipengaruhi oleh inflasi di tahun 2010 yang meningkat cukup tinggi. Pada tahun 2011, proyeksi pertumbuhan nilai riil pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan lagi dengan kisaran pertumbuhan sebesar 6,14% - 6,44%. Namun proyeksi nilai tersebut akan turun di tahun 2012 dan 2013. Nilai investasi yang ditanamkan di DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp5.561 miliar atau tumbuh sebesar 3,41 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (3,21 persen). Sedangkan pembentukan proyeksi modal tetap domestik bruto mengalami fluktuasi di mana ada kenaikan di tahun 2011 (4,88% - 5,18%) dan 2013 (5,50% - 5,70%) , sedangkan di tahun 2012 terjadi penurunan (4,20% - 4,40%)

Faktor yang mempengaruhi peningkatan investasi adalah membaiknya kepercayaan pengusaha terhadap prospek ekonomi DIY. Beberapa proyek juga direalisasikan pada tahun 2010 antara lain pembangunan beberapa hotel baru sehingga jumlah kamar mengalami peningkatan, dan juga proyek-proyek *property residensial* maupun komersial. Selain itu, beberapa proyek infrastruktur juga sedang dikerjakan seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta di Kecamatan Temon sudah mencapai 85 persen dan beberapa infrastruktur yang mendukung pelabuhan tersebut antara lain tempat pelelangan ikan (TPI), shelter nelayan, pabrik es, docking atau tempat perbaikan kapal dan pemecah ombak.

Pertumbuhan komponen Lainnya, termasuk di dalamnya ekspor-impor, perdagangan antar wilayah dan perubahan stok, mengalami pertumbuhan 0,63 persen yoy, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh -11,91 persen. Nilai riil komponen ini meningkat dari Rp1.375 miliar menjadi Rp1.384 miliar pada tahun laporan. Sementara itu, andil Komponen Lainnya meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari -0,97 persen pada tahun 2009 menjadi 0,04% pada tahun laporan. Kinerja ekspor DIY meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

3.1.4. Inflasi

Pada tahun 2010 inflasi DIY berada di atas inflasi Indonesia. Tingkat inflasi DIY tahun 2010 adalah 7,38% sedangkan inflasi Indonesia adalah 6,96%. Laju inflasi tahunan Kota Yogyakarta tahun 2010 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan ibu kota provinsi lain di pulau Jawa. Selain Kota Yogyakarta, pada tahun 2010 di pulau Jawa terdapat dua ibu kota provinsi yang juga mengalami lanju inflasi di atas 7 persen yaitu Surabaya (7,33 persen) dan Semarang (7,10 persen). Kondisi ini mirip dengan kondisi tahun 2007 dimana pada waktu itu Yogyakarta mengalami laju inflasi tahunan sebesar 7,99 persen yoy sementara ibu kota propinsi lain di pulau Jawa laju inflasi tahunannya kurang dari 7,00 persen.

Tabel III.3.1.6 menunjukkan bahwa proyeksi moderat inflasi DIY untuk tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 4,00% dan 5,20%. Inflasi yang rendah diperkirakan terjadi karena pemerintah mampu menjaga stok kebutuhan bahan pangan dan barang konsumsi lainnya melalui pemberdayaan kemampuan lokal maupun kegiatan impor. Kenaikan di tahun 2012 diperkirakan akan terjadi karena kenaikan konsumsi pemerintah yang cukup signifikan terkait dengan persiapan pemilu tahun 2014, dan dampak harga pangan dunia yang diperkirakan terus meningkat.

Sementara itu beberapa faktor yang kemungkinan dapat mendorong inflasi di tahun mendatang antara lain adalah masih terus meningkatnya harga pangan di pasar ternasional terkait dengan iklim, tingginya harga minyak dunia yang nantinya dapat menyebabkan kian tingginya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dan pada akhirnya dapat memaksa pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dan ekspektasi inflasi terkait cukup tingginya capaian inflasi pada tahun sebelumnya.

Tabel III.3.1.6
Proyeksi Inflasi Provinsi DIY, Tahun 2011 – 2013

Tahun	Range Angka Proyeksi	Proyeksi Angka Moderat
2011	3,70-4,00	3.75
2012	3,90-4,30	4.00
2013	5,10-5,60	5.20

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

3.1.5. ICOR

Tingkat efisiensi suatu perekonomian diukur dengan angka Incremental Capital-Output Ratio (ICOR). Suatu daerah memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang semakin efisien jika nilai ICOR-nya semakin kecil yang menunjukkan semakin sedikitnya modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di DIY meningkat, di mana ICOR yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Tren ICOR diharapkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yang menunjukkan perbaikan efisiensi aktivitas ekonomi DIY. ICOR Provinsi DIY adalah sebesar 6,5 pada tahun 2010. Proyeksi nilai ICOR selama tahun 2011 sampai dengan 2013 ditampilkan di Tabel III.3.1.7 Pada tahun 2011, diperkirakan angka ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Provinsi DIY akan berada pada kisaran angka 4,85(m)-4,50(o) yang artinya untuk menghasilkan output Rp.1 diperlukan investasi sebesar Rp.4,85-4,50. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan perkiraan pada tahun 2012 dan 2013. Tahun 2012 ICOR diperkirakan meningkat mencapai 5,15(m)-5,00(o) dan tahun 2013 kembali turun menjadi 5,00(m)-4,80(o). Kenaikkan ICOR di tahun 2012 diperkirakan karena dampak krisis global mempengaruhi kegiatan ekonomi dan efektivitas investasi.

Proyeksi angka ICOR Provinsi DIY diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian DIY ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) sehingga target-target makroekonomi yang dirumuskan dapat tercapai. Pencapaian target-target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan ICOR Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.3.1.7
 Proyeksi ICOR Provinsi DIY
 Tahun 2011-2013

Tahun	ICOR
2011m	4.85
2011o	4.50
2012m	5.15
2012o	5.00
2013m	5.00
2013o	4.80

Sumber: *Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013*

3.1.6. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja di DIY pada Agustus 2010 sebanyak 2,70 juta orang atau turun sebesar 6,04% jika dibandingkan dengan Agustus 2009. 1,88 juta orang atau 69,76% tergolong sebagai angkatan kerja, sedangkan sisanya bukan angkatan kerja karena sedang mengikuti sekolah, menjadi ibu rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2010 sebanyak 1,775 juta orang, turun sebesar 120,50 ribu orang bila dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2009 (1,896 juta orang).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi DIY pada Agustus 2010 sebesar 69,76 persen turun jika dibandingkan Agustus 2009 (70,23 persen). Angkatan kerja DIY pada Agustus 2010 sebanyak 1,88 juta orang, 94,31 persen diantaranya atau sebanyak 1,775 juta orang bekerja dan sisanya 5,69 persen atau 107 ribu orang merupakan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka). Presentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Agustus 2009 (6,00 persen) seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang melambat. Sementara itu, dibandingkan dengan angka pengangguran nasional (7,14 persen) presentase pengangguran di DIY lebih kecil. Kondisi ini dapat dicermati dalam angka pertumbuhan kedua kategori ini pada periode 2005 – 2010, dimana rata-rata laju pertumbuhan berkisar antara 2 – 3%.

Tabel III.3.1.8
 Proyeksi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kegiatan (orang) Provinsi DIY

Keterangan	2011	2012	2013
Angkatan kerja	2.113.444	2.165.509	2.210.451
Bekerja	1.982.526	2.031.839	2.073.824
Pengangguran terbuka	132.164	135.443	139.047
Pengangguran terbuka (%)	6,25	6,25	6,29
Jumlah Penduduk	3.598.556	3.644.822	3.694.460
Tingkat Partisipasi AK (%)	58,73	59,41	59,83

**Rasio Pengangguran terhadap angkatan kerja*

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

Jika laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja, maka kondisi yang berbeda berlaku pada laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik di tingkat lokal maupun nasional. Proyeksi persentase angkatan kerja yang menganggur selama tahun 2011 – 2013 berkisar antara 6,25% sampai 6,29% seperti ditunjukkan pada Tabel 3.8. Investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja secara optimal.

3.1.7. Kemiskinan

Nilai Garis Kemiskinan Provinsi DIY pada Maret 2010 sebesar Rp224.258,- per kapita per bulan. Dibandingkan dengan angka bulan 2009 yang besarnya Rp211.978,- per kapita per bulan, sementara itu tingkat kemiskinan turun menjadi 16,83 persen. Jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY dari tahun ke tahun cenderung menurun. Penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak lepas dari upaya-upaya pemerintah melalui beberapa program yang dilaksanakan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembagian beras raskin, pembebasan bea SPP, Jamkesra dan lain-lain yang cukup efektif menurunkan tingkat kemiskinan dimaksud.

Tabel III.3.1.9
Proyeksi Penduduk Miskin di Provinsi DIY

Tahun	Jumlah	
	Jumlah	% thd penduduk Provinsi
2011	568.359	15,79
2012	553.589	15,19
2013	538.918	14,59

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013

Tingkat kemiskinan di Provinsi DIY diproyeksikan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Proyeksi prosentase penduduk miskin dari tahun 2011 sampai 2013 adalah sebagai berikut 15,79%, 15,19% dan 14,59% seperti ditunjukkan pada Tabel III.3.1.9. Penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak lepas dari upaya-upaya pemerintah melalui beberapa program yang dilaksanakan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembagian beras raskin, pembebasan bea SPP, Jamkesra dan lain-lain yang cukup efektif menurunkan tingkat kemiskinan.

3.1.8. Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan regional antara daerah diukur dengan indeks ketimpangan Williamson. Semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Indeks Williamson pada tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti ditampilkan pada Tabel III.3.1.10, proyeksi Indeks tersebut menurun pada tahun 2011 menjadi 44,40 dari 45,17 pada tahun 2010. Sedangkan proyeksinya pada tahun 2012 dan 2013 meningkat menjadi 44,42 (2011) dan 44,45 (2012). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketidakmerataan regional antar kabupaten/kota se-provinsi DIY.

Tabel III.3.1.10.
Indeks Willamson Provinsi DIY (2010 – 2013)

Tahun	Indeks Williamson
2010	45,17
2011	44,40
2012	44,42
2013	44,45

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013 dan Hasil olahan

3.1.9. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan indikator koefisien Gini. Ketimpangan pendapatan yang membesar ditunjukkan angka koefisien Gini yang meningkat (lihat

Tabel III.3.1.11). Proyeksi koefisien Gini Provinsi DIY di tahun 2011 adalah 32,78 yang mengalami peningkatan dibandingkan indeks tahun 2010 yang sebesar 30,88. Proyeksi koefisien tersebut turun pada 2012 dan 2013 masing-masing menjadi 31,97 dan 31,84. Perkembangan koefisien tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY semakin mengecil.

Tabel III.3.1.11
Koefisien Gini Provinsi DIY
(2010 – 2013)

Tahun	Koefisien Gini
2010	30,88
2011	32,78
2012	31,97
2013	31,84

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013 dan Hasil olahan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Analisis Keuangan Daerah

Dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBD, kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan di daerah. Keuangan daerah terdiri dari seluruh komponen yang ada pada pos Pendapatan Daerah dan pada pos Penerimaan Pembiayaan. Sejalan dengan pencapaian misinya, maka kondisi keuangan daerah pada tahun 2013 diperkirakan masih akan mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu meningkat tajam. Hal ini diselaraskan dengan beberapa prioritas kebijakan di sisi belanja yang pada akhirnya dikembalikan untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut.

Pada tahun 2013 ini, kemampuan keuangan daerah masih akan didominasi dari sisi Pendapatan Daerah. Meski demikian penatausahaan pada sisi Penerimaan Pembiayaan juga mulai dibenahi secara administrasi sehingga lambat laun sisi ini akan pula dijadikan penopang keuangan daerah.

1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana

Dalam RPJMD diamanatkan bahwa, prediksi kapasitas keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 6% setiap tahunnya. Kenaikan tersebut diasumsikan pada kenaikan yang mencerminkan kinerja langsung dari Pemerintah Provinsi DIY. Target kapasitas keuangan daerah yang disusun awal dalam RPJMD tergambar seperti table berikut.

Tabel III.3.2.1
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuda RKPD Tahun 2013
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

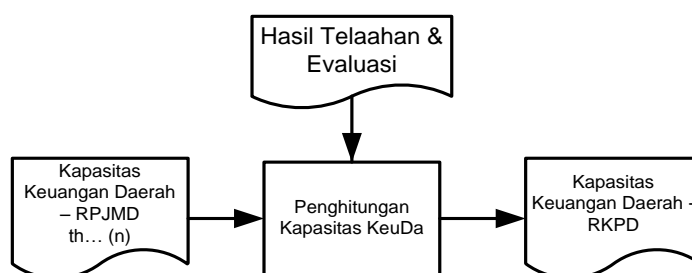
No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (2013) (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	753,510,385,644	Kenaikan PAD diasumsikan 6% per tahun
	Pajak Daerah	662,254,300,023	
	Retribusi Daerah	41,464,116,315	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	17,765,453,785	
	Lain-Lain PAD yang sah	32,026,515,521	
1.2.	Dana Perimbangan	938,747,387,628	Kenaikan Dana Perimbangan diasumsikan 11% per tahun
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	92,681,281,926	
	Dana Alokasi Umum	795,347,373,304	
	Dana Alokasi Khusus	50,718,732,398	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8,031,194,157	Kenaikan Lain-Lain diasumsikan 6% per tahun
	Hibah	4,831,625,574	
	Dana Darurat	0	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3,199,568,583	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	
	Total Pendapatan (a)	1,700,288,967,429	
2	Pencairan Dana Cadangan (b)	0	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	76,816,271,005	Sisa diasumsikan tidak lebih dari 4,5%
	Saldo kas neraca daerah	110,000,000,000	
No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (2013) (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dikurangi:	0	
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	0	Saldo minimal di kasda diasumsikan 10%
	Kegiatan lanjutan		
	Jumlah (c)	186,816,271,005	
	Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)	1,887,105,238,434	

3.2.2. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Alur penghitungan kapasitas keuangan daerah, dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan seperti di bawah ini. Prediksi yang telah disusun dalam dokumen RPJMD pada tahun 2013 dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi realita yang berjalan hingga tahun 2012 serta beberapa prakiraan mendasar yang diprediksikan terjadi pada tahun 2013 yang akan datang. Dari hasil evaluasi kemudian dianalisis ulang sehingga didapatkanlah angka prediksi 2013 sesuai kondisi yang berlaku.

Gambar III.3.2.1

Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah



Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan.

Tahap I: Analisis dan perhitungan penerimaan daerah

1. Rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah:

- a) Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel III.3.2.1

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012** (Rp)	Rata-rata Pertumb (%)
1	PENDAPATAN	1,374,205,096,941	1,600,362,787,956	1,984,139,827,309	0.20
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	740,202,076,819	863,064,841,903	847,960,936,248	0.07
1.1.1.	Pajak Daerah	634,710,019,947	735,226,678,231	731,291,174,933	0.08

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012** (Rp)	Rata-rata Pertumb (%)
1.1.2.	Retribusi Daerah	32,836,503,244	33,838,826,100	36,956,476,946	0.06
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26,333,869,885	28,961,383,473	32,503,955,541	0.11
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	46,321,683,744	65,037,954,099	47,209,328,828	0.06
1.2.	Dana Perimbangan	626,677,339,122	722,339,653,053	850,513,085,724	0.17
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	87,821,992,122	82,037,725,053	74,403,649,724	(0.08)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	527,471,247,000	620,812,328,000	757,056,696,000	0.20
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	11,384,100,000	19,489,600,000	19,052,740,000	0.34
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7,325,681,000	14,958,293,000	285,665,805,338	9.57
1.3.1.	Hibah	5,232,631,000	5,815,972,000	6,383,865,338	0.10
1.3.2.	Dana Darurat				
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2,093,050,000	9,142,321,000	279,281,940,000	16.46
1.3.5.	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				

b) Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah

Tabel III.3.2.2
Rata-rata Pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Uraian	2010	2011	2012**	Rata-rata Pertumbuhan
		(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Pegawai	42,574	43,027	42,360	42,654
2.	Belanja Bunga	0,002	-	-	0,001

No.	Uraian	2010	2011	2012**	Rata-rata Pertumbuhan
		(%)	(%)	(%)	(%)
3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4.	Belanja Hibah	11,401	1,823	28,234	13,819
5.	Belanja Bantuan Sosial	11,226	12,219	3,115	8,853
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	27,225	27,798	22,619	25,881
7.	Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa	7,225	15,131	3,671	8,676
8.	Belanja Tidak Terduga	0,347	0,002	-	0,116
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	100,000	100,000	100,000	100,000

Tabel III.3.2.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Uraian	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
		(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Pegawai	92,833	96,103	96,000	94,979
2.	Belanja Bunga	100,000	-	-	-
3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4.	Belanja Hibah	100,000	97,968	100,000	99,323
5.	Belanja Bantuan Sosial	89,528	79,431	100,000	89,653
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	100,000	100,017	100,000	100,006
7.	Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa	100,000	97,031	100,000	99,010
8.	Belanja Tidak Terduga	86,270	0,200	-	28,823
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	95,519	78,458	82,667	85,299

c) Rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah

Tabel III.3.2.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	4.710.213.613.129,05	22.926.027.993,00		
1.1.	ASET LANCAR	249.230.150.536,50	142.049.540,00		
1.1.1.	Kas	232.164.536.964,36	-		
1.1.2.	Piutang	1.969.744.673,14	-		
1.1.3.	Biaya Dibayar di Muka	85.688.376,00	-		
1.1.4.	Persediaan	15.010.180.523,00	142.049.540,00		
1.2.	ASET TETAP	4.256.783.302.575,00	22.070.167.543,00		
1.2.1.	Tanah	1.614.102.886.801,00	654.810.000,00		
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	246.910.296.992,00	14.169.198.325,00		
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	1.036.293.094.082,00	6.787.329.060,00		
1.2.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.324.936.912.288,00	248.107.908,00		
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	15.977.307.862,00	210.722.250,00		
1.2.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	18.562.804.550,00	-		
1.3.	ASET LAINNYA	204.200.160.017,55	713.810.910,00		
1.3.1.	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	6.777.000.000,00	-		
1.3.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	71.111.261,55	-		
1.3.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.594.179.000,00	-		
1.3.4.	Aset Tak Berwujud	20.490.331.762,00	713.810.910,00		
1.3.5.	Aset Lain-lain	169.267.537.994,00	-		
	JUMLAH ASET DAERAH	4.710.213.613.129,05	22.926.027.993,00		
2.	KEWAJIBAN	3.841.706.582,00	-		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.841.706.582,00	-		
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	78.854.904,00	-		
2.1.2.	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.762.851.678,00	-		
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-		

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-			
2.2.1.	Utang Jangka Panjang	-	-		
3.	EKUITAS DANA	4.921.161.804.505,09	22.926.027.993,00		
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	245.388.443.954,88	142.049.540,00		
3.1.1.	SILPA	232.076.541.506,36	-		
3.1.2.	Pendapatan yang Ditangguhkan	9.140.554,00	-		
3.1.3.	Cadangan Piutang	2.055.433.049,14	-		
3.1.4.	Cadangan Persediaan	15.010.180.523,38	142.049.540,00		
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	(3.762.851.678,00)	-		
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	4.672.479.095.734,19	22.783.978.453,00		
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	211.495.633.141,64	-		
3.2.2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.256.783.302.575,00	22.070.167.543,00		
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	204.200.160.017,55	713.810.910,00		
3.2.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	-	-		
3.3.	EKUITAS DANA CADANGAN	3.294.264.816,02	-		
3.3.1.	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	3.294.264.816,02	-		
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.925.003.511.087,09	22.926.027.993,00		

3.2.3. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
- Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan:
- a. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Di bawah ini tergambar proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya. Paling besar kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dari tiga tahun terakhir adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara rinci sumbangan PAD dari sector Pajak Daerah masih menjadi unggulan diikuti dengan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pusat. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi DIY sudah mampu memenuhi kebutuhan pendapatannya secara mandiri melalui kinerja Pajak Daerah.

Tabel III.3.2.5
Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian	Tahun		
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	53.86	53.93	42.74
1.1.1.	Pajak Daerah	46.19	45.94	36.86
1.1.2.	Retribusi Daerah	2.39	2.11	1.86
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	1.92	1.81	1.64
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	3.37	4.06	2.38
1.2.	Dana Perimbangan	45.60	45.14	42.87
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	6.39	5.13	3.75
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	38.38	38.79	38.16
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0.83	1.22	0.96
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.53	0.93	14.40
1.3.1	Hibah	0.38	0.36	0.32
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.15	0.57	14.08
1.3.5	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	100	100	100

b. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Analisis dilakukan dengan mengisi tabel kinerja realisasi pendapatan dibawah ini.

Tabel III.3.2.6
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Kinerja (%)		
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	PENDAPATAN	7.76	9.49	0.43
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15.86	16.74	1.00
1.1.1.	Pajak Daerah	17.61	15.20	1.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.05	4.23	1.00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	(2.30)	(0.82)	1.00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	13.76	64.87	1.00
1.2.	Dana Perimbangan	(0.20)	1.00	0.00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	(1.43)	9.58	0.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(12.71)	109.90	0.02
1.3.1	Hibah	16.24	15.45	1.00
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	(46.20)	337.69	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja realisasi pendapatan daerah yang terburuk adalah dari sisi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hal ini dikarenakan optimalisasi terhadap pengelolaan

BUMD belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Oleh karenanya kebijakan dalam membenahan BUMD yang termasuk di dalamnya kemungkinan adanya penyuntikan modal perlu diperhatikan dengan lebih seksama. Agar ke depan BUMD dapat mandiri dan perlahan mengurangi ketergantungan dari APBD.

c. Analisis proyeksi pendapatan daerah

Dalam analisis ini dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain)
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel III.3.2.7

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2013 (Rp)
1	PENDAPATAN	1,942,887,646,347
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	807,342,534,373
1.1.1.	Pajak Daerah	705,943,350,213
1.1.2.	Retribusi Daerah	32,295,589,500
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	31,785,000,000
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	37,318,594,660
1.2.	Dana Perimbangan	850,513,085,724
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	74,403,649,724
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	757,056,696,000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	19,052,740,000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	285,032,026,250

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2013 (Rp)
1.3.1	Hibah	5,750,086,250
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	279,281,940,000
1.3.5	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-

3.2.4. Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasarnya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup:

Tabel III.3.2.8
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2013 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	116.583.663.961,44
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	23.316.732.792,29
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	69.950.198.376,86
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.829.183.198,07
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	17.487.549.594,22
1.5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0
1.6	Kegiatan lanjutan	0
2	Pencairan Dana Cadangan	0
2.1	Pencairan Dana Cadangan	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
3.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	0
3.2	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
4.1	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	0
4.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	0
4.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	0
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	0

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2013 (Rp)
4.5	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	25.574.600.000,00
5.1	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0
5.2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	25.574.600.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0
6.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	0
6.2	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	0
6.3	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	0
6.4	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	0
6.5	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	0

Berikut disajikan hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun 2013 secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan/pengurangan. Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel III.3.2.9
Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	753,510,385,644	807,342,534,373	53,832,148,729	
	Pajak Daerah	662,254,300,023	705,943,350,213	43,689,050,190	Ada kenaikan yang cukup besar karena adanya kenaikan tarif pajak dan pemberlakuan pajak progresif
	Retribusi Daerah	41,464,116,315	32,295,589,500	(9,168,526,815)	Adanya pengurangan potensi retribusi sebagai tindak lanjut pembatasan sesuai dengan

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					UU 28/2009
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	17,765,453,785	31,785,000,000	14,019,546,215	Adanya kenaikan yang cukup baik karena pembinaan BUKP meningkat
	Lain-Lain PAD yang sah	32,026,515,521	37,318,594,660	5,292,079,139	Kerjasama dengan pihak ketiga semakin baik
1.2.	Dana Perimbangan	938,747,387,628	850,513,085,724	(88,234,301,904)	
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	92,681,281,926	74,403,649,724	(18,277,632,202)	Beberapa penerikONSEKUNSIYA IKUT BERKURANGMAANNYA SUDAH DILIMPahkan kepada Pemkab/Pemkot
	Dana Alokasi Umum	795,347,373,304	757,056,696,000	(38,290,677,304)	Mengurangnya jumlah pegawai
	Dana Alokasi Khusus	50,718,732,398	19,052,740,000	(31,665,992,398)	Pembatasan pemberian DAK hanya untuk sector penting saja
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8,031,194,157	285,032,026,250	277,000,832,093	
	Hibah	4,831,625,574	5,750,086,250	918,460,676	Kerjasama dengan pihak ketiga meningkat
	Dana Darurat	0	0	0	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	0	0	0	

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Lainnya				
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3,199,568,583	279,281,940,000	276,082,371,417	Titipan gaji dan tunjangan untuk guru
	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	
	Total Pendapatan (a)	1,700,288,967,429	1,942,887,646,347	242,598,678,918	
2	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan	0	0	0	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	24,915,000,000	25,574,600,000	659,600,000	Dana Bergulir
	Pengembalian Utang	0	0	0	
	Penerimaan Piutang	0	0	0	
	Jumlah (b)	24,915,000,000	25,574,600,000	659,600,000	
3	Proyeksi Silpa Riil	76,816,271,005	116,583,663,961	39,767,392,956	Sesuai hasil proyeksi Perhitungan APBD
	Saldo kas neraca daerah	110,000,000,000	125,000,000,000	15,000,000,000	Kurang lebih 10% dari total pendapatan ada di kasda
	Dikurangi:		0	0	
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	0	0	0	
	Kegiatan lanjutan	0	0	0	
	Jumlah (c)	186,816,271,005	241,583,663,961	54,767,392,956	

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)	1,912,020,238,434	2,210,045,910,308	298,025,671,874	

3.2.5. Penghitungan Pengeluaran Daerah

Penghitungan dilakukan dengan mengambil data dan informasi proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun rencana dari RPJMD, kemudian ditelaah dan disinkronkan dengan hasil evaluasi pada langkah (a). Pada komponen yang berkesesuaian lalu ditambah/dikurangi untuk menghasilkan proyeksi belanja dan pengeluaran daerah RKPD tahun rencana. Penambahan/pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan analisis proyeksi belanja dan pengeluaran RKPD tahun rencana yang telah dilakukan, mencakup:

1. Analisis belanja daerah tahun rencana

Analisis belanja daerah tahun rencana mencakup analisis terhadap:

a. Belanja tidak langsung, meliputi:

- 1) Gaji dan tunjangan PNS dihitung dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah *accressy* yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
- 4) Belanja bagi hasil dihitung berdasarkan besarnya perjanjian bagi hasil dengan pihak III.
- 5) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja langsung, meliputi:

- 1) Belanja honorarium PNS, khusus untuk guru dan tenaga medis dihitung dengan berdasarkan kelangkaan profesi.
- 2) Belanja beasiswa pendidikan PNS.
- 3) Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).
- 4) Belanja sewa gedung kantor.

- 5) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya).

3.2.6. Analisis pengeluaran pembiayaan tahun rencana

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana. Pada prinsipnya metode perhitungan yang digunakan sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:
 - 1) Badan usaha milik pemerintah (BUMN);
 - 2) Badan usaha milik daerah (BUMD);
 - 3) Badan usaha milik swasta.
- c. Pembayaran pokok utang:
 - 1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah;
 - 2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
 - 3) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
 - 4) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
 - 5) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah;
 - 6) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
 - 7) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
 - 8) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
 - 9) Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo;
 - 10) Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.
- d. Pemberian pinjaman daerah:
 - 1) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah;
 - 2) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain.

Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana kemudian dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel III.3.2.10
Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	Belanja Tidak Langsung	990,785,742,146.00	829,658,447,997.15	161,127,294,148.85	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	713,295,672,784.00	547,771,137,809.15	165,524,534,974.85	
2.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,428,389,000.00	1,428,389,000.00	-	
3.	Belanja Bunga	-	-	-	
4.	Belanja Bagi Hasil	250,000,000,000.00	254,397,240,826.00	(4,397,240,826.00)	
5.	Belanja Bantuan Kepada Desa *)	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	
6.	Belanja Bantuan Partai Politik	1,061,680,362.00	1,061,680,362.00	-	
B	Pengeluaran Pembiayaan	24,915,000,000.00	25,574,600,000.00	(659,600,000.00)	
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
2.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	
3.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24,915,000,000.00	25,574,600,000.00	(659,600,000.00)	
	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT	1,015,700,742,146.00	855,233,047,997.15	160,467,694,148.85	

Untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, atas kapasitas keuangan riil yang telah dihitung diatas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program/kegiatan wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan:

- Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Tabel III.3.2.11
Penghitungan Kebutuhan Belanja Langsung: Wajib/Mengikat dan Prioritas
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana(Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Program/kegiatan yang menampung belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	5.100.000.000,00	5.900.000.000,00	(800.000.000,00)	
2.	Program/kegiatan yang menampung belanja beasiswa pendidikan PNS	200.000.000,00	152.000.000,00	48.000.000,00	
3.	Program/kegiatan yang menampung belanja jasa kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor Seperti Listrik, Telepon, Air, dll)	81.000.000,00	79.000.000,00	2.000.000,00	
4.	Program/Kegiatan yang Menampung Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	
5.	Program/Kegiatan yang Menampung Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	
	TOTAL BELANJA LANGSUNG WAJIB DAN MENGIKAT	5.381.000.000,00	6.131.000.000,00	(750.000.000,00)	

BAB IV

TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2013 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

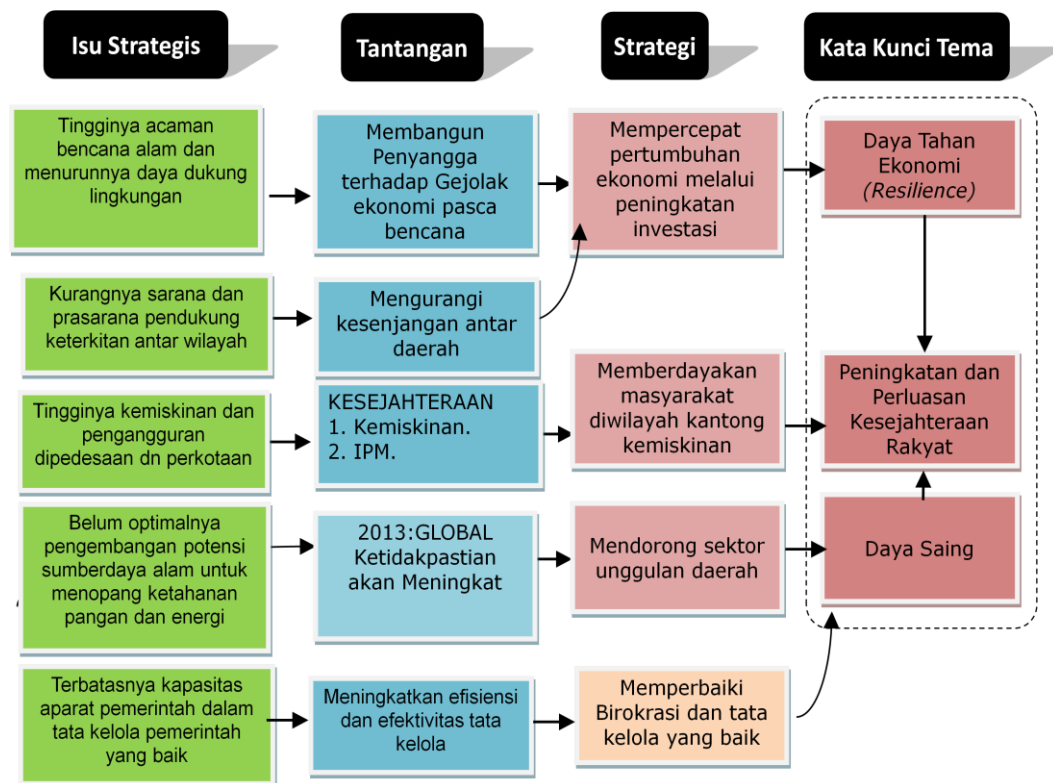
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
Pembangunan Daerah Tahun 2013 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun II (2010–2014) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY Tahun 2005-2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun II (2010–2014) adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect & forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009-2029
Pembangunan Daerah Tahun 2013 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2010-2014) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029, dimana dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan strategis Nasional dan Provinsi salah satu indikasi program utamanya adalah Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial Budaya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013
Pembangunan Daerah Tahun 2013 adalah tahun terakhir dari RPJMD Tahun 2009-2013 untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika.
4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2011
 - b. Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya
 - c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:
 - 1) Tingginya Kemiskinan dan Pengangguran di Pedesaan & Perkotaan
 - 2) Kurangnya sarana prasarana pendukung keterkaitan antar wilayah
 - 3) Belum optimalnya pengembangan potensi sumberdaya alam untuk menopang ketahanan pangan dan energi
 - 4) Terbatasnya kapasitas aparat pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang baik
 - 5) Tingginya ancaman bencana alam dan menurunnya daya dukung lingkungan
5. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2013 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, dengan tiga kata kunci (*key word*) utama tema yaitu:
 - a. Daya tahan ekonomi (*resilience*),

- b. Daya saing, serta
- c. serta peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi DIY pada tahun 2013 adalah: **"Penguatan Daya Saing dan Daya Tahan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat"**.

Gambar IV.4.1.1

Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan *Key Word* Tema Tahun 2013



Penguatan daya saing (*competitiveness*) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik *talented people*, investasi, dan *mobile factors* lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan. Daya saing perekonomian akan dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. Apabila kita berbicara mengenai produktivitas, maka unsurnya yang paling pokok adalah sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Efisiensi menyangkut aspek kelembagaan ekonomi, terutama bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan sedikitnya hambatan dalam transaksi.

Penguatan daya tahan (*resillience*) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejala yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas

ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak). Perekonomian yang tidak mudah terombang ambing tersebut, antara lain ditandai oleh tiga ciri berikut. Pertama, adanya diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya, sumber penerimaan daerahnya, dan sebagainya. Kedua, pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang tinggi (*flexibility*) dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat. Ketiga, kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung (*conducive*) terciptanya iklim usaha yang sehat.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi DIY Tahun 2013 adalah:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola SKPD yang lebih baik dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD (meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*).
2. Pendidikan;
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:
 - a. Peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan;
 - b. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan;
 - c. Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi;
 - d. Peningkatan budaya baca masyarakat;
 - e. Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).
3. Kesehatan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan:
 - a. Kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat;
 - b. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

4. Penanggulangan kemiskinan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan:
 - a. Kualitas pengelolaan ketenagakerjaan;
 - b. Kualitas pengelolaan ketrasmigrasian;
 - c. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat.Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).
5. Ketahanan pangan;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera).
6. Infrastruktur;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataan prasarana dan sarana publik terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan kemanfaatan ruang. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).
7. Iklim investasi dan usaha;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang adaptif. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera).
8. Energi;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta efisiensi konsumsi energi. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).
9. Lingkungan hidup dan bencana;
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal di daerahnya, sehingga diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).

11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya.

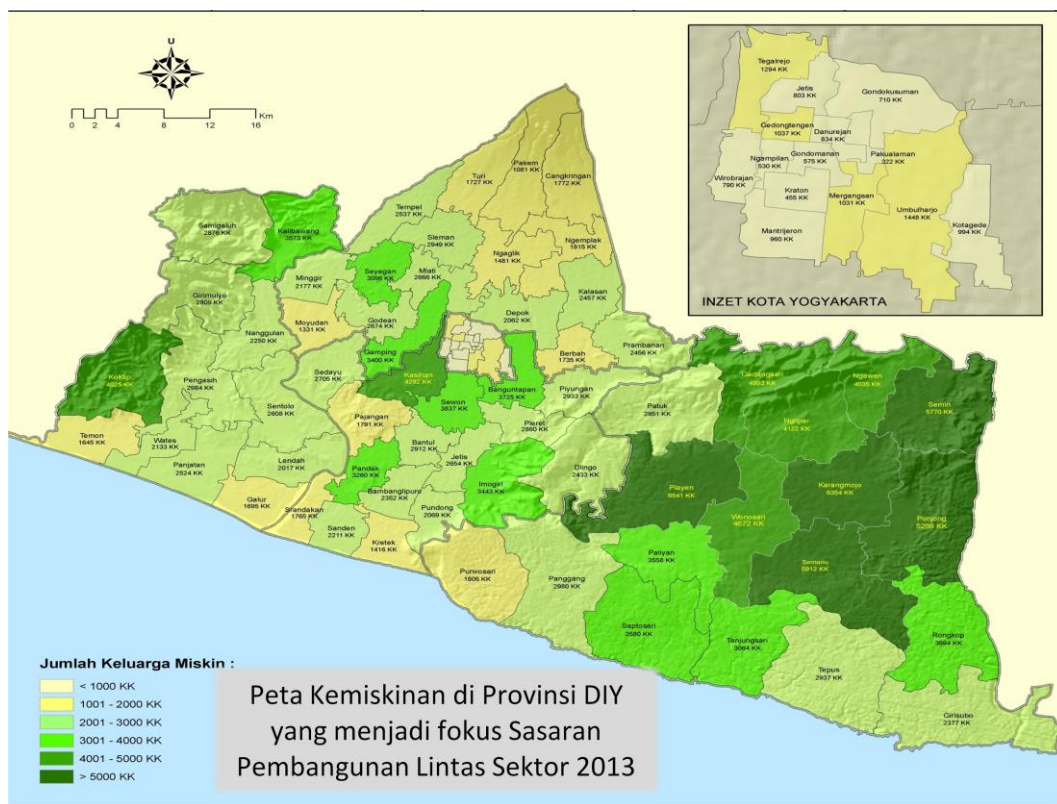
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

4.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan tahun 2013 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Lokasi yang akan menjadi perhatian utama dalam pembangunan tahun 2013 adalah di daerah kantong-kantong kemiskinan dimana keluarga miskin tinggal. Sebaran daerah kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar IV.4.3.1
Sebaran Penduduk Miskin Provinsi DIY



Dilihat dari sebaran jumlah keluarga miskin, kantong-kantong kemiskinan sebagian besar terdapat di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

Namun demikian, terdapat 16 titik kecamatan di empat kabupaten (Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo) dan 4 kecamatan di Kota Yogyakarta yang menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor.

Titik-titik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

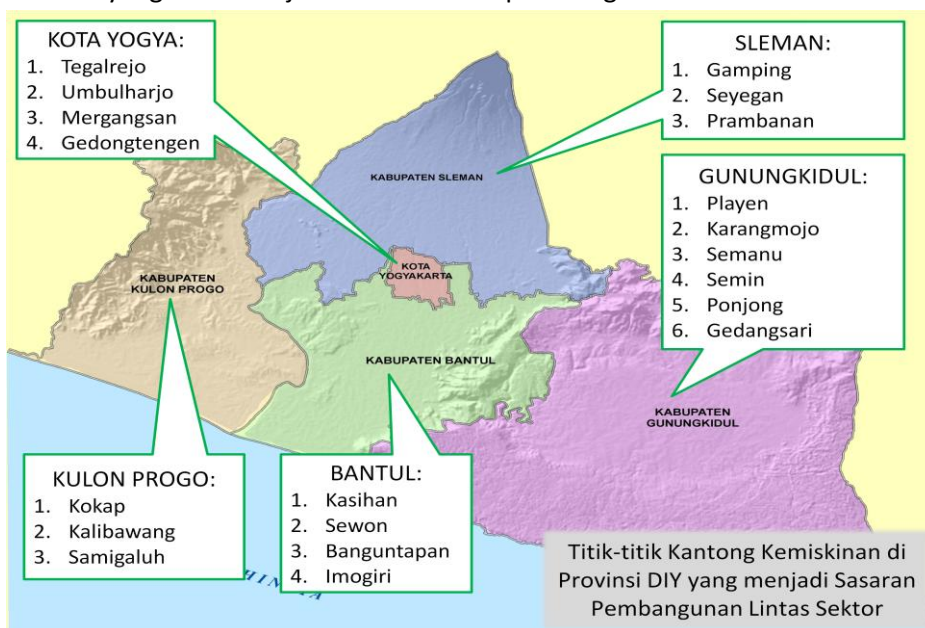
Tabel IV.4.3.1

Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor tahun 2013

No	Kabupaten/Kota		Kecamatan
1	Sleman	1	Gamping
		2	Seyegan
		3	Prambanan
2	Bantul	1	Kasihan
		2	Sewon
		3	Banguntapan
		4	Imogiri
3	Gunungkidul	1	Playen
		2	Karangmojo
		3	Semanu
		4	Semin
		5	Ponjong
		6	Gedangsari
4	Kulon Progo	1	Kokap
		2	Kalibawang
		3	Samigaluh
5	Kota Yogyakarta	1	Tegalrejo
		2	Umbulharjo
		3	Mergangsan
		4	Gedongtengen

Gambar IV.4.3.2

Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor tahun 2013



4.4. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran utama yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka harapan hidup serta pengangguran.

Target Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ditunjukkan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel IV.4.4.2
Target Pembangunan Daerah Tahun 2013

Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%)	Kemiskinan ²⁾ (%)	Pengangguran ³⁾ (%)	IPM ⁴⁾
1	2	3	4
5,50–6,50	15,50–14,50	6,25–5,25	76,5 (ranking 3 atau 2 Nasional)

Keterangan:

- 1) *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*
- 2) *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*
- 3) *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*
- 4) *Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Indeks komposit dari Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan.*

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
 - c. Program Pendidikan Menengah.
 - d. Program Pendidikan Tinggi.
 - e. Program Pendidikan Luar Biasa.
 - f. Program Pendidikan Nonformal.
 - g. Program Pendidikan Informal.
 - h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
 - j. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
 - k. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka.
 - l. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.

2. Pemuda dan Olahraga
 - a. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
 - b. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
 - c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
 - d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

3. Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
 - b. Program Pengembangan Data/Informasi.
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 - b. Program Pengembangan Nilai Budaya.
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
 - d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
5. Sosial
- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
 - d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Program Pembinaan Anak Terlantar.
 - f. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
 - g. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
 - h. Perencanaan Pembangunan
 - i. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
6. Kesehatan
- a. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan
 - b. Program Pelayanan Kesehatan.
 - c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 - e. Program Kesehatan Keluarga.
 - f. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin.
 - g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
 - i. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan.
 - j. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan.
 - k. Program Sistem Informasi Kesehatan.
 - l. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - m. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
 - n. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- a. Program Keluarga Berencana.
 - b. Program Pelayanan Kontrasepsi.
 - c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/ AIDS.
 - e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- a. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
 - b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 - c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

- d. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 - e. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 - f. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
 - c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
10. Pemberdayaan Perempuan
- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
 - b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - c. Program Peningkatan peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan *Gender* dan Anak.
11. Kelautan dan Perikanan
- a. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.
 - b. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
 - c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
 - e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
 - f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
 - g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
 - h. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
 - i. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam.
 - j. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.
 - k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - l. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
 - m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - n. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - o. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
 - p. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - q. Program Pemantapan Reformasi Birokrasi.
 - r. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
 - s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
 - t. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

- u. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- v. Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah.
- w. Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- x. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.
- y. Program Analisis Kebijakan Pembangunan.
- z. Program Penelitian dan Pengembangan.
- ã. Program Pendidikan Kedinasan.
- bb. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- ö. Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- aa. Program Pengembangan Persandian.
- bb. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

12. Pertanian

- a. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani.
- b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
- e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.
- f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

13. Ketahanan Pangan

- a. Program Pemberdayaan Penyuluhan.
- b. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan.

14. Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- c. Program Pengembangan Kemitraan.

15. Koperasi dan UKM

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

16. Perindustrian

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- b. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

- d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
 - e. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif.
 - f. Program Penataan Struktur Industri.
17. Penanaman Modal
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
 - c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
18. Perdagangan
- a. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
 - c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
19. Tenaga Kerja
- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
 - c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
20. Transmigrasi
- a. Program Transmigrasi Regional.
 - b. Program Transmigrasi Lokal.
 - c. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
21. Kehutanan dan Perkebunan
- a. Program Pengembangan Agribisnis.
 - b. Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan.
 - c. Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan
 - d. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
 - e. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.
 - g. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
 - h. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
22. Perencanaan Pembangunan
- a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
 - b. Program Pengembangan Data/Informasi.
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

- f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
23. Pemerintahan Umum
- a. Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah.
 - b. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro.
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.
24. Energi dan Sumberdaya Mineral
- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan.
 - b. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar.
 - c. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
 - d. Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi.
25. Kearsipan
- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
 - b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
 - c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
26. Statistik
- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
27. Kependudukan dan Catatan Sipil
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
28. Pertanahan
- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - b. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
29. Pekerjaan Umum
- a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya.
 - d. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
 - e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
 - f. Program Pengendalian Banjir.
 - g. Program Pengelolaan Persampahan.

- h. Program Pengembangan Kawasan.
 - i. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
 - j. Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
 - k. Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
 - l. Program Pelayanan Jasa Pengujian.
30. Perumahan
- a. Program Pengembangan Perumahan.
 - b. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
 - c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
 - d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh.
31. Penataan Ruang
- a. Program Perencanaan Tata Ruang.
 - b. Program Pemanfaatan Ruang.
 - c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
32. Perhubungan
- a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
 - d. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
 - f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
33. Lingkungan Hidup
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
 - c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Selanjutnya program dan kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi DIY Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi DIY Tahun 2013 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2013 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001